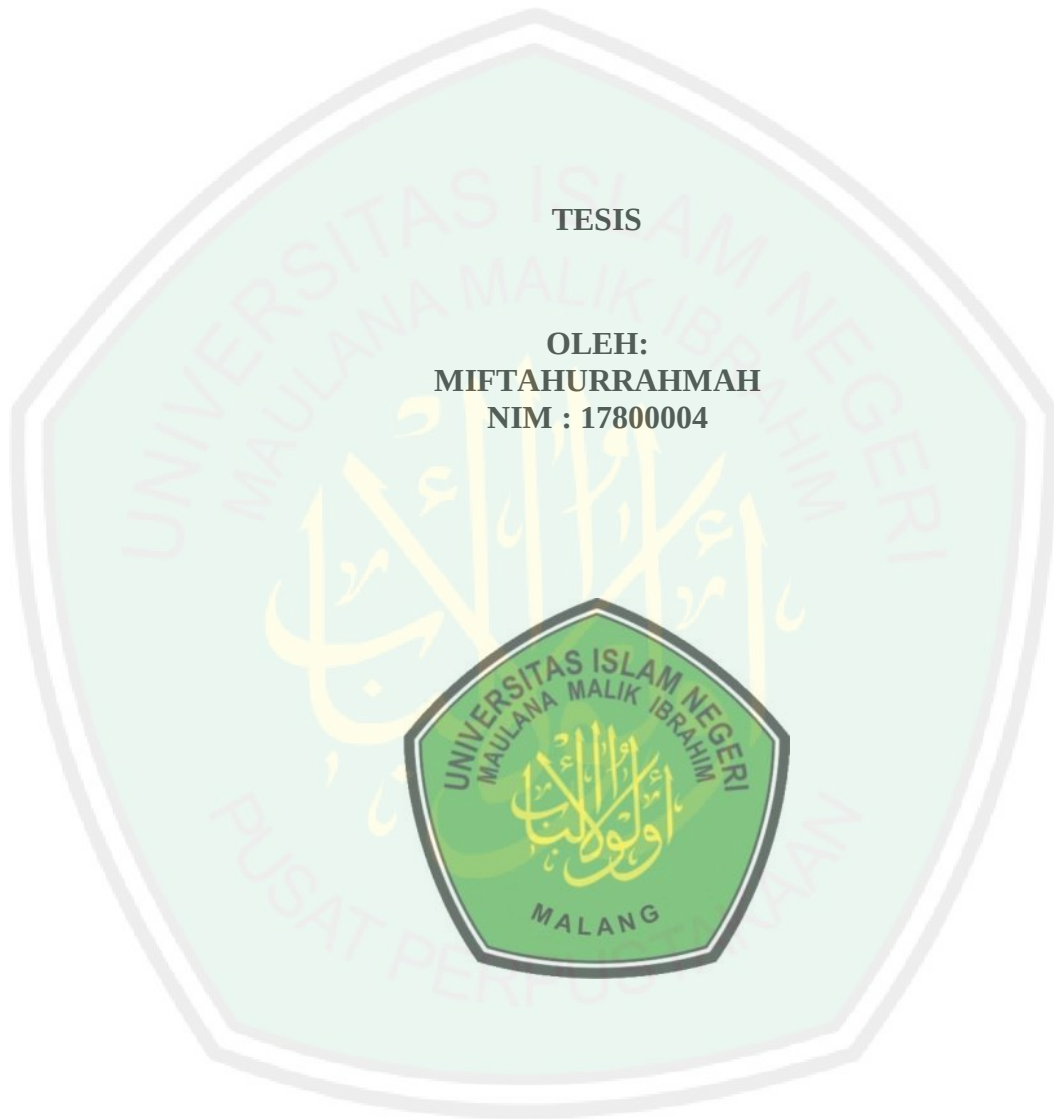


**PENGARUH PDRB PERKAPITA, TINGKAT KEMISKINAN,
JUMLAH PENDUDUK DAN TINGKAT PENGANGGURAN
TERBUKA TERHADAP KETIMPANGAN DISTRIBUSI
PENDAPATAN DI SUMATERA BARAT SELAMA TAHUN 2011-2017**

TESIS

**OLEH:
MIFTAHURRAHMAH
NIM : 17800004**



**PROGRAM MAGISTER EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2019**

**PENGARUH PDRB PERKAPITA, TINGKAT KEMISKINAN,
JUMLAH PENDUDUK DAN TINGKAT PENGANGGURAN
TERBUKA TERHADAP KETIMPANGAN DISTRIBUSI
PENDAPATAN DI SUMATERA BARAT SELAMA TAHUN 2011-2017**

Tesis Diajukan Kepada:

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan
Program Studi Magister Ekonomi Syariah

Oleh:

MIFTAHURRAHMAH

NIM : 17800004



**PROGRAM MAGISTER EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2019**

HALAMAN PERSETUJUAN

Tesis dengan judul “*Analisis Pengaruh PDRB Perkapita, Tingkat Kemiskinan, Jumlah Penduduk Dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Sumatera Barat Periode 2011- 2017*” ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji,

Malang, 7 September 2019
Pembimbing I,


Slamet, SE, MM, Ph.D
NIP. 196604121998031003

Malang, 2 Oktober 2019
Pembimbing II,


Dr. Siswanto, Msi
NIP. 197509062006041001

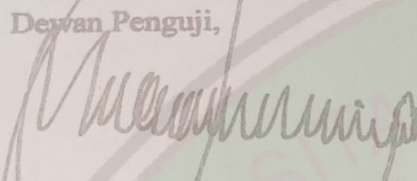
Malang, 2 Oktober 2019
Mengetahui,
Ketua Program Magister Ekonomi Syariah


Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc. M.A
NIP: 197307192005011003

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis dengan judul *"Analisis Pengaruh PDRB Perkapita, Tingkat Kemiskinan, Jumlah Penduduk Dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Sumatera Barat Periode 2011- 2017*, ini telah diuji didepan sidang dewan penguji pada tanggal 31 Oktober 2019.

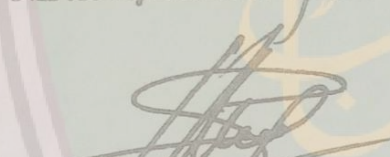
Dewan Penguji,


Dr. H Salim Al Idrus, MM, M.Ag
NIP.19550302198703 1004

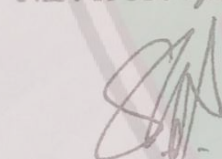
Ketua Penguji


Dr. Eko Suprayitno, SE, MSi
NIP.197511091999031003

Penguji Utama


Slamet, SE, MM, Ph.D
NIP. 196604121998031003

Anggota


Dr. Siswanto, Msi
NIP. 197509062006041001

Anggota

Mengetahui,
Direktur Pascasarjana,



Prof. Dr. H. Umi Sumbulah, M.Ag
NIP. 197108251998032002

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Miftahurrahmah

NIM : 17800004

Prodi : Magister Ekonomi Syariah

Judul Tesis : Pengaruh PDRB Perkapita, Tingkat Kemiskinan, Jumlah Penduduk dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Sumatera Barat Selama Tahun 2011-2017.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian saya ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 30 November 2019

Hormat saya,



Miftahurrahmah

17800004

MOTTO

“Barang siapa yang berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri...”

-QS. 29: 6

“ Tidak ada yang KEBETULAN”

e-M-F-H-a

“...maukah kau bersabar? Dan Tuhanmu Maha Melihat”

-QS. 25:87

“ Aku tau kamu lelah. Tapi kamu perlu tau diluar sana masih banyak orang yang hidupnya lebih berat dari hidupmu. Mungkin mereka tidak pernah bisa mengeluh keran tidak punya pilihan untuk itu. Mereka hanya punya pilihan untuk hidup dan berjuang mempertahankan hidup”

-Moch. Rizal Abdullah

PERSEMBAHAN

Tesis ini kupersembahkan kepada dua orang pintu syurgaku yaitu Papa Ir. Zamzami Sawir dan Mama Asma Abuzar yang tak hentikannya mencurahkan cinta, kasih sayang dan perhatiannya. Dua orang yang tak pernah meninggalkanku, walaupun bermacam kesalahan pernah kulakukan. Dua orang yang tak henti-hentinya melangitkan doa untuk kesuksesan dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Dua orang selalu mengingatkan dan memberikan dukungan hingga tesis ini terselesaikan diwaktu yang tepat.

Kepada kakakku Lailatul Husna, S.Pd dan adikku Ainul Mardhiah yang menjadi penyemangat agar pendidikan Magisterku segera selesai. Merekalah dua orang yang membuatku dapat menghapuskan kesedihan dengan berbagai macam candaan dan mendoakan setiap langkah demi langkah dalam penyelesaian studiku.

Kepada semua guru-guruku yang dengan ikhlas memberikan ilmu, nasehat dan membagikan pengalamannya sehingga aku bisa sampai pada tahap ini.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT atas limpahan kasih sayang, rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis dengan judul “ Pengaruh PDRB Perkapita, Tingkat Kemiskinan, Jumlah Penduduk Dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Sumatera Barat Tahun 2011-2017”, dengan baik. Shalawat dan salam semoga selalu tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umatnya menuju keislaman yang sempurna.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan *Jazakumullahu Khairan Katsirraa* kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung yang telah memberikan motivasi, semangat dan bimbingan dalam penyusunan tesis ini, diantaranya:

1. Kedua orang tua yaitu Ir. Zamzami Sawir dan Asma Abuzar, kakak yaitu Lailatul Husna, SPd serta adik yaitu Ainul Mardhiah serta seluruh keluarga besar atas do'a tulus dan dukungannya selama ini.
2. Rektor UIN Malang, Bapak Prof. Dr Abdul Haris, M.Ag beserta jajaran dan Direktur Pascasarjana UIN Malang, Ibu Prof. Dr. Hj.Umi Sumbulah, M.Ag beserta jajaran serta civitas akademika atas segala layanan fasilitas yang telah diberikan selama penulis menempuh studi.
3. Ketua Program Studi Magister Ekonomi Syariah, Bapak Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc, M.A dan Sekretarisnya Bapak Ainur Rofiq, Lc, M.Ag, Ph.D atas motivasi, koreksi dan kenyamanan pelayanan selama studi.
4. Dosen pembimbing I, Bapak Slamet, SE, MM, Ph.D yang telah meluangkan waktu, memberikan saran dan kontribusi pemikiran dalam penulisan tesis ini.

5. Dosen pembimbing II, Bapak Dr. Siswanto, M.Si atas bimbingan, saran, kritikan dan koreksinya dalam penulisan tesis ini.
6. Sahabat-sahabat terbaik penulis, Basaria Nasution, S. Pd (Kak Syasya), Septi Mardhatillah, S. Psi dan Rita Amalia Huljannah, S.Pd, yang selalu menyemati, menguatkan, menasehati dan mensugesti penulis untuk selalu berpikir positif terhadap apa yang telah ditetapkan Allah SWT. Walaupun kita saling berjauhan, namun selalu dekat dalam do'a-doa terbaik.
7. Teman-teman seperjuangan Magister Ekonomi Syariah Kelas A semester ganjil 2017 serta teman-teman seangkatan yang telah berjuang bersama dalam melalui suka duka dalam menempuh jenjang pendidikan.
8. Teman-teman HIMMPAS (Himpunan Mahasiswa Muslim Pascasarjana) 2017/2018 dan 2018/2019 dan teman-teman kos yang telah menjadi keluarga terdekat bagi penulis selama di perantuan.

Semoga kebaikan dan keikhlasan semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tesis ini diganjar pahala oleh Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini masih terdapat kekurangan yang disebabkan keterbatasan waktu, kemampuan, pengetahuan yang dimiliki penulis. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya. *Aamiin Ya Rabb.*

Malang, 30 November 2019
Hormat saya,

Miftahurrahmah
17800004

ABSTRAK

Miftahurrahmah, 17800004, 2019, Pengaruh PDRB Perkapita, Tingkat Kemiskinan, Jumlah Penduduk dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Sumatera Barat Selama Tahun 2011-2017, Tesis, Program Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Malang, Pembimbing (I) Slamet, SE, MM, PhD., Pembimbing (II) Dr. Siswanto, M.Si.

Kata Kunci: Gini Rasio, PDRB perkapita, Tingkat Kemiskinan, Jumlah Penduduk, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

Masalah distribusi pendapatan ini tidak hanya terjadi di tingkat nasional saja, tetapi juga di setiap daerah. Keberhasilan pembangunan daerah menjadi landasan yang baik bagi keberhasilan pembangunan nasional. Hal ini karena pembangunan nasional tidak terlepas dari kinerja pembangunan daerah. Keberhasilan pembangunan daerah dapat memberikan korelasi yang cukup besar pada peningkatan hasil pembangunan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh PDRB perkapita, tingkat kemiskinan, jumlah penduduk, tingkat pengangguran terbuka (TPT) terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2011-2017.

Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan data sekunder data. Analisis yang dipakai adalah analisis tipologi Klassen untuk mengetahui kondisi ketimpangan distribusi pendapatan di setiap kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat, selain itu untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen digunakan analisis regresi data panel dengan *fixed effect model* (FEM).

Hasil penelitian dengan analisis regresi data panel dengan uji simultan semua variabel pada model fixed effect ditemukan bahwa PDRB perkapita, tingkat kemiskinan, jumlah penduduk dan tingkat pengangguran terbuka mempunyai pengaruh signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan (yang diwakili oleh gini rasio) di Sumatera Barat selama tahun 2011 sampai tahun 2017. Dengan uji parsial didapatkan bahwa PDRB perkapita dan jumlah penduduk mempunyai berpengaruh positif (pengaruh variabel berbanding lurus) dan tidak signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Namun tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka berpengaruh negatif (pengaruh variabel berbanding terbalik) dan tidak signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.

ABSTRACT

Miftahurrahmah, 17800004, 2019, The Effect of GDP Per Capita, Poverty Rate, Population and Unemployment Rate on Inequality of Income Distribution in West Sumatra During 2011-2017, Thesis, Postgraduate Sharia Economics, Malang State Islamic University, Adviser : Slamet, SE, MM, PhD & Dr. Siswanto, M.Si.

Keywords: Gini Ratio, GDP Per Capita, Poverty Rate, Population, Unemployment Rate.

The problem of income distribution does not only occur at the national level, but also in every region. The success of regional development is a good foundation for the success of national development. Because of national development is inseparable from the successful regional development. The success of regional development can give correlation to increasing national development outcomes. The purpose of this research were to understand the effect of GDP per capita, poverty rate, population and unemployment rate on inequality of income distribution in West Sumatra during 2011-2017.

The study used quantitative research with secondary data. The analysis used is Klassen's typology analysis to determine the condition of income distribution inequality in each regency / city in West Sumatra Province, in addition to knowing the effect of each independent variable on the dependent variables panel regression analysis is used with the fixed effect model (FEM).

The results of the study with panel data regression analysis with simultaneous test of all variables in the fixed effect model found that GRDP per capita, poverty rate, population and open unemployment have a significant influence on inequality of income distribution (represented by the gini ratio) in West Sumatra during the year 2011 to 2017. With a partial test it was found that GRDP per capita and population had a positive effect (the influence of variables is directly proportional) and not significant to the inequality of income distribution. However, the poverty rate and the level of open unemployment have a negative effect (the effect of variables is inversely proportional) and not significant to the inequality of income distribution.

مستخلص البحث

مفتاح الرحمة، ١٧٨٠٠٠٤، ٢٠١٩، تأثير نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، مستوى الفقر، عدد السكان ومستوى البطالة المفتوحة على عدم المساواة في توزيع الدخل في سومطرة الغربية منذ سنة ٢٠١١-٢٠١٧، رسالة الماجستير، قسم اقتصاد الشريعة، كلية الدراسات العليا، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانغ.

المشرف الأول: د. سلامة الماجستير، المشرف الثاني: د. سسوانطا الماجستير

الكلمات الرئيسية: نسبة جيني، نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي، مستوى الفقر، عدد السكان، مستوى البطالة المفتوحة (TPT).

لا تحدث مشكلة توزيع الدخل فقط على المستوى الوطني، ولكن أيضًا في كل منطقة. نجاح تنمية المنطقة هو أساس جيد لنجاح التنمية الوطنية. وذلك لأن التنمية الوطنية لا يمكن فصلها عن أداء تنمية المنطقة. يمكن أن يوفر نجاح التنمية المنطقة ارتباطاً كبيراً بزيادة نتائج التنمية الوطنية. يهدف هذا البحث إلى كشف وتحليل تأثير نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، ومستوى الفقر، وعدد السكان، ومستوى البطالة المفتوحة (TPT) على عدم المساواة في توزيع الدخل في سومطرة الغربية منذ سنة ٢٠١١-٢٠١٧.

تستخدم طريقة البحث هذه الأساليب الكمية مع البيانات الثانوية. التحليل المستخدم هو تحليل تصنيف كلاسن لتحديد حالة عدم المساواة في توزيع الدخل في كل منطقة / مدينة في مقاطعة سومطرة الغربية ، بالإضافة إلى معرفة تأثير كل متغير مستقل على تحليل انحدار لوحة متغير متغير يستخدم مع نموذج التأثير الثابت (FEM).

أظهرت نتائج الدراسة مع تحليل انحدار بيانات اللوحة مع اختبار متزامن لجميع المتغيرات في نموذج التأثير الثابت أن نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي ومعدل الفقر والسكان والبطالة المفتوحة لها تأثير كبير على عدم المساواة في توزيع الدخل (مثلة بنسبة الجيني) في غرب سومطرة خلال العام من عام ٢٠١١ إلى عام ٢٠١٧. مع اختبار جزئي ، وجد أن نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي للسكان والسكان كان له تأثير إيجابي (تأثير المتغيرات يتناسب طرديًا) وليس مهمًا لعدم المساواة في توزيع الدخل. ومع ذلك ، فإن معدل الفقر ومستوى البطالة المفتوحة لهما تأثير سلبي (تأثير المتغيرات يتناسب تناسبا عكسيا) وليس كبيرا بالنسبة لعدم المساواة في توزيع الدخل

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	ii
PERSETUJUAN UJIAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
ORISINALITAS	v
MOTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	13
E. Ruang Lingkup Penelitian	13
F. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Konsep distribusi Pendapatan	18
1. Definisi Distribusi Pendapatan	18
2. Ketimpangan Distribusi Pendapatan	22
3. Metode Pengukuran Ketimpangan Distribusi Pendapatan ...	26
4. Distribusi Pendapatan Dalam Perspektif Islam	35
5. Faktor Determinan Ketimpangan Distribusi Pendapatan	39
B. Hubungan Variabel Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan	47
1. Hubungan PDRB Perkapita Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan	48
2. Hubungan Tingkat Kemiskinan Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan	46
3. Hubungan Jumlah Penduduk Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan	49
4. Hubungan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan	51
C. Hipotesis Penelitian	51
D. Kerangka Berpikir	51

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian.....	53
B. Variabel Penelitian	54
C. Jenis Data dan Sumber Data	55
D. Teknik Pengumpulan Data	56
E. Analisis Data	56
1. Pemilihan Model Regresi Data Panel.....	60
2. Pengujian Asumsi Klasik.....	63
3. Pengujian Hipotesis	66

BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Latar Penelitian.....	69
B. Paparan Data Penelitian	70
1. PDRB Perkapita	70
2. Tingkat Kemiskinan	72
3. Pertumbuhan Jumlah Penduduk	74
4. Tingkat Pengangguran Terbuka	76
5. Ketimpangan Distribusi Pendapatan (Gini Rasio)	77
C. Analisis Data.....	79
1. Pemilihan Model Regresi Data Panel.....	79
2. Hasil Pengujian Asumsi Klasik.....	83
3. Hasil Pengujian Hipotesis	87

BAB V PEMBAHASAN

A. Analisis Tipologi Klassen.....	92
B. Analisis Variabel Penelitian	100
1. Pengaruh PDRB perkapita terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan	100
2. Pengaruh Tingkat Kemiskinan terhadap Ketimpangan Distribusi pendapatan	103
3. Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Ketimpangan Distribusi pendapatan	107
4. Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Ketimpangan Distribusi pendapatan.....	111

BAB VI PENUTUP

A. Simpulan.....	115
B. Saran	116

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Gini Rasio Kabupaten/Kota di Sumatera Barat 2013-2017	5
Tabel 1.2	Pertumbuhan Penduduk Sumatera Barat 2011-2017	9
Tabel 1.3	Penelitian Terdahulu	14
Tabel 2.1	Matrik Klasifikasi Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Menurut Tipologi Klasen.....	35
Tabel 3.1	Variabel-Variabel Penelitian	54
Tabel 4.1	PDRB Perkapita Sumatera Barat 2011-2017.....	71
Tabel 4.2	Jumlah Penduduk Miskin Sumatera Barat 2011-2017.....	73
Tabel 4.3	Jumlah Penduduk Sumatera Barat 2011-2017.....	75
Tabel 4.4	Tingkat Pengangguran Terbuka Sumatera Barat 2011-2017	76
Tabel 4.5	Gini Rasio Sumatera Barat 2011-2017.....	78
Tabel 4.6	Hasil Uji Chow	80
Tabel 4.7	Hasil Uji Hausman	81
Tabel 4.8	Hasil Regresi Fixed Effect Model.....	82
Tabel 4.9	Hasil Uji Multikolinieritas.....	85
Tabel 4.10	Hasil Uji Multikolinieritas dengan Matriks Korelasi.....	85
Tabel 4.11	Uji Heteroskedastisitas Metode White	86
Tabel 4.12	Uji Autokorelasi Metode LM	87
Tabel 4.13	Hasil Uji Simultan.....	88
Tabel 4.14	Hasil Uji Parsial	90
Tabel 5.1	Laju PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Kabupaten/Kota DI Provinsi Sumatera Barat 2011-2017	93
Tabel 5.2	PDRB Perkapita Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat 2011-2017.....	93
Tabel 5.3	Pengelompokan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Menurut Tipologi Klassen 2011-2017.....	94
Tabel 5.4	Tipologi Klassen Berdasarkan Sektoral	96
Tabel 5.5	PDRB Menurut Lapangan Usaha 2012-2017	97
Tabel 5.6	Tipologi Klassen Menurut Sektor Di Provinsi Sumatera Barat....	98

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Perkembangan Gini Rasio Sumatera Barat 2010-2018	6
Gambar 2.2	Kurva Lorenz	28
Gambar 2.3	Kerangka Berpikir	52
Gambar 4.1	Hasil Uji Normalitas	84



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan dari pembangunan ekonomi. Oleh sebab itu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat diperlukan pertumbuhan ekonomi yang baik dan distribusi pendapatan yang merata tanpa adanya disparitas (ketimpangan). Selain untuk mensejahterakan masyarakat, terdapat tujuan lain dari pembangunan ekonomi yaitu mengejar ketertinggalan serta mensejajarkan setiap daerah di suatu wilayah yang sudah maju. Ada beberapa faktor yang menjadi tolak ukur keberhasilan pembangunan ekonomi diantaranya pertumbuhan ekonomi dan disparitas pendapatan antar penduduk.¹

Negara-negara sedang berkembang tanpa kecuali Indonesia masih beranggapan bahwa angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi, baik di tingkat nasional maupun daerah menjadi tolak ukur keberhasilan pembangunan. Namun pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada tahap awal menyebabkan memburuknya ketimpangan pembagian pendapatan.² Kondisi ini sesuai dengan kenyataan empiris di negara-negara sedang berkembang yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang pesat pada umumnya disertai dengan pembagian pendapatan yang makin timpang. Pernyataan di atas menunjukkan bahwa hasil pembangunan ekonomi yang tinggi ternyata belum menciptakan pendistribusian pendapatan yang merata, sehingga kondisi ini seolah-olah hanya memberikan manfaat bagi segolongan kecil masyarakat yang memiliki akses kekuasaan politik dan ekonomi. Hal ini sejalan dengan hasil-

¹ Todaro, *Ekonomi Pembangunan*, (Jakarta: Erlangga, 2006), 213.

² Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith, *Pembangunan Ekonomi*, (Jakarta : Erlangga, 2011), 278.

hasil penelitian mengenai hubungan jangka panjang antara pertumbuhan ekonomi dengan pembagian pendapatan seperti yang dirintis oleh Simon Kuznets yang lazimnya disebut dengan Hipotesis Kuznets. Kuznets mengamati hubungan antara pertumbuhan dan distribusi pendapatan yang digambarkan dalam suatu kurva berbentuk “U terbalik”. Negara yang sedang berkembang pada tahap awal pembangunan cenderung mengalami ketimpangan pembagian pendapatan yang makin memburuk, kemudian ketimpangan tersebut akan berkurang pada tahap pembangunan selanjutnya.³

Ketimpangan yang besar dalam distribusi pendapatan (kesenjangan ekonomi) dan tingkat kemiskinan merupakan dua masalah besar yang banyak ditemukan di beberapa negara berkembang, termasuk Indonesia.⁴ Sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia telah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan lebih dari setengah dari angka di tahun 1999. Pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini menduduki urutan ketiga tercepat di antara negara-negara anggota G-20. Statistik terbaru menunjukkan bahwa sejak tahun 2000 hingga tahun 2017, Produk Domestik Bruto Indonesia (PDB) per kapita meningkat rata-rata 4 persen setiap tahun, setelah China dan India, yang masing-masing tumbuh 9 persen dan 5,5 persen per tahun. Namun, pertumbuhan ekonomi Indonesia memicu tingginya ketimpangan antar penduduk. Hal ini tercermin dalam Indeks Gini, yakni indeks untuk mengukur ketimpangan dalam sebuah negara dari 0 (kesetaraan sempurna) sampai 100 (ketidaksetaraan sempurna). Data dari Bank Dunia mengungkapkan Indeks Gini Indonesia meningkat dari 30,0 pada dekade tahun 1990-an menjadi 39,0 pada tahun

³Hasibuan, N, *Pemerataan Pembangunan Ekonomi*, (Pelemang: Universitas Sriwijaya (UNSRI), 2003), 206.

⁴Tulus Tambunan, *Perekonomian Indonesia: Teori dan Temuan Empiris*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001), 118.

2017.⁵ Kondisi ini sesuai dengan kenyataan empiris di negara-negara sedang berkembang yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang pesat pada umumnya disertai dengan pembagian pendapatan yang makin timpang.⁶

Pembangunan ekonomi yang dilaksanakan oleh setiap negara di dunia ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di negara tersebut, yang salah satu indikatornya adalah Pendapatan Nasional per kapita (GNP/*Gross National Product*, per kapita). Namun demikian pertumbuhan GNP per kapita yang cepat tidak secara otomatis menambah atau memperbaiki tingkat hidup rakyat banyak. GNP saja tidak cukup menjadi indikator satu-satunya untuk kemajuan pembangunan, tetapi yang lebih penting bagaimana hasil pembangunan tersebut dapat dinikmati oleh segenap penduduk di negara tersebut. Dengan kata lain, bagaimana distribusi pendapatan atau GNP tersebut bagi semua penduduk. Pemerataan pendapatan bermakna hasil pembangunan telah dapat dinikmati oleh semua penduduk, termasuk yang berada pada lapisan paling bawah. Dalam membahas pemerataan distribusi pendapatan terdiri dari dua aspek. Aspek *pertama* adalah bagaimana menaikkan tingkat kesejahteraan mereka yang masih berada di bawah garis kemiskinan, sedang aspek *kedua* adalah pemerataan pendapatan secara menyeluruh dalam arti mempersempit perbedaan tingkat pendapatan antar penduduk atau rumah tangga. Keberhasilan mengatasi aspek yang pertama dapat dilihat dari penurunan persentase penduduk yang masih berada di bawah garis kemiskinan. Sementara keberhasilan memperbaiki distribusi pendapatan secara menyeluruh, adalah jika laju pertumbuhan

⁵Yenny Tjoe, "Seberapa Parah Ketimpangan Ekonomi di Indonesia?" , <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/08/31/100200826/seberapa-parah-ketimpangan-ekonomi-di-indonesia->, diakses tanggal 12 Januari 2019.

⁶Thee Kian Wie, *Pembangunan Ekonomi dan Pemerataan*, (Jakarta:LP3ES, 1981), 2.

pendapatan golongan miskin lebih besar dari laju pertumbuhan pendapatan golongan kaya.⁷

Masalah distribusi pendapatan ini tidak hanya terjadi di tingkat nasional saja, tetapi juga di setiap daerah. Keberhasilan pembangunan daerah menjadi landasan yang baik bagi keberhasilan pembangunan nasional. Hal ini karena pembangunan nasional tidak terlepas dari kinerja pembangunan daerah. Keberhasilan pembangunan daerah dapat memberikan korelasi yang cukup besar pada peningkatan hasil pembangunan nasional.⁸

Ketimpangan pendapatan antar wilayah menjadi fenomena penting yang masih terus perlu dikaji dan dianalisis karena sangat menentukan kebijakan yang dapat diambil pemerintah agar lebih terarah, serta berjalan dengan efektif dan efisien, di bawah kendala keterbatasan anggaran dan sumberdaya yang dapat digunakan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya ketimpangan pendapatan antar wilayah yang terjadi di Sumatera Barat.

Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia dengan jumlah penduduk 5.382.100 jiwa serta memiliki visi “Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera”, tidak terlepas dari masalah ekonomi khususnya masalah ketimpangan distribusi pendapatan. Walaupun laju pertumbuhan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) perkapita Sumatera Barat selama lima tahun terakhir rata-rata sekitar Rp 43.268 lebih tinggi dibandingkan laju pertumbuhan PDRB perkapita

⁷ Lulus Prapati NSS, *Keterkaitan Anatara Pertumbuhan Ekonomi Dan Distribusi Pendapatan (Studi Kasus 35 Kabupaten/ Kota Jawa Tengah 2000-2004, Thesis*, (Semarang: UNDIP, 2006), 2.

⁸ Rosti Maidar & Muhammad Nasir, “Analisis Tingkat Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten Di Provinsi Aceh Periode 2002-2015”, *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik Indonesia*, 4 (Mei, 2017), 24.

secara nasional yang hanya rata –rata sekitar Rp 39.946.⁹ Namun tingkat laju pertumbuhan PDRB perkapita yang tinggi ini tidak diikuti dengan pemerataan gini rasio di Kota/ Kabupaten di Sumatera Barat. Gini rasio adalah satu metode untuk mengukur pemerataan pendapatan yang menunjukkan ketimpangan dihitung berdasarkan kelas pendapatan. Nilai gini ratio berkisar antara 0 dan 1. Semakin tinggi/mendekati angka satu nilai gini rasio suatu daerah, menunjukkan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Ketimpangan distribusi pendapatan yang terjadi di Kota/ Kabupaten di Sumatera Barat dapat dilihat dari tabel 1.1

Tabel 1.1
Gini Rasio Kabupaten/Kota di Sumatera Barat 2013-2017

Kab/Kota	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Kep.Mentawai	0.33	0.31	0.28	0.31	0.32
Pesisir Selatan	0.26	0.29	0.28	0.27	0.3
Solok	0.28	0.25	0.29	0.31	0.29
Sijunjung	0.29	0.32	0.29	0.33	0.33
Tanah Datar	0.3	0.26	0.33	0.3	0.26
Padang Pariaman	0.28	0.29	0.3	0.26	0.28
Agam	0.27	0.27	0.31	0.29	0.28
Lima Puluh Kota	0.23	0.24	0.33	0.27	0.26
Pasaman	0.29	0.26	0.3	0.3	0.26
Solok Selatan	0.32	0.29	0.38	0.31	0.3
Dharmasraya	0.34	0.32	0.36	0.3	0.25
Pasaman Barat	0.26	0.26	0.29	0.31	0.29
Padang	0.37	0.33	0.35	0.35	0.34
Kota Solok	0.32	0.3	0.34	0.34	0.3
Sawahlunto	0.3	0.35	0.33	0.32	0.3
Padang Panjang	0.29	0.37	0.37	0.38	0.3
Bukittinggi	0.37	0.34	0.34	0.33	0.31

⁹ BPS, *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi-Provinsi Di Indonesia Menurut Lapangan Usaha*, (Jakarta :BPS, 2018), 23.

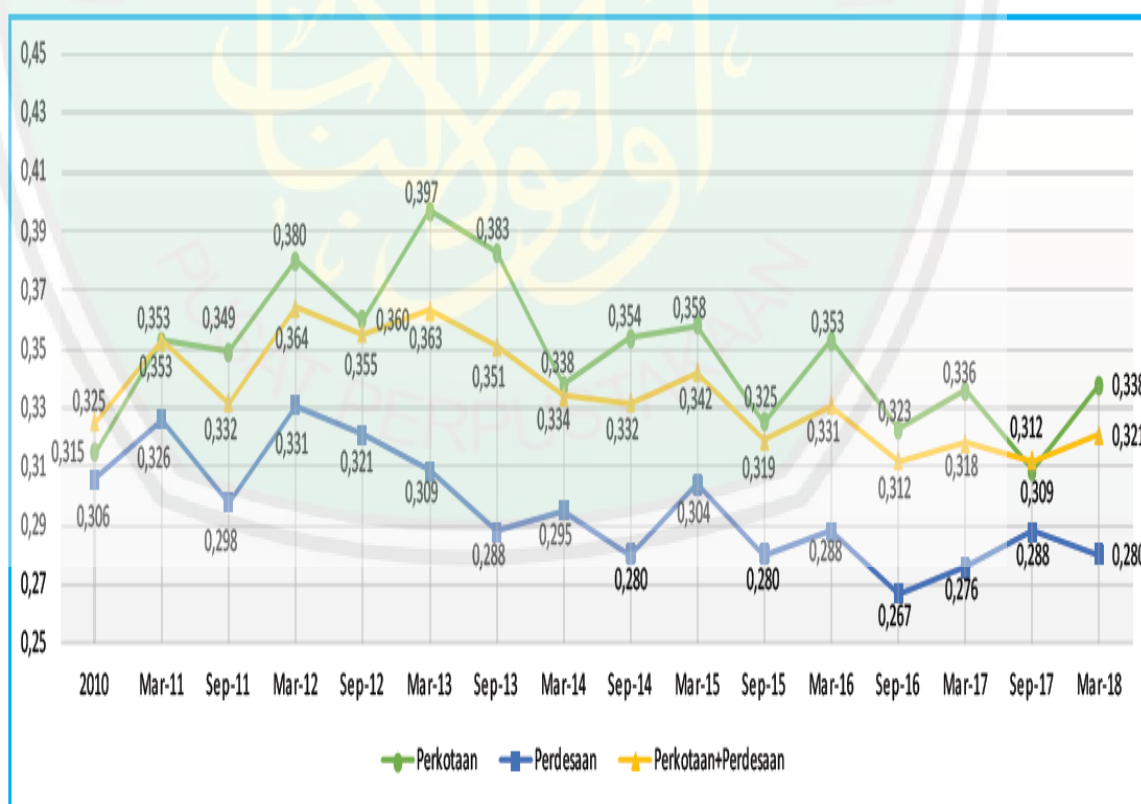
Payakumbuh	0.4	0.31	0.37	0.34	0.3
Pariaman	0.4	0.3	0.33	0.34	0.3

Sumber: BPS Sumatera Barat, data diolah

Berdasarkan gambar di atas terlihat perbedaan gini rasio Kabupaten/Kota di provinsi Sumatera Barat selama lima tahun terakhir. Kota-kota yang mempunyai nilai rata-rata gini rasio tertinggi yaitu Kota Padang, Kota Pariaman, Kota Padang Panjang dan Kota Payakumbuh, penyebab keempat kota ini mempunyai nilai gini rasio tinggi yaitu berdasarkan tempat tinggal gini rasio di kota lebih tinggi nilainya di bandingkan di desa. Gambar berikut menjelaskan perkembangan gini rasio kota dan desa di Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2010 sampai tahun 2018.

Gambar 1.1

Perkembangan Gini Rasio Sumatera Barat, 2010-2018



Sumber: BPS Sumatera Barat, data diolah

Berbasarkan gambar di atas terlihat pada tahun 2010 gini rasio perkotaan tercatat sebesar 0,315 dan angka ini berfluktuasi terus hingga Maret 2018 yang menunjuk pada angka 0,338. Sedangkan pada tahun yang sama 2010 gini rasio pedesaan tercatat hanya sebesar 0,306.¹⁰ Hal ini menunjukkan tingkat ketimpangan di area perkotaan selalu di atas area pedesaan. Pada Maret 2018 Gini Ratio perkotaan adalah 0,338 naik 0,028 poin dibandingkan periode September 2017 (0,309) dan naik tipis 0,002 poin dibandingkan periode setahun sebelumnya (0,336). Pada wilayah pedesaan nilai Gini Ratio walaupun secara umum menunjukkan tren penurunan, tetapi dalam kurun satu tahun terakhir mengalami sedikit kenaikan. Maret 2018 menunjukkan angka 0,280 yang merupakan peningkatan 0,004 poin dibanding Maret 2017 (0,276). Akan tetapi penurunan terjadi penurunan sebesar 0,007 poin, dari September 2017 yang tercatat sebesar 0,288.

Salah satu indikator tingkat kesejahteraan penduduk suatu wilayah adalah angka PDRB per kapita. PDRB adalah nilai bersih barang dan jasa-jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode.¹¹ Sedangkan PDRB perkapita sering digunakan sebagai indikator pembangunan. Semakin tinggi PDRB perkapita suatu daerah maka semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut dikarenakan semakin besar pendapatan masyarakat daerah tersebut.¹² Hal ini berarti juga bahwa semakin tinggi PDRB perkapita semakin sejahtera penduduk suatu wilayah. Dengan kata lain, jika

¹⁰Berita Resmi Statistik, *Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Sumatera Barat Maret 2018*, 2. <https://sumbar.bps.go.id/pressrelease/2018/07/16/670/gini-ratio-penduduk-sumatera-barat-maret-2018-tercatat-sebesar-0-321.html>, diakses Tanggal 8 Februari 2019.

¹¹ Sasana Hadi, Peran Desentralisasi Fiskal Terhadap Kinerja Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ekonomi Pembangunan* Volume 10, Nomor 1. Universitas Diponegoro, 2009, 105.

¹² Nita Tri Hartini, Pengaruh PDRB Per Kapita, Investasi Dan IPM Terhadap Ketimpangan Pendapatan Antar Daerah Di Provinsi DIY Tahun 2011-2015, *Jurnal Pendidikan Dan Ekonomi*, Vol.6, No. 6, 2017, 531.

pendapatan tinggi dan merata antar daerah maka ketimpangan pendapatan berkurang. Di provinsi Sumatera Barat Kota Padang memiliki PDRB perkapita (rata-rata Rp 41.000)¹³ yang paling tinggi diantara kabupaten/ kota lain, karena wilayah ini merupakan pusat kegiatan berbagai bidang ekonomi dan memilikibanyak faktor produksi.

Disamping itu, kemiskinan dapat mempengaruhi tingkat pendapatan rata-rata dan ketimpangan pendapatan. Banyak atau sedikitnya penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh garis kemiskinan. Semakin tinggi garis kemiskinan maka penduduk miskin akan semakin banyak dan sebaliknya.¹⁴ Sumatera Barat menjadi salah satu provinsi yang mengalami penurunan angka kemiskinan. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Sumatera Barat menurun sebanyak 2.860 orang. Dari sebelumnya 359.990 orang pada September 2017, saat ini jumlah penduduk miskin di Sumatera Barat menjadi 357.130 orang pada Maret 2018. Dengan persentase awal sebesar 6,75 persen turun menjadi 6,65 persen dari total jumlah penduduk.¹⁵ Persentase angka kemiskinan ini masuk kedalam 10 provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah di Indonesia. Meskipun kemiskinan Sumatera Barat berada pada 6.65 persen, namun jika dilihat berdasarkan ketimpangan pendapatan (Indeks Gini Ratio) di Provinsi Sumatera Barat masih dikategorikan cukup tinggi.

Pertambahan penduduk juga faktor yang mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan.¹⁶ Pertumbuhan penduduk berasal dari angka kelahiran,

¹³ BPS Sumatera Barat, <https://sumbar.bps.go.id>

¹⁴ I Maipita, *Mengukur Kemiskinan dan Distribusi Pendapatan*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014), 34.

¹⁵ Budi Warsito, "Kemiskinan di Sumbar Berkurang Ekonomi Makin Timpang", <https://www.jawapos.com/jpg-today/17/07/2018/kemiskinan-di-sumbar-berkurang-ekonomi-makin-timpang>, diakses tanggal 21 Desember 2018.

¹⁶ Simon Fulgsang, *Determinants of Income Inequality : Sub-Saharan Perspective*, Thesis. Aarhus University, 2013.

kematian dan migrasi penduduk. Migrasi penduduk ke dalam akan menyebabkan ketimpangan akibat menurunnya pendapatan per kapita. Hal ini terjadi apabila penambahan jumlah penduduk tidak diimbangi dengan penambahan aktivitas ekonomi. Meningkatnya angka kelahiran, selain mengurangi pendapatan per kapita juga akan menambah angka rasio ketergantungan penduduk. Hal ini disebabkan adanya penambahan usia non-produktif. Berikut ini akan di sajikan data jumlah penduduk Sumatera Barat dari tahun 2011 sampai tahun 2017.

Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Sumatera Barat, 2011-2017.

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)
2011	4.933.112
2012	5.000.184
2013	5.066.476
2014	5.131.882
2015	5.200.947
2016	5.272.525
2017	5.343.836

Sumber : BPS Sumatera Barat, data diolah

Tabel diatas menampilkan jumlah penduduk di Provinsi Sumatera Barat yang selalu meningkat setiap tahun. Yang rata-rata memiliki pertumbuhan sebesar 100 ribu jiwa setiap tahunnya.

Tingginya tingkat pengangguran terbuka (TPT) juga meyebabkan semakin tingginya ketimpangan distribusi pendapatan. Menurut Rosa dan Sovita (2016) adanya tingkat pengangguran di suatu wilayah mengindikasi kondisi ketenagakerjaan, tingkat pengangguran yang tinggi menandakan adanya faktor produksi yang masih

belum digunakan secara maksimal untuk menunjang pembangunan serta kesejahteraan masyarakat.¹⁷ Jumlah pengangguran di Sumatera Barat secara persentase mengalami penurunan, namun secara jumlah, pengangguran justru meningkat hampir tiga ribu orang dari 138,7 ribu orang menjadi 141,68 ribu orang pada 2017. Hal ini terjadi karena dalam periode yang sama juga terjadi peningkatan jumlah angkatan kerja yang cukup tinggi sebagai pembagi dalam penghitungan persentase TPT.

Ada beberapa peneliti sebelumnya yang mengangkat permasalahan ketimpangan distribusi pendapatan. Seperti halnya yang dijelaskan dalam penelitian terdahulu oleh Hartini (2017) yang menemukan pengaruh PDRB Perkapita yang positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.¹⁸ Disamping itu Rahma (2018), juga meneliti pengaruh PDRB Perkapita terhadap ketimpangan distribusi pendapatan dengan hasil positif dan signifikan.¹⁹ Kemudian didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Gazali menggunakan alat analisis regresi data panel (2019) yang menemukan hasil bahwa PDRB per kapita harga konstan dan tingkat kemiskinan berpengaruh namun tidak signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan antarkabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan.²⁰

Penelitian tentang pertumbuhan jumlah penduduk yang mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan dilakukan oleh Musafir dengan alat analisis regresi berganda (2012) yang menemukan hasil Populasi penduduk di Sulawesi

¹⁷Yani Del Rosa dan Ingra Sovita, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Pulau Jawa, *Jurnal Menara Ekonomi*, Vol.II No. 4,(2016).

¹⁸ Nita Tri Hartini, *Pengaruh PDRB Per Kapita, Investasi Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Ketimpangan Pendapatan Antar Daerah Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011-2015*, (Yogyakarta: Uny, 2017).

¹⁹Ellza Alfya Rahma, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan Antar Provinsi Di Pulau Jawa Tahun 2010-2016*, (Yogya Karta : UII , 2018).

²⁰M.Iqbal Gazali, *Analisis Faktor Determinan Ketimpangan Distribusi Pendapatan Antarkabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2017*, (Yogyakarta : UGM, 2019)

Selatan yang berumur produktif usia 15 hingga 55 tahun pada penelitian ini menunjukkan pengaruh langsung positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Sulawesi Selatan dan berpengaruh secara positif namun tidak signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan melalui pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan.²¹ Selain itu Bantika (2015) juga melakukan penelitian tentang penambahan jumlah penduduk terhadap ketimpangan distribusi pendapatan dengan menggunakan alat analisis regresi berganda sehingga menemukan bahwa jumlah penduduk memiliki nilai signifikansi sebesar 0,008 sehingga pada 0,008 jumlah penduduk memberikan pengaruh yang nyata terhadap indeks gini di Sulawesi Utara.²²

Penelitian tentang pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap disparitas distribusi pendapatan dikaukan oleh Rahman dan Samsir (2018) dengan hasil regresi diperoleh hasil bahwa tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif dan signifikan terhadap Disparitas pendapatan di Provinsi Sulawesi Selatan. Ini ditunjukkan dengan nilai probabilitas sebesar 0.056 lebih kecil dari alpha 10%.²³

Berangkat dari uraian latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh PDRB Perkapita, Tingkat Kemiskinan, Jumlah Penduduk dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Sumatera Barat Selama Tahun 2011-2017 ”**

²¹Ma'mun Musfidar, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Sulawesi Selatan Tahun 2001-2010*, (Makassar: UNHAS , 2012).

²²Vredrich Bantika, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Sulawesi Utara, *Jurnal Cocos*, Vol.6 No.17, (2015) .

²³Andi Samsir & Abdul Rahman, Menelusur Ketimpangan Distribusi Pendapatan Kabupaten dan Kota, *Jurnal EcceS*, Vol. 5 No. 1 (Juni, 2018).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah PDRB Perkapita berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Sumatera Barat selama tahun 2011-2017?
2. Apakah Tingkat Kemiskinan berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Sumatera Barat selama tahun 2011-2017?
3. Apakah Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Sumatera Barat selama tahun 2011-2017?
4. Apakah Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Sumatera Barat selama tahun 2011-2017?

C. Tujuan penelitian

Sesuai dengan permasalahan penelitian yang telah dikemukakan di atas, tujuan penelitian yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui serta menganalisa pengaruh PDRB Perkapita terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Sumatera Barat selama tahun 2011-2017.
2. Mengetahui serta menganalisa pengaruh Tingkat Kemiskinan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Sumatera Barat selama tahun 2011-2017.
3. Mengetahui serta menganalisa pengaruh Jumlah Penduduk terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Sumatera Barat selama tahun 2011-2017.
4. Mengetahui serta menganalisa Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Sumatera Barat selama tahun 2011-2017.

D. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat sebagai berikut:

1. Sebagai bahan kajian peneliti lainya perihal analisis faktor-faktor mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan di Sumatera Barat terkait teori dan kenyataan di lapangan.
2. Menambah pengetahuan mengenai kajian ekonomi khususnya tentang ketimpangan distribusi pendapatan di Sumatera Barat.
3. Sebagai bahan informasi, pertimbangan sekaligus evaluasi bagi para pengambil kebijakan dalam menentukan arah dan strategi kebijakan pembangunan di masa depan.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian maka akan dibahas dalam ruang lingkup mendeskripsikan dan menjabarkan faktor-faktor saja yang berpengaruh pada ketimpangan distribusi pendapatan di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera. Faktor-faktor tersebut antara lain: PDRB Perkapita, Tingkat Kemiskinan, Pertumbuhan Jumlah Penduduk dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Penelitian dilakukan terhadap 19 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat ,dengan objek tahun penelitian dari tahun 2011-2017.

F. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian

Penelitian atau studi yang membahas tentang ketimpangan distribusi pendapatan telah dilakukan diantaranya sebagai berikut:

Tabel 1.3
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti, Judul dan Tahun	Tujuan	Hasil
1.	Mia Apriyani, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat (2013-2017), 2019	Menganalisis pengaruh PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) dan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) terhadap ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2013-2017.	PDRB berpengaruh negatif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2013-2017 dan IPM berpengaruh positif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2013-2017.
2.	Fanisa Arifka, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Sumatera Barat (2010-2016), 2018.	Menganalisis ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/kota di Sumatera Barat tahun 2010 hingga 2016 dan Menganalisis pengaruh dari PDRB perkapita, angka melek huruf dan tingkat pengangguran terbuka terhadap ketimpangan distribusi pendapatan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat tahun 2010 hingga 2016.	PDRB perkapita dan tingkat pengangguran terbuka memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Sumatera Barat. Sedangkan angka melek huruf berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Sumatera Barat.
3.	Candra Susilo Sutrisno, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah (2010-2015), 2018.	Menganalisis pengaruh inflasi, indeks pembangunan manusia, jumlah angkatan kerja (bekerja) dan pendapatan asli daerah terhadap tingkat ketimpangan distribusi pendapatan antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2015	Indeks pembangunan manusia dan pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan antar Kabupaten/Kota di provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2015. Sedangkan inflasi dan jumlah angkatan kerja tidak berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan antar

			Kabupaten/Kota di provinsi Jawa Tengah tahun 2010- 2015
4.	Anggiat Mugabe Damanik, dkk, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan Melalui Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jambi, 2018.	Menganalisis pengaruh secara langsung maupun tidak langsung jumlah penduduk yang bekerja dan investasi terhadap ketimpangan pendapatan melalui pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi.	Jumlah penduduk yang bekerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, sedangkan investasi dan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan.
5.	Mochamad Faisal Rinjani, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Indonesia tahun 2010-2016, 2018	Menganalisis pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), PDRB Per Kapita, PMDN, dan PMA terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia periode tahun 2010-2016	Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka, berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan, dan PDRB per kapita, PMDN, dan PMA berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Sedangkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tidak berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia periode tahun 2010- 2016
6.	Anis Tunas Syilviaran, Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Pulau Jawa tahun (2010-2015), 2017.	Menganalisis pengaruh Inflasi, IPM, PDRB, Tingkat Pengangguran, UMR (Upah Minimum Regional) terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Pulau Jawa .	Inflasi, IPM, PDRB, Tingkat Pengangguran, dan UMR memiliki pengaruh signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan tahun 2010-2015 di Pulau Jawa
7.	Del Anggina, Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pertumbuhan Penduduk, Pertumbuhan Investasi, dan Indeks Pembangunan Manusia	Menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan penduduk, pertumbuhan investasi, dan indeks pembangunan manusia	Pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan penduduk tidak berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Kabupaten/Kota Daerah

	Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007-2014, 2017.	terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di daerah istimewa yogyakarta tahun 2007-2014, 2017	Istimewa Yogyakarta. Pertumbuhan investasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta.
8.	Vredrich Bantika, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Sulawesi Utara, 2015.	Menganalisis jumlah penduduk, luas lahan pertanian dan pertumbuhan ekonomi mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Sulawesi Utara	Pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk memberikan pengaruh yang signifikan terhadap indeks gini sedangkan luas lahan pertanian tidak berpengaruh secara signifikan.
9.	Putri Irina Mayang Sari, Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Sumatera Barat Dan Faktor-Faktor Yang Memengaruhi, 2014.	Menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan di Sumatera Barat	Pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah untuk belanja pegawai dan gempa bumi terbukti memperburuk terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan, sedangkan <i>share</i> sektor industri terhadap PDRB, tenaga kerja sektor industri, pengeluaran pemerintah untuk belanja non pegawai dan pertumbuhan penduduk dapat mengurangi terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan di Sumatera Barat

Pada penelitian sebelumnya variabel yang digunakan untuk menganalisa ketimpangan distribusi pendapatan di Sumatera Barat adalah PDRB perkapita, jumlah penduduk dan tingkat pengangguran terbuka. Sedangkan penelitian ini akan menambahkan variabel tingkat kemiskinan untuk menganalisa ketimpangan distribusi pendapatan Kota/ Kabupaten yang terjadi di Provinsi Sumatera Barat dengan menggunakan data dari tahun 2011 sampai tahun 2017. Selain menggunakan analisis regresi data panel seperti penelitian sebelumnya, penelitian ini menggunakan analisis tipologi kelas untuk memperjelas ketimpangan distribusi pendapatan yang terjadi pada setiap kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Kebaharuan penelitian ini adalah adanya penggunaan analisis tipologi kelas.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Distribusi Pendapatan

Pembahasan tentang distribusi pendapatan sangat erat kaitanya dengan hak-hak individu dalam suatu masyarakat. Distribusi pendapatan merupakan bagian penting dalam membentuk kesejahteraan suatu negara atau daerah. Tujuan distribusi pendapatan adalah keadilan dan kesejahteraan dalam setiap lini perekonomian. Ketidakmerataan distribusi pendapatan dapat berdampak pada aspek ekonomi dan sosial-politik.

1. Definisi Distribusi Pendapatan

Distribusi pendapatan adalah suatu ukuran yang digunakan untuk melihat berapa pembagian dari pendapatan nasional yang diterima masyarakat. Dari perhitungan ini akan dapat dilihat porsi pendapatan nasional yang dikuasai oleh berapa persen dari penduduk. Gunanya untuk melihat seberapa besar penguasaan pendapatan nasional tersebut sehingga dapat diketahui apakah ada pendapatan nasional oleh segelintir orang atau terjadi pemerataan diantara penduduk di negara tersebut.¹ Distribusi pendapatan merupakan masalah perbedaan pendapat antara individu yang paling kaya dengan individu yang paling miskin. Semakin besar jurang pendapatan semakin besar pula variasi dalam distribusi pendapatan. Jika ketidakseimbangan terus terjadi antara kelompok kaya dan kaum miskin, maka

¹ Siradjuddin, *Pengantar Teori Ekonomi Makro*, (Makassar: Alauddin University Press, 2012), 218.

perekonomian tersebut benar-benar menggambarkan pertumbuhan yang tidak merata.²

Distribusi pendapatan yang tidak merata dan pertumbuhan ekonomi hingga kini masih menjadi perhatian banyak ahli ekonomi dalam konteks pembangunan, strategi pembangunan yang hanya bertumpu pada pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi ternyata membawa disparitas pendapatan regional yang tinggi juga.

Distribusi pendapatan mencerminkan merata atau timpangnya pembagian hasil pembangunan suatu negara di kalangan penduduknya. Distribusi pendapatan sebagai suatu ukuran dibedakan menjadi tiga ukuran pokok, baik tujuan kuantitatif maupun untuk tujuan analisis:³

- a. Distribusi Pendapatan fungsional atau distribusi pendapatan menurut bagian faktor distributif (*Functional or Factor Share Distribution of Income*)

Sistem distribusi ini mempertimbangkan individu-individu sebagai totalitas yang terpisah-pisah. Menurut Ahluwalia distribusi pendapatan di beberapa negara dapat digambarkan dalam 2 hal yaitu:⁴

- 1) Adalah perbandingan jumlah pendapatan yang diterima oleh berbagai golongan penerima pendapatan dan golongan ini didasarkan pada besar pendapatan yang mereka terima. Pengelompokan penduduk berdasarkan penerima pendapatan :
 - a) 40 persen penduduk menerima pendapatan paling rendah
 - b) 40 persen penduduk menerima pendapatan menengah
 - c) 20 persen penduduk menerima pendapatan paling tinggi

² Zukifli, "Pengaruh Upah Minimum Regional (UMR) Dan Kontribusi Sektor Industri Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Sulawesi Selatan", *Ecces*, Vol. 3 No. 2, (2016), 93.

³ Michael Todaro, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, (Jakarta : Erlangga ,2009), 124.

⁴ Sadono, 1996

2) Distribusi pendapatan mutlak

Adalah persentase jumlah penduduk yang pendapatannya mencapai suatu tingkat pendapatan tertentu atau kurang dari padanya. Ukuran umum yang dipakai biasanya adalah kriteria Bank Dunia yaitu ketidakmerataan tertinggi bila 40 persen penduduk dengan distribusi pendapatan terendah menerima kurang dari 12 persen pendapatan nasional. Ketidakmerataan sedang apabila 40 persen penduduk dengan pendapatan terendah menerima 12-17 persen pendapatan nasional. Ketidakmerataan rendah bila 40 persen penduduk dengan pendapatan terendah menerima lebih dari 17 persen dari seluruh pendapatan nasional.

Distribusi pendapatan yang didasarkan pada pemilik faktor produksi ini akan berkaitan dengan proses pertumbuhan pendapatan, adapun pertumbuhan pendapatan dalam masyarakat yang didasarkan pada kepemilikan faktor produksi dapat dikelompokkan menjadi dua macam:⁵

- a) Pendapatan karena hasil kerja yang berupa upah atau gaji dan besarnya tergantung tingkat produktifitas.
- b) Pendapatan dari sumber lain seperti sewa, laba, bunga, hadiah atau warisan. Sayangnya relevansi teori fungsional tidak mempengaruhi pentingnya peranan dan pengaruh kekuatan-kekuatan di luar pasar (faktor-faktor nonekonomis), misalnya kekuatan dalam menentukan faktor-faktor harga.

⁵ Michael Todaro, *Pembangunan*, 125.

b. Distribusi Pendapatan Perseorangan atau besaran pendapatan (*Personal Or Size Distribution of Income*)

Distribusi pendapatan pribadi atau distribusi pendapatan berdasarkan besarnya pendapatan paling banyak digunakan ahli ekonomi. Distribusi ini hanya menyangkut orang per orang atau rumah tangga dan total pendapatan yang mereka terima, dari mana pendapatan yang mereka peroleh tidak dipersoalkan. Tidak dipersoalkan pula berapa banyak yang diperoleh masing-masing individu, apakah merupakan hasil dari pekerjaan mereka atau berasal dari sumber-sumber lain. Selain itu juga diabaikan sumber-sumber pendapatan yang menyangkut lokasi (apakah diwilayah desa atau kota) dan jenis pekerjaan.

c. Distribusi Regional

Distribusi regional merupakan indikator yang mengukur tingkat ketimpangan pendapatan berdasarkan distribusi regional atau daerah. Salah satu indikator yang biasa dan dianggap cukup representatif untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan antar daerah adalah indeks ketimpangan daerah yang dikemukakan Jeffrey G. Williamson pada tahun 1965.⁶ Williamsons mencetuskan model V_w (indeks tertimbang atau *weighted index* terhadap jumlah penduduk) dan V_{uw} (tidak tertimbang atau *un-weighted index*) untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan per kapita Negara pada waktu tertentu.

⁶ Lincolin Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2010), 124.

2. Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Arsyad berpendapat dalam masalah pemerataan merupakan suatu hal yang sangat kompleks demi mengatasi ketimpangan, karena sering sekali berkaitan dengan nilai-nilai sosial suatu masyarakat. Sebagian masyarakat memandang pemerataan sebagai suatu tujuan yang bernilai dengan adanya unsur yang erat hubungannya dengan keadilan sosial. Dalam upaya pencapaian pemerataan terdapat beberapa kendala yang harus dihadapi. Pertama yaitu pendanaan yang diperlukan sangatlah besar, adanya kendala anggaran disebagian NSB (Negara Sedang Berkembang) akan membatasi ruang gerak bagi upaya pengurangan tingkat kesenjangan. Yang kedua yaitu tidak tepat sasaran, disebabkan terbatasnya interaksi antara pedesaan dan sektor informal dimana merupakan representasi golongan miskin dengan institusi formal misalnya pemerintah, dan yang ketiga adanya hambatan politik, dimana masyarakat golongan berpendapatan rendah seringkali memiliki kekuatan politik yang kecil dari pada golongan masyarakat berpendapatan tinggi.⁷

Ketimpangan adalah mengacu pada standar hidup dari seluruh masyarakat. Pada tingkat ketimpangan maksimum, kekayaan hanya dimiliki satu orang saja atau sekelompok golongan tertentu dan tingkat ketimpangan sangat tinggi.⁸ Ketimpangan pembangunan memiliki perbedaan dengan ketimpangan pendapatan. Ketimpangan pendapatan diukur menggunakan distribusi pendapatan untuk melihat ketimpangan antar kelompok masyarakat, sedangkan ketimpangan pembangunan tidak hanya melihat ketimpangan antar kelompok masyarakat tetapi juga fokus terhadap perbedaan antar wilayah (antara daerah maju dan terbelakang).

⁷Lincoln Arsyad, *Ekonomi*, 248.

⁸ Mudrajat Kuncoro, *Ekonomika Pembangunan, Teori, Masalah dan Kebijakan*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2006), 103.

Ketimpangan distribusi pendapatan adalah salah satu ciri dari adanya ketimpangan pembangunan. Dengan kata lain, perbedaan tingkat pertumbuhan ekonomi antara suatu daerah dengan daerah lain tersebut disebabkan oleh ketidakmerataan hasil pembangunan. Ketika timbulnya disparitas pembangunan akan timbul ketimpangan distribusi pendapatan. Ketimpangan distribusi pendapatan merupakan konsep yang lebih luas dibandingkan dengan kemiskinan karena tidak hanya fokus pada penduduk yang miskin, tetapi mencakup seluruh penduduk baik yang paling miskin hingga yang paling kaya.

Ketimpangan distribusi pendapatan merupakan masalah perbedaan pendapatan antara masyarakat atau perbedaan pendapatan antara daerah yang maju dengan daerah yang tertinggal. Semakin besar jurang pendapatan maka semakin besar pula variasi dalam distribusi pendapatan. Ketimpangan distribusi pendapatan akan menyebabkan terjadinya disparitas antar daerah. Hal tersebut tidak dapat dihindari karena adanya efek perembesan ke bawah (*trickle down effect*) dari output secara nasional terhadap masyarakat mayoritas yang tidak terjadi secara sempurna. Hasil output nasional hanya dinikmati oleh segelintir golongan minoritas dengan tujuan tertentu.⁹

Sesuai dengan trend dalam distribusi pendapatan, ketimpangan distribusi pendapatan ini dapat digolongkan menjadi empat kelompok, yaitu: ¹⁰

- a. Ketimpangan kota dan desa yaitu ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat yang berada di kota dan di desa.

⁹ Ni Luh Putu Yuni Adipuryanti dkk, “Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk Yang Bekerja Dan Investasi Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Melalui Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Bal”, *Piramida* , Vol.9 No,1, 21.

¹⁰Mudrajad Kuncoro, *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2000), .108-124.

- b. Ketimpangan regional yaitu ketimpangan distribusi pendapatan antara wilayah atau regional.
- c. Ketimpangan interpersonal yaitu ketimpangan distribusi pendapatan masing-masing individu.
- d. Ketimpangan antar kelompok sosial ekonomi yaitu ketimpangan distribusi pendapatan dilihat dari tingkat pendidikannya. Semakin tinggi tingkat pendidikannya maka semakin besar pendapatan yang diperoleh.

Pada tahun 1950 Simon Kuznets membuat hipotesis mengenai relasi ketimpangan pendapatan dan tingkat pendapatan perkapita yang dikenal dengan kurva U terbalik (*inverted U*).¹¹ Hipotesis Kuznets menjelaskan tahapan pembangunan ekonomi dengan asumsi dasar terjadinya pertumbuhan perkapita secara berkesinambungan tanpa adanya krisis ekonomi. Tahap-tahapan pembangunan ekonomi tersebut dijabarkan sebagai berikut:¹²

- a. Awal industrilisasi, penduduk dari sektor pertanian dipedesaan akan bergerak ke sektor industri dan jasa di perkotaan yang disebabkan tingkat upah yang lebih tinggi di perkotaan.
- b. Para pengusaha/pemilik modal di perkotaan akan mendapatkan keuntungan dan kemudian mengakumulasikan modal lagi untuk bertumbuh lebih besar. Pada tahap ini, ketimpangan distribusi pendapatan terjadi baik antara pekerja pertanian di pedesaan dengan pekerja industri dan jasa di perkotaan maupun antara pemilik modal/ pengusaha di perkotaan dengan pekerjanya.

¹¹ Mudrajat Kuncoro, *Ekonomika Pembangunan*, 116.

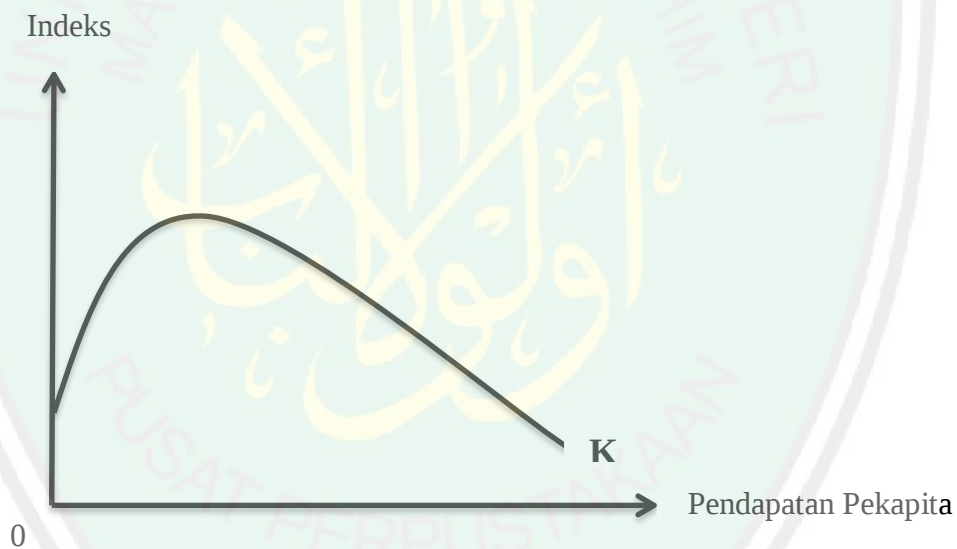
¹² Maddaremmeng A. Panennungi, *Transformasi Perekonomian Indonesia*, (Jakarta : Pustaka Obor Indonesia, 2017), 64-65.

- c. Dengan perjalanan waktu yang semakin panjang yang seiring dengan meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat akan terjadi penurunan ketimpangan pendapatan masyarakat.

Hasil dari hipotesis ini diinterpretasikan sebagai evolusi dari distribusi pendapatan dalam proses transisi dari suatu ekonomi pedesaan (rural) ke ekonomi perkotaan (urban) atau dari ekonomi pertanian (tradisional) ke ekonomi industri (modern). Hipotesis ini dapat dilihat pada gambar 2.1 di bawah ini.

Gambar 2.1

Kurva Hipotesis Kuznet



Sumbu vertikal kurva ini adalah ketimpangan regional di lambangkan dengan kesenjangan pendapatan melalui indeks gini (Gini Ratio) dan sumbu horizontal berupa tingkat pembangunan nasional yang dilambangkan dengan jumlah pendapatan perkapita.

Satu dekade setelah Kuznets menyatakan ketimpangan distribusi pendapatan cenderung tinggi diawal pembangunan ekonomi yang disebabkan transformasi dari

aktivitas berbasis pedesaan (ketimpangan rendah) ke aktivitas berbasis pedesaan (ketimpangan tinggi), pada tahun 1960-an Nicholas Kaldor berpendapat ketimpangan distribusi pendapatan mempunyai sifat *growth-enhancing* atau faktor pendorong pertumbuhan.¹³ Kaldor mengklasifikasikan masyarakat dalam dua kelompok yaitu kelompok kapitalis dan kelompok buruh. Masing-masing kelompok mempunyai kecendrungan menabung (*marginal propensity to save*) yang berbeda : s_p untuk kelompok kapitalis dan s_w untuk kelompok buruh. P = keuntungan atau penghasilan dari kelompok kapitalis, W = upah atau penghasilan dari kelompok buruh, Q = Seluruh jumlah pendapatan nasional. P/Q menunjukkan berapa bagian dari pendapatan masyarakat (pendapatan nasional) yang diterima kaum kapitalis yang sering disebut dengan *profit share*.¹⁴ Menurut Kaldor pola distribusi pendapatan mempunyai pengaruh terhadap laju pertumbuhan ekonomi, jika $s_p > s_w$, maka semakin besar *profit share* dan semakin besar juga laju pertumbuhan ekonomi. Jadi, dapat disimpulkan apabila pola distribusi pendapatan tidak merata, maka laju pertumbuhan ekonomi semakin tinggi. Model Kaldor memberikan alternatif pilihan antara pertumbuhan GDP (*Gross Domestic Product*) yang cepat tetapi distribusi pendapatan yang timpang, atau pertumbuhan GDP melambat dengan distribusi pendapatan yang lebih merata.

3. Metode Pengukuran Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Untuk mengukur ketimpangan distribusi pendapatan di suatu negara/ daerah terdapat beberapa metode yang lazim digunakan yaitu Kriteria Bank Dunia. Bank dunia mengklasifikasikan masyarakat kedalam 3 (tiga) kelompok untuk mengukur

¹³ Arif Anshory Yusuf, *Keadilan Untuk Pertumbuhan*, (Bandung, Unpad Press, 2018), 90.

¹⁴ Boediono, *Teori Pertumbuhan Ekonomi*, (Yogyakarta: BPFE, 1988), 76-79.

distribusi pendapatan. *Pertama*, 20% penduduk dari total penduduk dunia, berpendapatan tinggi. *Kedua*, 40% penduduk dari total penduduk dunia, berpendapatan sedang. *Ketiga*, 40% penduduk dari total penduduk dunia, berpendapatan rendah. Berdasarkan pengelompokan masyarakat ini, Bank Dunia menetapkan kriteria melalui distribusi pendapatan yang diterima oleh 40% penduduk berpenghasilan terendah. Kriteria dalam ketimpangan (disparitas) pendapatan sebagai berikut:¹⁵

- a. Tinggi, jika 20% penduduk yang berpenghasilan terendah menerima kurang dari 12% dari bagian pendapatan.
- b. Sedang, jika 20% penduduk yang berpenghasilan terendah menerima 12 hingga 16% bagian pendapatan.
- c. Rendah, jika 20% penduduk yang berpenghasilan terendah menerima lebih dari 16% bagian pendapatan.

Di samping Kriteria Bank Dunia diatas ada beberapa metode yang umum dipakai untuk mengukur ketimpangan distribusi pendapatan diantaranya sebagai berikut:¹⁶

- a. Kurva Lorenz (*Lorenz Curve*)

Kurva ini dinamakan kurva Lorenz karena yang memperkenalkan kurva tersebut adalah Conrad Lorenz seorang ahli statistik dari Amerika Serikat. Pada tahun 1905 ia menggambarkan hubungan antara kelompok-kelompok penduduk dan pangsa (*share*) pendapatan mereka.

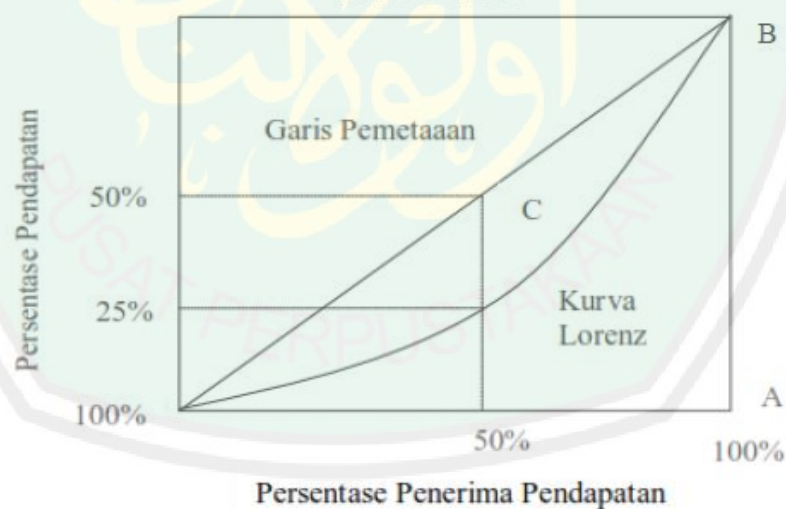
¹⁵ Pratama Rahardja dan Mandala Manurung, *Teori Ekonomi Makro: Suatu Pengantar*, (Jakarta: FE UI, 2008), 12.

¹⁶ Daryanto A dan Hafrizrianda Y, *Model-Model Junatitatif Untuk Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah: Konsep dan Aplilaksi*, Bogor, IPB Press, 2010), 20-35.

Kurva Lorenz menggambarkan distribusi kumulatif pendapatan nasional di kalangan lapisan-lapisan penduduk secara kumulatif. Kurva Lorenz adalah kurva yang terbentuk dari garis horizontal yang menunjukkan presentase kumulatif jumlah penduduk yang memiliki pendapatan dan garis vertikal menunjukkan presentase kumulatif dari jumlah pendapatan. Antara garis horizontal dan garis vertikal terdapat garis diagonal. Jika kurva Lorenz semakin lurus (mendekati diagonal) menandakan distribusi pendapatan nasional yang semakin merata, Sebaliknya, jika kurva Lorenz semakin jauh dari diagonal (semakin lengkung), maka menggambarkan distribusi pendapatan nasional semakin timpang atau tidak merata.

Gambar 2.2

Kurva Lorenz



- 1) Jika kurva Lorenz adalah diagonal 0A maka terlihat 50% penduduk (penerima pendapatan) memperoleh 50% pendapatan nasional, menggambarkan pembagian pendapatan sempurna merata.

- 2) Jika 50% penduduk yang paling rendah pendapatannya menerima 25% pendapatan, tergolong pada pembagian pendapatan cukup merata (kurva Lorenz 0CA).
- 3) Jika kurva Lorenz adalah sisi siku 0BA, maka 100% penduduk sama sekali tidak memperoleh pendapatan, menggambarkan pembagian pendapatan sempurna tidak merata.

b. Indeks Gini (*Gini Ratio*)

Ratio Gini adalah suatu ukuran singkat yang dikemukakan oleh Gini mengenai derajat ketidakmerataan distribusi pendapatan dalam suatu negara biasa diperoleh dengan menghitung luas daerah antara garis diagonal (kemerataan sempurna) dengan kurva Lorenz dibandingkan dengan luas total dari separuh bujur sangkar dimana terdapat kurva Lorenz tersebut. Secara tematis ratio gini dapat dijelaskan sebagai berikut:

$$GR = 1 - \sum f_i [Y_i + Y_{i-1}]$$

Ket : f_i = jumlah persen (%) penerima pendapatan kelas ke i .

Y_i = jumlah kumulatif (%) pendapatan pada kelas ke i .

Indeks gini adalah suatu koefisien yang berkisar dari angka 0 hingga 1, yang menjelaskan kadar pemerataan pendapatan. Koefisien yang semakin mendekati 0 berarti distribusi pendapatan semakin merata, sebaliknya koefisien yang semakin mendekati 1 berarti distribusi pendapatan semakin timpang. Indeks Gini dari negara-negara yang mengalami ketidakmerataan tinggi berkisar antara 0,50 – 0,70; ketidakmerataan sedang berkisar antara 0,36 – 0,49; dan yang mengalami ketidakmerataan rendah berkisar antara 0,20 - 0,35.

Indeks gini juga dapat digunakan untuk mengukur tingkat pemerataan hal-hal lain di luar pendapatan, berdasarkan empat prinsip:¹⁷

- 1) Prinsip anonimitas (*anonymity principle*) mengatakan bahwa ukuran ketimpangan seharusnya tidak tergantung pada siapa yang mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi, dengan kata lain ukuran ini tidak tergantung pada apa yang kita yakini sebagai manusia yang lebih baik, apakah itu orang miskin atau orang kaya.
- 2) Prinsip independensi skala (*scale independence principle*), ukuran ketimpangan tidak tergantung pada ukuran perekonomian suatu negara dan cara mengukur pendapatannya. Prinsip ini tidak tergantung pada ukuran pendapatan dalam dolar atau dalam yen dan tidak tergantung pula apakah perekonomian negara tersebut secara rata-rata kaya atau miskin.
- 3) Prinsip independensi populasi (*population independence principle*), ukuran ketimpangan tidak tergantung pada jumlah penerimaan pendapatan (penduduk suatu negara/wilayah), sehingga perekonomian Indonesia tidak boleh dikatakan lebih merata/timpang dari Malaysia hanya karena jumlah penduduk Indonesia lebih banyak.
- 4) Prinsip transfer Pique-Dalton (*Pique-Dalton transfer principle*), jika diasumsikan semua pendapatan lain konstan maka dengan mentransfer sejumlah pendapatan dari orang kaya kepada orang miskin maka akan dihasilkan distribusi pendapatan yang baru dan lebih merata.

¹⁷ Michael Todaro, *Pembangunan*, 238-239

c. Indeks Williamson

Indeks ini ditemukan oleh Jeffry G Williamson, indeks Williamson ini digunakan untuk mengetahui ketimpangan pembangunan antar wilayah yang terjadi. Berikut rumus dari Indeks Williamson:

$$IW = \frac{\sqrt{\sum (Y_i - Y)^2 f_i / n}}{Y}$$

Dimana : IW= Indeks ketimpangan wilayah

Y_i = PDRB per kapita wilayah i

Y = Rata-rata PDRB per kapita Provinsi

F_i = Jumlah penduduk wilayah i

n = Jumlah penduduk Provinsi

Batasan tingkat ketimpangan antar wilayah dengan menggunakan ukuran ini,yaitu:

- 1) Nilai indeks > 1 , terjadi ketimpangan yang maksimum
- 2) Nilai indeks $0,7 - 1$, terjadi ketimpangan yang tinggi
- 3) Nilai indeks $0,4 - 0,6$, terjadi ketimpangan yang sedang
- 4) Nilai indeks $< 0,3$, terjadi ketimpangan yang rendah.

d. Indeks Theil

Ukuran ketimpangan lain yang banyak digunakan adalah Indeks Entropi Theil. Indeks ini merupakan aplikasi konsep teori informasi dalam mengukur ketimpangan dan konsentrasi industri yang menawarkan tentang pendapatan regional perkapita dan kesenjangan pendapatan. Secara matematis indeks theil dapat dijelaskan sebagai berikut:

$$I(y) = \sum \left(\frac{y_j}{Y} \right) \times \log \left(\frac{\frac{y_j}{Y}}{\frac{x_j}{X}} \right)$$

Dimana: $I(y)$ = Indeks Entropi Theil

y_j = PDRB per kapita kabupaten/kota j

Y = Rata-rata PDRB per kapita Provinsi

x_j = Jumlah penduduk Kabupaten/Kota j

X = Jumlah penduduk Provinsi

Dengan indikator bahwa, semakin besar nilai Indeks Entropi Theil maka semakin besar ketimpangan yang terjadi. Begitu pula sebaliknya apabila Indeks Entropi Theil maka semakin merata terjadinya pembangunan.

Dari berbagai metode diatas yang banyak digunakan selama ini adalah indeks Williamson (CV), ataupun juga dapat menggunakan pengukuran lain, seperti indeks Theil dan koefisien Gini rasio untuk mengukur ketimpangan distribusi pendapatan. Selain indeks Williamson, indeks Theil, koefisien Gini rasio dapat juga menggunakan ketimpangan pendapatan per kapita relatif.¹⁸ Pengukuran ini dapat digunakan secara eksibel, di mana polanya mirip dengan pengukuran ketimpangan tradisional lainnya indeks Theil (Td), koefisien Gini, atau *Sigma Convergence*, yang dapat menghitung ketimpangan dalam daerah dan antardaerah secara sekaligus sehingga cakupan analisis menjadi lebih luas bila dibandingkan dengan indeks Williamson. Keseimbangan sempurna (*equity*) terjadi bilamana per kapita kabupaten/kota sama dengan rata-rata provinsi pada daerah dan tahun tertentu.

Formulasi matematisnya sebagai berikut:

¹⁸ J.A Bonet, "Fiscal Decentralization and Regional Income Disparities: Evidence from the Colombian Experience", *The Annals of Regional Science*, 40 (3) (2006), 661-676.

$$INeq_{it} = \left| \frac{PCGDP_{it}}{PCGDP_t} - 1 \right|$$

Dimana: $INeq_{it}$ = Nilai ketimpangan relatif

$PCGDP_{it}$ = Pendapatan perkapita tingkat kota/kabupaten

$PCGDP_t$ = Pendapatan perkapita provinsi

i = Menunjukan daerah ($i = 1, 2, 3, \dots, 8$)

t = Tahun analisis ($t = 2001, 2002, \dots, 2010$).

Selain memakai beberapa metode pengukuran di atas, untuk mengetahui suatu negara/ wilayah yang mengalami masalah dalam ketimpangan ekonomi khususnya pada distribusi pendapatan dijelaskan dengan analisis Tipologi Klassen. Alat analisis Tipologi Klassen digunakan untuk mengidentifikasi sektor, subsektor, usaha, atau komoditi prioritas atau unggulan suatu daerah dan digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi suatu daerah, tipologi ini diharapkan dapat memperjelas dan memperkuat hasil analisis. Klasifikasi Tipologi Klassen berdasarkan pendekatan sektoral adalah sebagai berikut:¹⁹

- a. Tipologi 1: daerah Cepat Maju dan Cepat Tumbuh (*high growth and high income*)

Merupakan kriteria pola pertumbuhan kota/kabupaten di Provinsi yang mempunyai Pendapatan perkapita kota/kabupaten lebih besar dari pendapatan perkapita Provinsi dan memiliki laju pertumbuhan PDRB kota/kabupaten lebih besar dari laju pertumbuhan total Provinsi.

¹⁹Sjafrizal, *Ekonomi Regional*, 180.

b. Tipologi 2: Daerah Maju Tapi Tertekan (*high income but low growth*)

Merupakan kriteria pola pertumbuhan yang terdapat di kota/kabupaten yang memiliki Pendapatan perkapita kabupaten/kota lebih besar dari pendapatan perkapita Provinsi dan memiliki laju pertumbuhan PDRB kecamatan kurang dari laju pertumbuhan total Provinsi.

c. Tipologi 3: Daerah Berkembang Cepat (*high growth but low income*)

Merupakan kriteria pola pertumbuhan kota/kabupaten di Provinsi yang mempunyai Pendapatan perkapita kota/kabupaten kurang dari pendapatan perkapita Provinsi dan memiliki laju pertumbuhan PDRB kota/kabupaten lebih besar dari laju pertumbuhan total Provinsi.

d. Tipologi 4: Daerah Relatif Tertinggal (*low growth and low income*)

Merupakan kriteria pola pertumbuhan kota/kabupaten di Provinsi yang mempunyai Pendapatan perkapita kota/kabupaten kurang dari pendapatan perkapita Provinsi dan memiliki laju pertumbuhan PDRB kecamatan kurang dari laju pertumbuhan total Provinsi.

Selanjutnya pola pertumbuhan ekonomi sektoral pada masing-masing kota/kabupaten yang terdapat di Provinsi dapat dianalogikan dengan skema dan konseptual dari metode analisa yang menggunakan tipologi klassen pada sajian tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1

Matriks Klasifikasi Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Menurut Tipologi Klassen

PDRB Per Kapita (y) Laju Pertumbuhan (r)	$y_i < y$	$y_i > y$
$r_i > r$	Daerah Berkembang Cepat	Daerah Maju dan Cepat Tumbuh
$r_i < r$	Daerah Relatif Tertinggal	Daerah Maju Tapi Tertekan

Keterangan : r_i = Laju Pertumbuhan PDRB Kota/Kabupaten i

r = Laju Pertumbuhan total PDRB Provinsi

y_i = Pendapatan Perkapita Kota/Kabupaten

y = Pendapatan Perkapita Provinsi

Dalam penelitian ini metode yang digunakan untuk mengukur ketimpangan distribusi pendapatan pada kabupaten/ kota di Provinsi Sumatera Barat memakai gini rasio yang di pakai oleh BPS.

4. Distribusi Pendapatan Dalam Perspektif Islam

Secara terminologi, menurut Afzalur Rahman yang dikutip Idri, distribusi yaitu suatu cara di mana kekayaan disalurkan atau dibagikan ke beberapa faktor produksi yang memberikan kontribusi kepada individu-individu, masyarakat maupun negara.²⁰ Islam telah menggariskan mengenai bagaimana proses dan mekanisme distribusi kekayaan di antara seluruh lapisan masyarakat agar tercipta keadilan dan kesejahteraan.²¹ Secara umum Islam mengarahkan mekanisme berbasis spiritual dalam pemeliharaan keadilan sosial pada setiap aktivitas ekonomi. Latar belakangnya karena ketidakseimbangan distribusi kekayaan adalah hal yang

²⁰ Idri, *Hadis Ekonomi, Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Kencana, 2015), 130.

²¹ Imamudin Yuliadi, *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: LPPI, 2001), 115.

mendasari hampir semua konflik individu maupun sosial. Upaya pencapaian manusia akan kebahagiaan, membimbing manusia untuk menerapkan keadilan ekonomi yang dapat menyudahi kesengsaraan di muka bumi ini. Hal tersebut akan sulit dicapai tanpa adanya keyakinan pada prinsip moral dan sekaligus kedisiplinan dalam mengimplementasikan konsep moral tersebut. Ini adalah fungsi dari menerjemahkan konsep moral sebagai faktor endogen (dari dalam) dalam perekonomian, sehingga etika ekonomi menjadi hal yang sangat mendasar untuk dapat mengalahkan setiap kepentingan pribadi.²²

Agar distribusi memberikan signifikansi yang memadai maka perlu diperhatikan prinsip-prinsip distribusi seperti sebagai berikut:²³

a. Prinsip keadilan dan pemerataan

Prinsip keadilan dan pemerataan dalam distribusi mengandung maksud. *Pertama*, kekayaan tidak boleh dipusatkan pada sekelompok orang saja, tetapi harus menyebar kepada seluruh masyarakat. Islam menginginkan persamaan kesempatan dalam meraih harta kekayaan, terlepas dari tingkatan sosial, kepercayaan, dan warna kulit. *Kedua*, hasil-hasil produksi yang bersumber dari kekayaan nasional harus dibagi secara adil. *Ketiga*, Islam tidak mengizinkan tumbuhnya harta kekayaan yang melampaui batas-batas yang wajar apalagi jika diperoleh dengan cara yang tidak benar. Untuk mengetahui pertumbuhan dan pemusatan, Islam melarang penimbunan harta (ihtikar) dan memerintahkan untuk membelanjakannya demi kesejahteraan

²² Mustafa Edwin Nasution, dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), 120.

²³ Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), 175.

masyarakat. Al-Qur'an telah menjelaskan prinsip ini dalam surat Al-Hasyr ayat 7:

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ
وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ
فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : “Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kotakota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anakanak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumanNya.”

Pada ayat tersebut diterangkan bahwa harta fa'i berasal dari orang kafir, seperti pada kasus harta Bani Quraizhah, Bani Nadhir, penduduk Fadak dan Khaibar, kemudian diserahkan kepada Allah dan Rasulullah SAW, digunakan untuk kepentingan publik, tidak dibagi-bagikan kepada kaum muslimin. Diterangkan pembagian harta fa'i untuk Allah, untuk Rasulullah SAW, kerabat-kerabat Rasulullah SAW dari Bani Hasyim dan Bani Muththalib, anak-anak yatim yang fakir, orang-orang miskin yang memerlukan pertolongan dan orang-orang yang kehabisan perbekalan dalam perjalanan di jalan Allah. Setelah Rasulullah SAW wafat, maka bagian Rasulullah SAW sebesar empat perlima dan seperlima dari seperlima

digunakan untuk keperluan orang-orang yang melanjutkan tugas beliau, seperti pejuang dimedan perang, para da'i dan baitul mal.²⁴

b. Prinsip persaudaraan dan kasih sayang

Konsep persaudaraan (*ukhuwah*) dalam Islam menggambarkan solidaritas individu dan sosial dalam masyarakat Islam yang tercermin dalam pola hubungan sesama Muslim. Rasa persaudaraan harus ditanam dalam hati sanubari umat Islam sehingga tidak terpecah belah oleh kepentingan duniawi. Distribusi harta kekayaan dalam Islam, sesungguhnya sangat memperhatikan prinsip ini. Zakat, wakaf, sedekah, infak, nafkah, waris, dan sebagainya diberikan kepada umat Islam agar ekonomi mereka semakin baik. Prinsip persaudaraan dan kasih sayang ini digambarkan dalam firman Allah:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوِيكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: *Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat.*" (QS. Al-Hujurat/49: 10).

c. Prinsip Solidaritas sosial

Prinsip solidaritas sosial merupakan salah satu prinsip pokok dalam distribusi harta kekayaan. Islam menghimbau adanya solidaritas sosial dan menggariskan dan menentukannya dalam suatu sistem tersendiri seperti zakat, sedekah, dan lain-lain. Zakat dan sedekah merupakan lembaga keuangan penting bagi masyarakat Muslim dan memiliki peran pokok dalam merealisasikan kepedulian sosial dan redistribusi pendapatan antar-umat Islam. Selain peran itu, zakat juga memiliki peran penting dalam proses

²⁴Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam: Buku Referensi Program Studi Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 94.

pembangunan ekonomi. Menurut Syawqi Ahmad Dunya sebagaimana dikutip Idri, zakat memiliki peran investasi karena mengarah langsung kepada sumber daya pengadaan produksi manusia dalam masyarakat.

5. Faktor-faktor Determinan Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Ketimpangan distribusi pendapatan dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, baik faktor ekonomi maupun non-ekonomi. Faktor ekonomi yang sering dikaitkan dengan ketimpangan distribusi pendapatan adalah kondisi makroekonomi suatu wilayah seperti akumulasi modal, inflasi, jumlah penduduk, PDRB perkapita, nilai tukar, pengangguran dan kemiskinan.²⁵ Sedangkan untuk faktor non-ekonomi antara lain kondisi demografi, kondisi alam, politik, dan budaya dari wilayah yang bersangkutan.²⁶ Faktor penentu ketimpangan distribusi pendapatan pada penelitian hanya mengambil faktor ekonomi saja, diantaranya:

a. PDRB Perkapita

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pengertian dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah penjumlahan seluruh nilai tambah yang diperoleh keseluruhan unit usaha dalam suatu daerah ataupun penjumlahan seluruh nilai barang dan jasa akhir yang diperoleh keseluruhan unit ekonomi di suatu daerah. Adapun PDRB perkapita didapat dengan cara membagi PDRB dengan jumlah penduduk

Menurut Sukirno, dalam penyusunan Produk Domestik Regional Bruto dibentuk menjadi dua macam yaitu:²⁷

²⁵ Adelman dan Morris dalam Lincolin Arsyad, *Ekonomi*, 174

²⁶ Simon Fuglsang.. 2013.

²⁷ Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi Teori Pengantar, Edisi Ke-3*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 21.

1) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan

Pengertian PDRB atas dasar harga konstan menurut BPS adalah keseluruhan nilai tambah produksi barang serta jasa yang dihitung dengan harga suatu tahun tertentu yang digunakan sebagai tahun dasar yang mana dalam penelitian ini menggunakan tahun dasar 2010. Dengan menggunakan PDRB atas dasar harga konstan dengan tujuan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

2) Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku

Pengertian PDRB atas dasar harga berlaku menurut BPS ialah nilai tambah yang diperoleh dari sektor ekonomi secara keseluruhan yang mana nilai tambah yang diperoleh dihitung dengan harga pada setiap tahunnya yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar struktur perekonomian dan peranan dalam sektor ekonomi.

b. Tingkat Kemiskinan

Menurut Oscar Lewis, orang-orang miskin adalah kelompok sosial yang mempunyai budaya kemiskinan sendiri yang mencakup psikologis, sosial dan ekonomi. Kaum liberal memandang bahwa manusia sebagai makhluk yang baik tetapi sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Budaya kemiskinan hanyalah semacam *realistic* dan *situasional adaptation* pada lingkungan yang penuh diskriminasi dan peluang yang sempit. Sedangkan kaum radikal mengabaikan budaya kemiskinan, mereka menekankan peranan

struktur ekonomi, politik dan sosial dan memandang bahwa manusia adalah makhluk yang kooperatif.²⁸

Implikasi kemiskinan yang melibatkan pandangan-pandangan tersebut menjadikan kemiskinan sebagai sesuatu yang sangat kompleks. Memahami kemiskinan tentunya tidak hanya dapat dilihat dari satu segi dan satu sudut pandang saja, melainkan harus mampu membacanya dalam kerangka multidisipliner yang komprehensif. Secara sederhana, sebagaimana yang dinyatakan oleh Suparlan, kemiskinan dapat didefinisikan sebagai suatu standar tingkat kehidupan yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan umum yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Standar kehidupan yang rendah ini secara langsung tampak pengaruhnya terhadap tingkat keadaan kesehatan, kehidupan moral, standar pendidikan, tingginya kriminalitas dan lain sebagainya yang muncul dalam masyarakat yang bersangkutan.²⁹

Islam memandang kemiskinan merupakan satu hal yang mampu membahayakan akhlak, kelogisan berpikir, keluarga, dan juga masyarakat. Islam pun menganggapnya sebagai musibah dan bencana yang seharusnya memohon perlindungan kepada Allah atas kejahatan yang tersembunyi di dalamnya. Jika kemiskinan ini semakin merajalela, maka kemiskinan ini akan membuat lupa adanya Allah dan juga rasa sosialnya kepada sesama. Rasulullah SAW menjelaskan bagaimana bahayanya kemiskinan (kefakiran),

11. ²⁸Agus Sjaafari, *Kemiskinan dan Pemberdayaan Kelompok*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014),

²⁹ Parsudi Suparlan, *Kemiskinan di Perkotaan: Bacaan Untuk Antropologi Perkotaan*, (Jakarta :Yayasan Obor Indonesia, 1995), x.

bahkan beliau menggambarkan bahwasanya kefakiran mendekati kekufuran.

Hal ini sebagaimana Hadis berikut:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَادَ
الْفَقْرُ أَنْ يَكُونَ كُفْرًا

Artinya: “Dari Anas bin Malik r.a. Rasulullah SAW bersabda: kefakiran mendekati kekufuran.” (HR. Abu Dawud).

Menurut Manawy, kekafiran dan kekufuran mempunyai keterkaitan yang sangat kuat, karena kekufuran merupakan satu langkah menuju kekafiran. Seorang yang fakir miskin, pada umumnya akan menyimpan kedengkian kepada orang yang mampu dan kaya. Adapun iri dan dengki akan mampu melenyapkan kebaikan. Mereka pun mulai menumbuhkan kehinaan di dalam hati mereka, di saat mereka mulai melancarkan segala daya upayanya demi mencapai tujuan kedengkian mereka tersebut. Kesemuanya ini mampu meniadai agamanya dan juga menimbulkan adanya ketidakridhaan atas takdir yang telah ditetapkan yang akhirnya tanpa sadar akan membuatnya mencela rezeki yang telah datang padanya. Walaupun ini semua belum termasuk ke dalam kekafiran, namun sudah merupakan langkah untuk mencapai kekafiran itu sendiri.³⁰

c. Jumlah penduduk

Pertumbuhan penduduk adalah perubahan populasi sewaktu-waktu, dan dapat dihitung sebagai perubahan dalam jumlah individu dalam 7 sebuah populasi menggunakan “per waktu unit” untuk pengukuran. Sebutan

³⁰ Nurul Huda, dkk., *Ekonomi Pembangunan Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 23-25.

pertumbuhan penduduk merujuk pada semua spesies, tapi selalu mengarah pada manusia, dan sering digunakan secara informal untuk sebutan demografi nilai pertumbuhan penduduk, dan digunakan untuk merujuk pada pertumbuhan penduduk dunia.³¹ Dengan terus bertambah tingginya pertumbuhan mengakibatkan menurunnya pendapatan perkapita

Untuk memahami masalah penambahan penduduk terdapat beberapa teori pertumbuhan penduduk sebagai berikut:³²

- 1) Teori Natural Teori ini mengemukakan bahwa hewan dan tumbuhan dipengaruhi oleh temperatur, curah hujan, kesuburan tanah.
- 2) William Gadwin Mengemukakan bahwa kemelaratan adalah orang atau struktur masyarakat yang salah dan dapat diperbaiki dengan prinsip sama rata sama rasa.
- 3) Thomas Robert Malthus Kemelaratan adalah tidak imbangnya penambahan penduduk dengan penambahan bahan makanan.

Salah satu faktor penyebab ketimpangan distribusi pendapatan di Sub-Saharan Afrika adalah peningkatan populasi penduduk (Simon Fulgsang: 2013). Pertambahan penduduk berasal dari angka kelahiran dan migrasi penduduk ke dalam. Idealnya, penambahan jumlah penduduk diimbangi dengan penambahan aktivitas ekonomi. Migrasi penduduk ke dalam akan menambah persaingan dalam penggunaan sumber daya ekonomi. Meningkatnya angka kelahiran, selain mengurangi pendapatan per kapita

³¹Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, “Kajian Kependudukan”, <http://www.anggaran.depkeu.go.id/content/Publikasi/Kajian%20dan%20artikel/Kajian%20Kependudukan.pdf>, diakses tanggal 18 Februari 2019.

³² H Ruslan Prawiro, *Kependudukan, Teori, Fakta dan Masalah*, (Bandung: Alumni. 1983), 25-27.

juga akan menambah angka rasio ketergantungan penduduk. Hal ini disebabkan adanya penambahan usia non-produktif.

d. Tingkat pengangguran terbuka

Pengangguran adalah masalah makro ekonomi yang mempengaruhi manusia secara langsung dan merupakan masalah yang paling berat.³³ Sedangkan orang yang menganggur adalah mereka yang tidak mempunyai pekerjaan dan sedang aktif mencari pekerjaan. Kategori orang yang menganggur biasanya adalah mereka yang tidak memiliki pekerjaan pada usia kerja dan masanya kerja. Usia kerja biasanya adalah usia yang tidak dalam masa sekolah tapi di atas usia anak-anak (relatif diatas 6-18 tahun, yaitu masa pendidikan dari SD – tamat SMU). Sedangkan di atas usia 18 namun masih sekolah dapat dikategorikan sebagai penganggur, meski untuk hal ini masih banyak yang memperdebatkannya.³⁴

Didalam suatu negara pengangguran merupakan perbedaan diantara angkatan kerja dengan penggunaan tenaga kerja yang sebenarnya. Yang dimaksud angkatan kerja adalah jumlah tenaga kerja yang terdapat dalam suatu perekonomian pada suatu waktu tertentu. Untuk menentukan angkatan kerja diperlukan dua informasi, yaitu: (i) jumlah penduduk yang berusia antara 15 tahun dan 64 tahun, dan (ii) jumlah penduduk yang berusia diantara 15-64 tahun yang tidak ingin bekerja, misalnya : pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga, dan penganggur sukarela lain. Jumlah penduduk dalam golongan dinamakan penduduk usia kerja dan bukan angkatan kerja. Dengan

³³ N. Gregory Mankiw, *Makroekonomi Edisi Keenam*, (Jakarta: Erlangga, 2006), 154.

³⁴ Iskandar Putong dan Nuring Dyah Andjaswati, *Pengantar Ekonomi Makro*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010), 143.

demikian angkatan kerja dalam suatu periode tertentu dihitung dengan mengurangi jumlah penduduk dalam, dengan jumlah penduduk dalam. Perbandingan di antara angkatan kerja dengan penduduk usia kerja (dan dinyatakan dalam persen) dinamakan tingkat partisipasi angkatan kerja.³⁵

Sehingga tingkat pengangguran dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Pengangguran Terbuka} = \frac{\text{Jumlah yang menganggur}}{\text{Jumlah angkatan kerja}} \times 100 \%$$

Tingkat pengangguran terbuka menunjukkan prosentase individu-individu yang ingin bekerja namun tidak memiliki pekerjaan. Tingkat pengangguran dihitung berdasarkan rasio antara jumlah penganggur dengan angkatan kerja. Seseorang dianggap menganggur jika tidak bekerja namun menunggu untuk mendapatkan pekerjaan. Angkatan kerja didefinisikan sebagai jumlah antara individu yang memiliki pekerjaan dengan pengangguran.

Islam telah memperingatkan agar umatnya jangan sampai ada yang menganggur dan terpeleset kejurang kemiskinan, karena ditakutkan dengan kemiskinan tersebut seseorang akan berbuat apa saja termasuk yang merugikan orang lain demi terpenuhinya kebutuhan pribadinya, ada sebuah hadist yang mengatakan “kemiskinan akan mendekatkan kepada kekufuran. Namun kenyataannya, tingkat pengangguran di negara-negara yang mayoritas berpenduduk muslim relatif tinggi. Meningkatnya pemahaman

³⁵ Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi Teori Pengantar*, Edisi Ke-3, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 18.

masyarakat tentang buruknya pengangguran, baik bagi individu, masyarakat ataupun negara, akan meningkatkan motivasi untuk bekerja lebih serius. Walaupun Allah telah berjanji akan menanggung rezeki kita semua, namun hal itu bukan berarti tanpa ada persyaratan yang perlu untuk dipenuhi. Syarat yang paling utama adalah kita harus berusaha untuk mencari rezeki yang dijanjikan itu, karena Allah SWT telah menciptakan “system” yaitu siapa yang bekerja maka dialah yang akan mendapatkan rezeki dan barang siapa yang berpangku tangan maka dia akan kehilangan rezeki. Artinya, ada suatu proses yang harus dilalui untuk mendapatkan rezeki tersebut.

Oleh karena itu semua potensi yang ada harus dapat dimanfaatkan untuk mencari, menciptakan dan menekuni pekerjaan. Sebagaimana yang telah dikutip oleh Mursi mengatakan bahwa ada tiga unsur penting untuk menciptakan kehidupan yang positif dan produktif, yaitu :³⁶

- a) Mendayagunakan seluruh potensi yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita untuk bekerja, melaksanakan gagasan dan memproduksi
- b) Bertawakal kepada Allah, berlindung dan meminta pertolongan kepada-Nya ketika melakukan suatu pekerjaan.
- c) Percaya kepada Allah bahwa dia mampu menolak bahaya, kesombongan dan kediktatoran yang memasuki lapangan pekerjaan.

Dalam kaitannya dengan bidang pekerjaan yang harus dipilih, Islam mendorong umatnya untuk memproduksi dan menekuni aktivitas ekonomi dalam segala bentuk seperti: pertanian, pengembalaan, berburu, industri, perdagangan dan lain-lain. Islam tidak semata-mata hanya memerintahkan

³⁶ Sanerya Hendrawa, *Spiritual Management*, (Bandung: Mizan, 2009), 77.

untuk bekerja tetapi harus bekerja dengan lebih baik (insan), penuh ketekunan dan profesional. Insan dalam bekerja bukanlah suatu perkara yang sepele tetapi merupakan suatu kewajiban agama yang harus dipenuhi oleh tiap-tiap muslim. “*sesungguhnya Allah mencintai jika seseorang melakukan pekerjaan yang dilakukan secara itqan (professional)*” (HR. Baihaqi).³⁷

B. Teori Hubungan Variabel Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan

1. Hubungan PDRB Perkapita Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Menurut Kuznets terdapat korelasi positif antara laju pertumbuhan dengan ketimpangan distribusi pendapatan, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi atau semakin besar pendapatan per kapita maka semakin besar perbedaan antara kaum miskin dan kaum kaya.³⁸ Pada tahap awal pembangunan, peningkatan pendapatan perkapita diiringi oleh peningkatan nilai Indeks gini distribusi pendapatan. Artinya, pada tahap awal keberhasilan pembangunan yang dicirikan peningkatan tingkat pendapatan. Penelitian terdahulu yang sesuai dengan hipotesis Kuznet adalah penelitian yang dilakukan oleh Fanisa Arifka, Mochmad Faisal Rinjani dan Anis Tunas Syiviaran. Selain itu, Neo Marxist menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi justru akan selalu menyebabkan melebarnya jurang ketimpangan antara si kaya dan si miskin, hal ini terjadi karena adanya akumulasi modal dan kemajuan teknologi yang cenderung meningkatkan konsentrasi penguasaan sumberdaya dan kapital oleh

³⁷ Sanerya Hendrawa, *Spiritual Management...*, h, 79.

³⁸ Tulus Tambunan, *Perekonomian Indonesia: Teori Dan Temuan Empiris*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2001), 72.

para penguasa modal kelompok “elit” masyarakat. Sebaliknya kelompok yang tidak memiliki modal akan tetap berada dalam keadaan miskin.³⁹

2. Hubungan Tingkat Kemiskinan Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Ketimpangan distribusi pendapatan tidak terlepas atau sangat erat hubungannya dengan kemiskinan. Penghapusan kemiskinan dan berkembangnya ketidakmerataan distribusi pendapatan merupakan salah satu inti masalah pembangunan, terutama di negara sedang berkembang. Sebagian besar keluarga miskin memiliki jumlah anggota keluarga yang banyak sehingga kondisi perekonomian mereka berada di garis kemiskinan semakin memburuk seiring dengan memburuknya ketimpangan pendapatan atau kesejahteraan. Penyebab dari kemiskinan adalah adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang selanjutnya akan menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang.⁴⁰

Menurut Sen (1976) dan Forster et al. (1984) dalam Annim, hubungan yang erat antara ketimpangan distribusi pendapatan dan kemiskinan adalah bahwa ketimpangan pendapatan merupakan bagian dari kemiskinan.⁴¹ Sedangkan Barber (2008) dalam Annim, memandang hubungan antara ketimpangan pendapatan dan kemiskinan sebagai hubungan yang pragmatis, yaitu bahwa ketimpangan distribusi pendapatan menyebabkan kemiskinan semakin parah atau ketimpangan pendapatan adalah bentuk dari kemiskinan.⁴²

³⁹ Puslitbang Ekobank, LIPI, 1994.

⁴⁰ Michael Todaro, *Pembangunan*, 250.

⁴¹ Annim, S.K., S. Mariwah, and J. Sebu (2012). ‘*Spatial Inequality and Household Poverty in Ghana*’. *Economic Systems*, 36(4): 487–505, 490.

⁴² Annim, S.K., S. Mariwah, and J. Sebu (2012). ‘*Spatial.....*’, 498.

3. Hubungan Jumlah Penduduk Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Pertumbuhan penduduk adalah sebuah proses keseimbangan yang dinamis antara komponen kependudukan yang dapat menambah dan mengurangi jumlah penduduk.⁴³ Jumlah penduduk sangat erat kaitannya dengan distribusi pendapatan karena penambahan penduduk yang tinggi maka pendapatan perkapita akan menurun, sehingga menimbulkan permasalahan kemiskinan yakni tingginya disparitas antar daerah akibat tidak meratanya distribusi pendapatan, dan kesenjangan antara masyarakat kaya dan masyarakat miskin di Indonesia semakin melebar.⁴⁴ Menurut Sukirno (2007), perkembangan jumlah penduduk merupakan faktor yang dapat mendorong dan menghambat didalam pembangunan. Dapat dikatakan sebagai faktor pendorong karena penambahan jumlah penduduk kemungkinan semakin banyak tenaga kerja yang dihasilkan, lalu terjadinya perluasan pasar barang dan jasa ditentukan oleh dua faktor penting diantaranya yaitu, pendapatan masyarakat dan jumlah penduduk. Dan penduduk bisa disebut sebagai faktor penghambat pembangunan dikarenakan akan memberikan penurunan dalam produktivitas serta terjadinya banyak orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan yang mengakibatkan tidak mampunya dalam memenuhi kebutuhan didalam hidupnya. Penduduk yang tidak memiliki pekerjaan inilah yang menjadi penyebab terjadi ketimpangan distribusi pendapatan di suatu daerah. Penelitian terdahulu yang mendukung hubungan ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Vredrich Bantika dan Anngiat Mugabe Damanik.

⁴³ Mulyadi, *Ekonomi Sumberdaya Manusia Dalam Perspektif Pembangunan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 15.

⁴⁴ Boediono, *Teori Pertumbuhan Ekonomi Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi*, (Yogyakarta: BPFE, 1982), 207.

4. Hubungan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Menurut Syafrizal tingkat pengangguran terbuka merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat daerah. Tingkat pengangguran yang tinggi mengindikasikan bahwa tingkat kesejahteraan dan pendapatan masyarakatnya masih rendah, demikian pula sebaliknya. Indikator ini sangat penting bagi Indonesia sebagai negara dengan penduduk besar sehingga penyediaan lapangan kerja yang lebih banyak merupakan sasaran utama pembangunan daerah yang bersifat strategis.⁴⁵ Jumlah tingkat pengangguran terbuka di suatu daerah sangat menentukan pendapatan yang terdistribusi di masyarakat. Jumlah pengangguran di suatu wilayah juga dipengaruhi oleh jumlah lapangan kerja yang tersedia. Terbatasnya jumlah lapangan kerja yang tersedia akan menyebabkan para tenaga kerja akan kesulitan mencari pekerjaan dan berpotensi untuk menganggur. Pada akhirnya tingkat pengangguran terbuka di daerah tersebut akan meningkat. Dengan tingginya tingkat pengangguran terbuka di wilayah tersebut maka akan menyebabkan semakin tidak merata atau ketimpangan pendapatan yang beredar di masyarakat semakin tinggi. Penelitian terdahulu yang mendukung hubungan tingkat pengangguran terbuka dengan ketimpangan distribusi pendapatan yaitu penelitian yang dilakukan oleh Mochmad Faisal Rinjan dan Anis Tunas Syilviaran.

⁴⁵ Syafrizal, *Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi*, (Padang, Baduouse Media, 2008), 117-120.

C. Hipotesis Penelitian

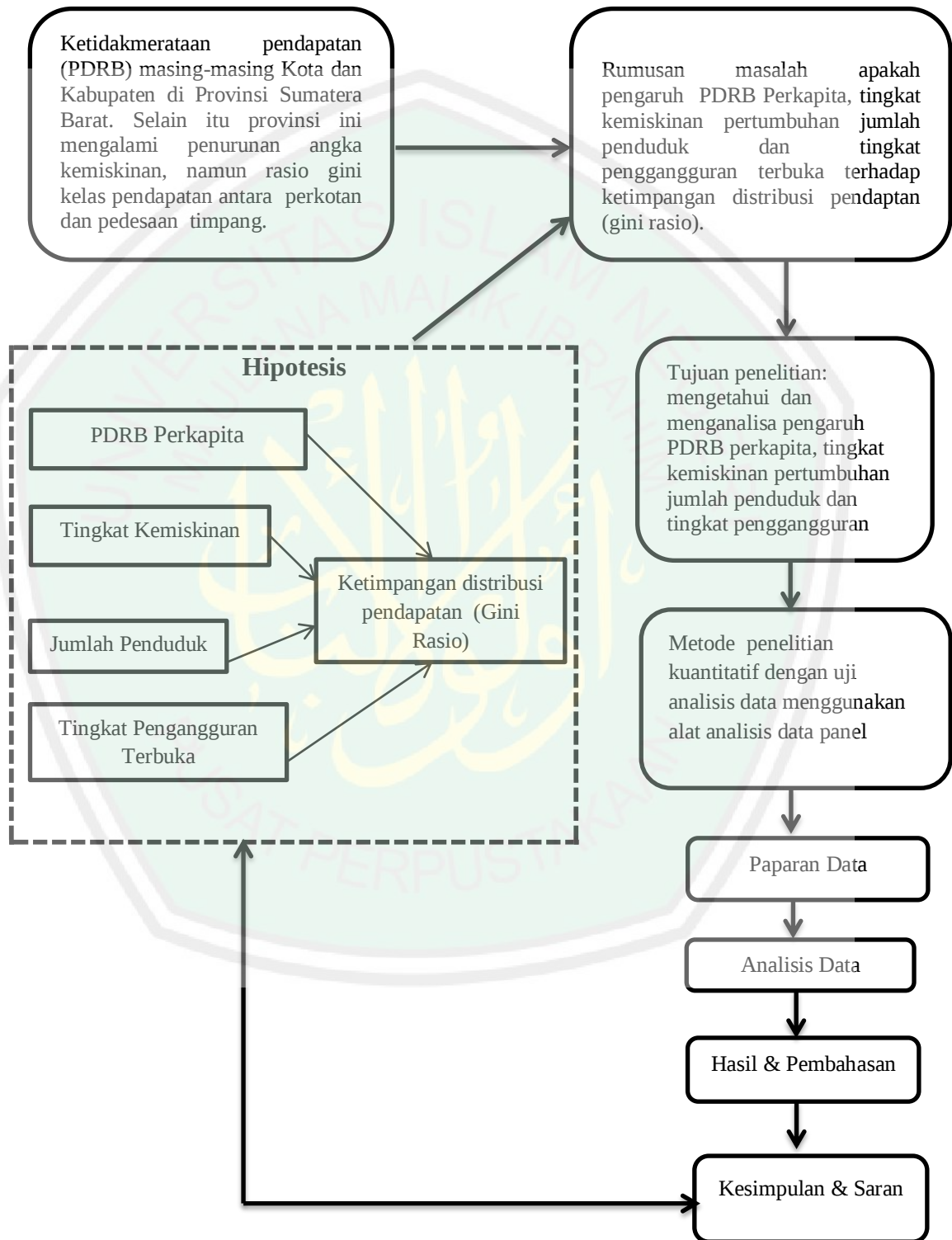
Hipotesis dalam penelitian ini merujuk pada teori-teori yang menjadi penyebab terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan dan berbagai macam penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti merumuskan beberapa hipotesis, diantaranya:

1. PDRB Perkapita mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2011-2017.
2. Tingkat Kemiskinan mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2011-2017.
3. Pertumbuhan Jumlah Penduduk mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2011-2017.
4. Tingkat Pengangguran Terbuka mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2011-2017.

D. Kerangka Berpikir

Berdasarkan kajian teori dan hasil penelitian terdahulu, maka dapat digambarkan kerangka pemikiran penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan dengan menggunakan analisis regresi data panel sebagai berikut:

Gambar 2.3
Kerangka Befikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini mengkaji pengaruh PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) perkapita, tingkat kemiskinan, jumlah penduduk dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) terhadap ketimpangan distribusi pendapatan pada kabupaten /kota di Sumatera Barat selama periode tahun 2011-2017. Berdasarkan tujuan penelitian yang telah ditetapkan, maka pendekatan penelitian ini memakai pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif merupakan pendekatan penelitian yang menggunakan data statistik berbentuk angka-angka, baik secara langsung digali dari hasil penelitian maupun hasil pengolahan dengan teknik analisa tertentu.¹ Penelitian kuantitatif merupakan suatu penelitian yang analisisnya secara umum memakai analisis statistik. Sugiyono mengatakan penelitian kuantitatif dinamakan metode tradisional, kerana metode ini sudah dipakai oleh peneliti terdahulu. Metode ini juga disebut sebagai metode positivistik karena berlandaskan pada filsafat positivisme. Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian kuantitatif adalah sebuah metode yang menggunakan angka-angka statistik dalam menganalisa suatu masalah yang akan mendeskripsikan hasil yang sistematis, terukur, faktual dan akurat.

¹ Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 118.

Alasan peneliti memilih pendekatan kuantitatif dalam penelitian ini karena data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat angka-angka dan juga untuk menguji hipotesis berdasarkan masalah yang diteliti.

B. Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari dua macam variabel yaitu:

1. Variabel bebas (*independent*) yaitu variabel yang menjadi penyebab perubahan dari variabel terikat. Beberapa variabel bebas pada penelitian ini antara lain: PDRB Perkapita (X1), Tingkat Kemiskinan (X2), Jumlah Penduduk (X3), dan Tingkat Pengangguran Terbuka (X4) .
2. Variabel terikat (*dependent*) merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat dari adanya variabel bebas. Simbol dari variabel terikat yaitu Y. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah ketimpangan distribusi pendapatan yang direpresentasikan oleh Gini Rasio.

Berikut ini pemaparan variabel-variabel penelitian, definisi operasional variabel dan indikator-indikator variabel yang terlihat pada tabel 3.1 di bawah ini.

Tabel 3.1
Variabel –Variabel Penelitian

No.	Variabel	Defenisi Operasional Variabel	Parameter Pengukuran	Skala	Satuan
1.	PDRB perkapita (X1)	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah kemampuan daerah dalam menciptakan output (nilai tambah) pada kurun waktu tertentu atas dasar faktor biaya. Cara menghitung PDRB Perkapita yaitu antara PDRB Harga konstan dibagi dengan jumlah penduduk di suatu daerah (di Provinsi Sumatera Barat) pada tahun 2011-2017.	PDRB perkapita atas dasar harga konstan tahun 2010.	Rasio	Rupiah

2.	Tingkat Kemiskinan (X2)	Tingkat kemiskinan adalah penduduk pendapatan minimum yang dianggap perlu dipenuhi untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi di di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2011-2017.	Jumlah penduduk miskin menurut kabupaten /kota di Sumatera Barat	Rasio	Jiwa
3.	Jumlah Penduduk (X3)	Pertumbuhan jumlah penduduk menunjukkan jumlah keseluruhan penduduk yang menghuni di Sumatera Barat pada tahun dilakukan survei. Pertambahan jumlah penduduk pada penelitian ini mengacu pada jumlah penduduk hasil berdasar sensus penduduk pada tahun 2011-2017 menurut Kabupaten/Kota di Provinsi di Sumatera Barat.	Penduduk menurut kabupaten /kota di Sumatera Barat.	Rasio	Jiwa
4.	Tingkat Pengangguran Terbuka (X4)	Tingkat pengangguran terbuka adalah presentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja pada tahun 2011-2017 menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.	Persentase Tingkat pengangguran terbuka	Rasio	Persentase
5.	Gini Rasio (Y)	Ketimpangan distribusi pendapatan merupakan kondisi dimana pendapatan tidak terdistribusi secara merata antar lapisan masyarakat. Ketimpangan distribusi pendapatan dalam penelitian ini adalah ketimpangan distribusi pendapatan relatif ditinjau dari pembagian pendapatan antar lapisan masyarakat di kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat.	Gini rasio di Provinsi Sumatera Barat.	Rasio	Indeks

C. Jenis Data dan Sumber Data

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan dan disatukan oleh studi-studi sebelumnya atau yang

diterbitkan oleh berbagai instansi. Data sekunder pada penelitian ini adalah data laporan tahunan kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat yang berupa data PDRB perkapita, data tingkat kemiskinan, data jumlah penduduk, data tingkat pengangguran terbuka dan data ketimpangan distribusi pendapatan (gini rasio). Semua data-data tersebut bersumber dari publikasi tahunan Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Barat selama periode tahun 2011-2017.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik dalam pengumpulan data menurut Arikunto adalah metode yang dipakai oleh peneliti untuk mengumpulkan data pada penelitian.² Penjelasan Arikunto tersebut mengandung arti bahwa teknik pengumpulan data yaitu metode atau cara untuk mengumpulkan data yang diperlukan oleh seorang peneliti dalam sebuah penelitian. Untuk pengumpulan data dalam penelitian dapat dilakukan dengan beberapa teknik antara lain: observasi (pengamatan), interview (wawancara), kuesioner (angket), dokumentasi dan gabungan dari keempatnya. Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi yang merupakan pengumpulan data tertulis atau dokumen yang sudah ada melalui instansi terkait, yaitu BPS Sumatera Barat.

E. Analisis Data

Analisis data digunakan untuk meringkas data dalam bentuk yang mudah dipahami dan ditafsirkan sehingga hubungan antar problem penelitian dapat

² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 197.

dipelajari dan diuji.³ Analisis data dalam penelitian kuantitatif lazim disebut analisis statistik karena menggunakan rumus-rumus statistik.⁴ Pada penelitian ini menggunakan analisis data kuantitatif dalam mengolah data dengan tujuan untuk menguji pengaruh PDRB perkapita, tingkat kemiskinan, jumlah penduduk dan tingkat pengangguran terbuka (variabel bebas) terhadap ketimpangan distribusi pendapatan/ gini rasio (variabel terikat) di kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. Dikarenakan semua variabel dalam penelitian ini menggunakan data perkembangan PDRB perkapita, tingkat kemiskinan, jumlah penduduk, tingkat pengangguran terbuka dan ketimpangan distribusi pendapatan (gini rasio) pada sembilan belas kabupaten /kota di Sumatera Barat selama periode tahun 2011-2017, maka untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat tersebut dilakukan teknik analisis regresi data panel dengan bantuan software *Eviews 9*.

Menurut Basuki dan Prawoto, analisis regresi data panel merupakan analisis regresi dengan menggunakan data runtut waktu (*time series*) dan data kerat silang (*cross sectional*). Data *time series* yaitu data yang terdiri dari satu atau lebih variabel yang akan diamati pada satu unit observasi dalam kurun waktu tertentu, data runtut waktu dalam penelitian ini adalah 2011-2017. Sedangkan data *cross sectional* adalah data observasi dari beberapa unit observasi dalam satu titik waktu tertentu,⁵ data kerat silang dalam penelitian ini yaitu sembilan belas kota/kabupaten di Provinsi Sumatera Barat. Berhubung data penelitian ini menggunakan data yang tidak normal (Gini rasio menggunakan rasio, PDRB perkapita dan jumlah penduduk menggunakan

³ Moh. Kasiran, *Metodologi Penelitian: Refleksi Pengembangan Dan Pemahaman Dan Penguasaan Metodologi Penelitian*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), 120.

⁴ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta, Teras, 2009), 71.

⁵ Agus Tri Basuki dan Nano Prawoto, *Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi & Bisnis: Dilengkapi Aplikasi SPSS & EVIEWS*, (Depok : PT Rajagrafindo, 2016), 275.

nominal serta tingkat pengangguran terbuka menggunakan persen) maka sebelum melakukan analisis, data tersebut harus ditransformasikan terlebih dahulu kedalam model log linier pada setiap variabel. Model Log Linear merupakan model linier univariat yang dipergunakan untuk melakukan analisis varians dengan variabel tak bebas⁶ dan transformasi setiap variabel ini dilakukan dengan bantuan software Eviews 9. Model analisis regresi data panel dalam penelitian ini sebelum variabel-variabel ditransformasikan dalam bentuk log linier sebagai berikut:

$$IG_{it} = \beta_0 + \beta_1 PDRB_{kpt_{it}} + \beta_2 TK_{it} + \beta_3 JP_{it} + \beta_4 TPT_{it} + \varepsilon$$

Model regresi data panel setelah di transformasikan ke dalam bentuk log linier yaitu:

$$\text{Log}IG_{it} = \beta_0 + \beta_1 \text{Log}PDRB_{kpt_{it}} + \beta_2 \text{Log}TK_{it} + \beta_3 \text{Log}JP_{it} + \beta_4 \text{Log}TPT_{it} + \varepsilon$$

Dimana : IG/GR = Ketimpangan Distribusi Pendapatan (Gini Rasio)

$PDRB$ = PDRB Perkapita

TK = Tingkat Kemiskinan

JP = Jumlah Penduduk

TPT = Tingkat Pengangguran Terbuka

B_0 = Konstanta

$B_1 B_2 B_3 B_4$ = Koefisien regresi berganda

i = Entitas

t = Periode

ε = Error term

Log = Log linier

⁶ Domodar N gurajanti, *Ekonometrika Dasar*, (Jakarta: Erlangga, 2003), 179-180.

Menurut Basuki dan Prawoto, terdapat beberapa kelebihan dalam penggunaan data panel diantaranya sebagai berikut:⁷

- a. Data panel mampu memperhitungkan heterogenitas individu secara eksplisit dengan mengizinkan variabel spesifik individu.
- b. Data panel dapat digunakan untuk menguji, membangun dan mempelajari model-model perilaku yang kompleks.
- c. Data panel mendasarkan diri pada observasi yang bersifat *cross sectional* yang berulang-ulang (*time series*), sehingga cocok digunakan sebagai *study of dynamic adjustment*.
- d. Data panel memiliki implikasi pada data yang lebih informatif, lebih bervariasi dan dapat mengurangi kolinieritas antar variabel, derajat kebebasan (*degree of freedom/df*) yang lebih tinggi sehingga dapat diperoleh hasil estimasi yang lebih efisien.
- e. Data panel dapat digunakan untuk meminimalkan bias yang mungkin ditimbulkan oleh agregasi data individu.
- f. Data panel dapat mendeteksi lebih baik dan mengukur dampak yang secara terpisah di observasi dengan menggunakan data *time series* ataupun *cross sectional*.

Dalam melakukan analisis regresi data panel untuk menguji pengaruh PDRB perkapita, tingkat kemiskinan, jumlah penduduk, tingkat pengangguran terbuka terhadap ketimpangan distribusi pendapatan (gini rasio), peneliti melakukan beberapa tahapan diantaranya: pemilihan model regresi data panel (model efek

⁷Agus Tri Basuki dan Nano Prawoto, *Analisis Regresi*, 281.

umum, model efek tetap, model efek random), pengujian asumsi klasik model dan pengujian hipotesis.

1. Pemilihan Model Regresi Data Panel

Dalam analisis regresi data panel terdapat tiga cara untuk mengestimasi parameter model dengan data panel yaitu:⁸

a. Model Efek Umum (*Common Effect Model*)

Common Effect Model merupakan pendekatan model data panel yang paling sederhana karena hanya mengombinasikan data *time series* dan *cross sectional* dan mengestimasi dengan menggunakan pendekatan kuadrat terkecil (*Ordinary Least Square/OLS*). Model ini menganggap bahwa intersep dan slop dari setiap variabel sama untuk setiap objek.

b. Model Efek Tetap (*Fixed Effect Model*)

Metode efek tetap ini dapat menunjukkan perbedaan antar objek meskipun dengan koefisien regresor yang sama. Model ini dikenal dengan model regresi Fixed Effect (efek tetap). Efek tetap ini dimaksudkan adalah bahwa satu objek, memiliki konstan yang tetap besarnya untuk berbagai periode waktu. Demikian juga dengan koefisien regresinya, tetap besarnya dari waktu ke waktu (*time invariant*).

Keuntungan metode efek tetap ini adalah dapat membedakan efek individual dan efek waktu dan tidak perlu mengasumsikan bahwa komponen error tidak berkorelasi dengan variabel bebas yang mungkin sulit dipenuhi. Dan kelemahan metode efek tetap ini adalah ketidaksesuaian model dengan

⁸Nachrowi Djalal Nachrowi dan Hardius Usman, *Pendekatan Populer dan Praktis Ekonometrika untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan*, (Jakarta: Badan Penerbit Universitas Indonesia, 2006), 311.

keadaan yang sesungguhnya. Kondisi tiap objek saling berbeda, bahkan satu objek pada suatu waktu akan sangat berbeda dengan kondisi objek tersebut pada waktu yang lain.

c. Model Efek Random (*Random Effect Model*)

Keputusan untuk memasukkan variabel boneka dalam model efek tetap (*fixed effect*) tidak dapat dihindari akan dapat menimbulkan konsekuensi (*trade off*). Penambahan variabel boneka ini akan dapat mengurangi banyaknya derajat kebebasan (*degree of freedom*) yang pada akhirnya akan mengurangi efisiensi dari parameter yang diestimasi. Model panel data yang di dalamnya melibatkan korelasi antar error term karena berubahnya waktu karena berbedanya observasi dapat diatasi dengan pendekatan model komponen eror (*error component model*) atau disebut juga model efek acak (*random effect*).

Dalam penentuan pemilihan model regresi data panel yang sesuai untuk penelitian ini, peneliti melakukan beberapa pengujian diantaranya sebagai berikut:⁹

a. Uji Chow (Chow Test)

Uji Chow adalah pengujian yang digunakan untuk memilih model yang sesuai antara *Ordinary Least Square* atau *Fixed Effect Model*. Pengujian ini mengikuti distribusi F-statistik. Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H_0 = *Ordinary Least Square* (OLS)

H_a = *Fixed Effect Model* (FEM)

⁹Agus Widarjono, *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2009), 49-50.

Apabila nilai prob.F-hitung lebih kecil dari taraf signifikansi $\alpha=0,05$ berarti menolak H_0 . Dengan kata lain menerima H_a yang menyatakan bahwa estimasi dengan *Fixed Effect Model* lebih baik dibandingkan estimasi dengan *Ordinary Least Square*. Sedangkan apabila nilai prob.F-hitung lebih besar dari taraf signifikansi $\alpha=0,05$ maka menerima H_0 yang berarti estimasi dengan *Ordinary Least Square* lebih baik dibandingkan dengan *Fixed Effect Model*.

b. Uji Hausman (*Hausman Test*)

Uji Hausman dilakukan untuk menentukan model yang paling baik antara *Fixed Effect Model* atau *Random Effect Model*. Pengujian ini mengikuti distribusi chi-square pada derajat bebas $(k-1)$, hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut

$H_0 = \text{Fixed Effect Model (FEM)}$

$H_a = \text{Random Effect Model (REM)}$

Statistik Uji Hausman ini mengikuti distribusi statistik Chi- Square dengan degree of freedom sebanyak k , dimana k adalah jumlah variabel independen. Jika nilai statistik Hausman lebih besar dari nilai kritis ($\alpha=0,05$) maka H_0 ditolak dan model yang tepat adalah *Random Effect Model*, sedangkan sebaliknya bila nilai statistik Hausman lebih kecil dari nilai kritisnya maka model yang tepat adalah *Fixed Effect Model*.

c. Uji Lagrange Multiplier (LM)

Lagrange Multiplier (LM) adalah uji untuk mengetahui apakah *Random Effect Model (REM)* atau *Ordinary Least Square (OLS)* metode yang paling tepat digunakan. Uji signifikansi Random Effect Model ini

dikembangkan oleh Breusch Pagan. Metode Breusch Pagan untuk uji signifikansi Random Effect didasarkan pada nilai residual dari metode OLS.

Uji LM ini didasarkan pada distribusi chi square dengan derajat bebas sebesar jumlah variabel independen. Hipotesis yang digunakan adalah :

$H_0 = \text{Random Effect Model (REM)}$

$H_a = \text{Ordinary Least Square (OLS)}$

Jika nilai statistik LM lebih besar dari nilai kritis ($\alpha=0,05$) maka H_0 ditolak dan model yang tepat adalah *Ordinary Least Square (OLS)*, sedangkan sebaliknya bila nilai statistik Hausman lebih kecil dari nilai kritisnya maka model yang tepat adalah *Random Effect Model (REM)*.

2. Pegujian Asumsi Klasik

Setelah mendapatkan model yang tepat untuk pengestimasian regresi data panel, dilakukan pengujian asumsi klasik dengan tujuan agar memberikan kepastian bahwa persamaan regresi data panel yang didapatkan memiliki ketepatan dalam estimasi, tidak bias dan konsisten. Pegujian asumsi klasik yang dilakukan diantaranya:

a. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah residual variabel dependen dan independen berdistribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas ini menggunakan normality histogram. Uji normalitas melalui uji Jarque-Bera test (J-B test). Metode ini menggunakan perhitungan skewnes dan kurtosis. Nilai statistik JB didasarkan pada distribusi Chi Squared dengan derajat kebebasan (df) 2. Jika nilai probabilitas statistik JB lebih kecil

dari $\alpha=5$ persen maka terjadi permasalahan normalitas atau residual tidak didistribusikan secara normal dan sebaliknya.¹⁰

b. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas mula-mula dikemukakan oleh Rangner Fishher yang mempunyai arti hubungan linier sempurna antar variabel-variabel independen dalam suatu model regresi.¹¹

Multikolinearitas timbul akibat sifat-sifat yang terkadang dalam kebanyakan variabel ekonomi berubah sama sepanjang waktu dan penggunaan lag (*lagged values*) dari variabel-variabel dalam model regresi. Dengan adanya multikolinearitas, maka hasil estimasi regresi bersifat bias.¹² Uji multikolinearitas dapat diketahui dari nilai *variance inflation factor* (VIF). Jika nilai VIF lebih dari 10, maka terdapat multikolinearitas. Namun jika kurang dari 10, maka multikolinearitas tidak terdapat dalam model.¹³ Dengan melihat nilai VIF, metode yang dapat digunakan untuk menguji terjadinya multikolinieritas dapat dilihat dari matrik korelasi variabel-variabel bebas. Pada matrik korelasi, jika antar variabel bebas terdapat korelasi yang cukup tinggi atau $> 0,90$, maka hal ini merupakan indikasi adanya multikolinieritas. Namun jika antar variabel bebas korelasinya $< 0,90$ maka tidak ada masalah multikolinieritas.¹⁴

¹⁰Agus Widarjono, *Ekonometrika: Teori Dan Aplikasi Untuk Ekonomi Dan Bisnis*. Edisi Kedua, (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UII, 2007), 54.

¹¹ Domodar N gurajanti, *Ekonometrika Dasar*, (Jakarta: Erlangga, 1998) , 57.

¹² Domodar N gurajanti, *Ekonometrika ...*, 162-163.

¹³Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2013), 105.

¹⁴Imam Ghozali, *Aplikasi ...*, 106.

c. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah variansi data yang digunakan untuk membuat model menjadi tidak konstan. Pengujian terhadap ada tidaknya masalah heteroskedastisitas dalam suatu model empiris yang sedang diamati juga merupakan langkah penting sehingga dapat terhindar dari masalah regresi langsung. Metode yang sering digunakan untuk dapat mendeteksi ada tidaknya masalah heteroskedastisitas adalah uji white. Metode tersebut juga dapat dilakukan dengan adanya *cross term* maupun tanpa adanya *cross terms*. Menurut Widarjono, pengambilan keputusan dengan metode uji white dilakukan jika¹⁵: nilai *chi square* hitung $< \text{chi squares}$ tabel atau probabilitas *chi squares* > taraf signifikansi, maka tidak menolak H_0 atau tidak ada heteroskedastisitas. Namun *chi squares* hitung $> \text{chi squares}$ tabel atau probabilitas *chi squares* < taraf signifikansi, maka menolak H_0 atau ada heteroskedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Autokorelasi ialah adanya korelasi antara variabel itu sendiri, pada pengamatan yang berbeda waktu atau individu. Umumnya permasalahan autokorelasi ini biasa terjadi pada data time series.¹⁶ Untuk mendeteksi terdapatnya masalah autokorelasi digunakan metode *lagrange multiplier*. Pengambilan keputusan metode *lagrange multiplier* dilakukan jika:¹⁷ jika nilai *chi squares* hitung $< \text{chi squares}$ tabel atau probabilitas *chi squares* > taraf signifikans, maka tidak menolak H_0 atau tidak terdapat autokorelasi.

¹⁵Agus Widarjono, *Ekonometrika: Teori Dan Aplikasi...*,141.

¹⁶Nachrowi Djalal Nachrowi, *Penggunaan Teknik Ekonometrika*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008) , 135.

¹⁷Agus Widarjono, *Ekonometrika: Teori Dan Aplikasi...*,162.

Jika nilai *chi squares* hitung > *chi squares* tabel atau probabilitas *chi squares* < taraf signifikansi, maka tolak H_0 atau terdapat autokorelasi.

3. Pengujian Hipotesis

Setelah model regresi data panel terbebas gejala asumsi klasik, tahap selanjutnya dilakukan pengujian hipotesis yang terdiri dari uji simultan, uji signifikansi, dan koefisien determinasi. Pada suatu pengujian hipotesis jika menggunakan $\alpha = 5\%$, maka artinya peneliti memiliki keyakinan bahwa dari 100% sampel, probabilitas anggota sampel yang tidak memiliki karakteristik adalah 5%. Berdasarkan teori tersebut, maka pengujian ini dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi 0,05 ($\alpha = 5\%$). Tahap-tahap pengujian hipotesis sebagai berikut:

a. Uji Simultan (Uji F- Statistik)

Uji F-statistik menunjukkan apakah semua variabel independen dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependennya. Ketentuan penolakan atau penerimaan hipotesis uji simultan :

H_0 = PDRB perkapita, tingkat kemiskinan, jumlah penduduk dan tingkat pengangguran terbuka secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan

H_a = PDRB perkapita, tingkat kemiskinan, jumlah penduduk dan tingkat pengangguran terbuka berpengaruh signifikan secara simultan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan

Pengujian simultan ini dilakukan dengan uji F. Uji-F dilakukan dengan cara Quick Look, yaitu: melihat nilai probability. Jika nilai probability < 0,05 atau $\alpha = 5\%$ persen yang berarti variabel independen secara bersama-sama signifikan mempengaruhi variabel dependen, maka menolak H_0 dan

menerima H_a . Tetapi jika nilai probability $> 0,05$ atau $\alpha=5$ persen yang berarti variabel independen secara bersama-sama tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen, maka menerima H_0 dan menolak H_a .¹⁸

b. Uji Parsial (Uji t-Statistik)

Uji t-statistik menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Untuk pengujian pengaruh parsial digunakan rumusan hipotesis sebagai berikut:

H_0 = PDRB perkapita, tingkat kemiskinan, jumlah penduduk dan tingkat pengangguran terbuka secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.

H_a = PDRB perkapita, tingkat kemiskinan, jumlah penduduk dan tingkat pengangguran terbuka berpengaruh signifikan secara parsial terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.

Untuk melakukan uji-t dengan cara Quick Look, yaitu: melihat nilai probability. Jika nilai probability $< 0,05$ atau $\alpha=5$ persen, maka menolak H_0 dan menerima H_a , yang berarti variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Namun jika nilai probability $>0,05$ atau $\alpha=5$ yang berarti variabel independen secara individual tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, maka menerima H_0 dan menolak H_a .

¹⁸ Mudrajat Kuncoro, *Metode Untuk Bisnis dan Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 2003), 219.

c. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen baik secara parsial maupun simultan. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu, nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas dan nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.¹⁹ Koefisien determinasi dapat dirumuskan sebagai berikut:²⁰

$$KD = R^2 \times 100 \%$$

Keterangan: KD= Koefisien determinasi

R^2 = Koefisien korelasi yang dikuadratkan.

¹⁹ Nachrowi Djalal Nachrowi, *Penggunaan* ..220.

²⁰ Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif*...,257.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Latar Penelitian

Daerah Sumatera Barat terletak di pantai barat tengah dengan daerah meliputi daratan dan daerah kepulauan. Posisi Sumatera Barat terletak antara 0°54" Lintang Utara dan 3°30" Lintang Selatan serta 98°36' dan 101°53" bujur timur dengan luas wilayah sekitar 42.229,13 km², luas tersebut setara dengan 2,18 persen dari luas wilayah Negara Republik Indonesia.

Sumatera Barat terletak pada bagian tengah sebelah barat pulau Sumatera, berbatasan dengan propinsi Sumatera Utara di sebelah utara, Propinsi Jambi dan Bengkulu sebelah selatan, Propinsi Riau di sebelah timur dan Samudera Hindia di sebelah barat.

Kondisi alam Sumatera Barat diliputi oleh kawasan hutan yaitu sekitar 60,59 persen dari keseluruhan. Sedangkan luas lahan yang sudah dimanfaatkan untuk budidaya pertanian sekitar 28,55 persen. Propinsi Sumatera Barat terdiri dari 12 kabupaten dan 7 kota. Diantara 19 kabupaten/kota terbagi dalam 144 kecamatan yang seluruhnya terbagi lagi atas 53 nagari dan 1974 kelurahan.

Ketinggian permukaan daratan propinsi Sumatera Barat sangat bervariasi, sebagian daerahnya berada pada daerah dataran tinggi kecuali Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman dan Kota Padang.

Kondisi alam Sumatera Barat sampai saat ini masih diliputi oleh kawasa hutan lindung yang mencapai sekitar 45,17 persen dari luas keseluruhan. Sedangkan lahan yang sudah dimanfaatkan untuk budidaya baru tercatat sekitar 54,82 persen. Daratan Sumatera Barat tidak terlepas dari gugusan gunung dan pegunungan yang terdapat di hampir semua kabupaten, yaitu ada sekitar 17 gunung. Gunung yang paling tinggi di Sumatera Barat yaitu Gunung Talamau dengan ketinggian 2.912 meter yang terletak di Kabupaten Pasaman. Sumatera Barat juga memiliki danau yang berjumlah sekitar 4 danau, satu berada di Kabupaten Agam yaitu Danau Maninjau dan tiga lainnya berada di Kabupaten Solok. Danau Singkarak merupakan danau terluas yaitu sekitar 13.011 ha.

Secara umum Propinsi Sumatera Barat beriklim sedang dengan temperatur antara 32°C sampai 36°C dengan curah hujan rata-rata lebih dari 2000 mm per tahun. Hujan kebanyakan turun pada bulan September sampai Februari.

B. Paparan Data Penelitian

Pada bagian ini disajikan deskripsi dari variabel penelitian. Adapun PDRB Perkapita, Tingkat Kemiskinan, Pertumbuhan Jumlah Penduduk, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Ketimpangan Distribusi Pendapatan (Gini Rasio). Berikut adalah gambaran umum variabel penelitian.

1. PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Perkapita

PDRB per kapita merupakan salah satu indikator yang digunakan sebagai ukuran kesejahteraan penduduk secara kasar. PDRB per kapita dapat pula dipandang sebagai hasil aktivitas perekonomian masyarakat. Perkembangan PDRB per kapita secara riil atau dihitung atas dasar harga konstan 2010 di Provinsi Sumatera Barat,

terus mengalami kenaikan setiap tahunnya di setiap kabupaten/kota. Adapun perkembangan PDRB Perkapita dapat dilihat pada tebal 4.1 di bawah ini.

Tabel 4.1
PDRB Perkapita Sumatera Barat Menurut Kabupaten/Kota 2011-2017

Kab/Kota	Tahun							Rata-rata
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Kep. Mentawai	25654.27	26436.92	27324.95	28237.57	29106.81	29985.22	30914.55	28237.18
Pesisir Selatan	14336.75	15032.08	15783.3	16557.41	17362.7	18140.35	18979.09	16598.81
Kab.Solok	18269.34	19289.7	20218.43	21228.48	22221.84	23242.36	24317.53	21255.38
Sijunjung	21232.36	22100.78	23032.89	23969.39	24879.05	25758.04	26667.38	23948.56
Tanah Datar	18734.11	19726.65	20822.98	21963.65	23063.8	24168.67	25343.33	21974.74
Padang Pariaman	22138.59	23288.03	24567.45	25882.25	27296.62	28626.28	30049.87	25978.44
Agam	20517.31	21587.87	22723.29	23864.56	24971.43	26119.29	27334.93	23874.1
Lima Puluh Kota	20429.67	21452.3	22543.95	23648.27	24717.75	25796.9	26920.25	23644.16
Pasaman	15785.28	16530.19	17281.92	18088.06	18840.12	19585.14	20364.58	18067.9
Solok Selatan	17599.26	18291.4	19026.58	19770.09	20449.71	21110.57	21812.04	19722.81
Dharmasraya	24412.93	25134.2	25986.05	26837.17	27607.66	28303.18	29064.52	26763.67
Pasaman Barat	19661.46	20422.53	21249.05	22044.3	22805.82	23536.23	24301.23	22002.95
Padang	32255.9	33722.09	35423.25	37166.59	39004.15	40841.67	42821.65	37319.33
Kota Solok	29678.48	31025.28	32324.01	33591.52	34895.21	36254.76	37625.6	33627.84
Sawahlunto	30994.85	32294.73	33945.84	35626.84	37377.37	39171.56	41006.29	35773.93
Padang Panjang	34030.41	35515.43	37128.21	38858.43	40602.89	42275.52	44124.93	38933.69
Bukittinggi	33529	35055.07	36567.09	38114.7	39736.53	41448.71	43244.68	38242.25
Payakumbuh	23158.89	24260.05	25400.76	26606.46	27780.18	29023.63	30329.03	26651.29
Pariaman	28572.34	29924.14	31302.37	32789.61	34238.82	35737.87	37342.52	32843.95
Sumatera Barat	21584.91	22638.75	24857.64	25982.83	27044.14	28164.93	29310.69	25654.84

Sumber: BPS Sumatera Barat (ribu rupiah)

Pada tabel di atas terlihat Kota Padang Panjang memiliki tertinggi perkembangan PDRB Perkapita rata-rata Rp 38.933.690 setiap tahunnya. Tingginya angka tersebut di peroleh dari peningkatan harga barang dan jasa secara bervariasi di Kota Padang Panjang yang berpengaruh terhadap nilai nominal PDRB Kota Padang

Panjang, selain itu rendahnya pertumbuhan jumlah penduduk juga menjadi penyebab besarnya angka PDRB Perkapita di kota ini.¹

Selanjutnya dua kota yang juga mempunyai angka PDRB Perkapita yang tinggi yaitu Kota Bukittinggi rata-rata sebesar Rp 38.486.850 per tahun dan Kota Padang rata-rata sebesar Rp 37.581.830 per tahun. Hal yang menyebabkan kedua kota ini memiliki angka PDRB Perkapita yang lumayan tinggi yaitu banyaknya faktor produksi yang tersedia, selain itu kedua kota ini merupakan pusat industri Provinsi Sumatera Barat.²

Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pesisir Selatan adalah dua kabupaten di Provinsi Sumatera Barat yang angka PDRB Perkapitanya tercatat paling rendah rata-rata sebesar Rp 18.174.330 dan Rp 16.709.900 per tahun. Penyebab PDRB Perkapita kedua kabupaten ini rendah adalah kurang modal serta lemahnya kemampuan sumberdaya manusia, baik aparatur maupun pelaku ekonomi secara konsepsional, profesuinal dan teknik dalam mengelola faktor produksi.³

2. Tingkat Kemiskinan

Kondisi kemiskinan dapat dilihat dari banyaknya jumlah penduduk miskin, yaitu penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan yang ada di kota/kabupaten Provinsi Sumatera Barat periode tahun 2011 sampai tahun 2017. Tebel 4.2 di bawah memperlihatkan kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat.

¹BPS: PDRB Padang Panjang Lebih Sumbar, <https://sumbar.antaraneews.com/berita/119902/bps-pdrb-padang-panjang-lebihi-sumbar>, diakses tanggal 25 Mei 2019.

² BPS, Statistik Daerah 2015.

³ BAPPENAS, Profil Kegiatan Pengembangan Ekonomi Lokal Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota 2012, 39. [http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/157807-\[Konten%20D930.pdf](http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/157807-[Konten%20D930.pdf), diakses tanggal 25 Mei 2019.

Tabel 4.2

Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten /Kota di Sumatera Barat 2011-2017

Kab/Kota	Tahun							Rata-rata
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Kep.Mentawai	14.6	13.4	13.3	12.58	13.16	13.09	12.95	13.30
Pesisir Selatan	42.4	38.2	38.3	35.02	38.13	35.86	35.53	37.63
Kab.Solok	39.5	35.7	36.9	34.48	36.42	34.06	33.33	35.77
Sijunjung	20.3	18.6	18.4	17	17.12	17.12	16.83	17.91
Tanah Datar	22.6	20.4	19.8	18.22	18.22	19.63	19.27	19.73
Padang Pariaman	44.6	40.4	36.8	33.92	36.34	36.34	34.7	37.58
Agam	43.3	39.3	36.1	33.28	36.06	37.55	36.57	37.45
Lima Puluh Kota	35.2	31.9	30	27.42	28.76	28.57	26.93	29.82
Pasaman	26.8	24.3	22.2	20.33	21.88	20.83	20.38	22.39
Solok Selatan	15.5	14.2	12.6	11.56	11.95	11.91	11.89	12.80
Dharmasraya	19.6	18.2	16.4	15.22	15.89	16.24	15.63	16.74
Pasaman Barat	33.8	31.1	31.1	28.59	32.34	30.76	30.84	31.23
Padang	50.9	45.9	44.2	40.7	44.43	42.56	43.75	44.63
Kota Solok	4	3.7	2.9	2.71	2.72	2.59	2.5	3.02
Sawahlunto	1.4	1.3	1.4	1.34	1.34	1.34	1.23	1.33
Padang Panjang	3.5	3.2	3.3	3.23	3.44	3.47	3.22	3.34
Bukittinggi	7.3	6.7	6.4	6	6.54	6.81	6.75	6.64
Payakumbuh	12	11	9.7	8.85	8.51	8.35	7.72	9.45
Pariaman	4.5	4.1	4.4	4.3	4.58	4.47	4.49	4.40

Sumber: BPS Sumbar (ribu jiwa)

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk kemiskinan di kabupaten /kota di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2011 sampai 2017 mengalami penurunan. Penurunan jumlah penduduk miskin ini tentunya tidak terlepas dari program pemerintah untuk masyarakat miskin, seperti bantuan sosial, beras dan lain sebagainya.⁴ Pada tabel diatas terlihat bahwa tahun 2015 jumlah penduduk miskin di setiap kabupaten dan kota di Sumatera Barat mengalami kenaikan rata-rata kurang lebih sekitar 1 -1,5 ribu jiwa, tetapi hal ini tidak terjadi di Kabupaten Sawahlunto dimana jumlah penduduk miskin tidak mengalami perubahan

⁴Kemiskinan Sumbar Diklaim Menurun, <https://www.jawapos.com/jpg-today/15/01/2019/kemiskinan-sumbar-diklaim-menurun/>, diakses tanggal 25 Mei 2019.

dan Kota Payakumbuh mengalami penurunan jumlah penduduk miskin dari 8,85 ribu jiwa pada tahun 2014 menjadi 8,51 ribu jiwa pada tahun 2015. Kenaikkan jumlah penduduk miskin di tahun 2015 tersebut terjadi akibat perubahan garis kemiskinan (rata-rata pengeluaran perkapita perbulan yang digunakan untuk mengklasifikasikan penduduk kedalam golongan miskin atau tidak) dari Rp 330. 776 perbulan pada 2014 menjadi Rp 384.277 perbulan pada 2015.⁵

3. Pertumbuhan Jumlah Penduduk

Kesejahteraan penduduk adalah sasaran utama pembangunan. Sasaran ini tidak mungkin tercapai jika pemerintah tidak melakukan analisis yang serius dalam menyikapi permasalahan kepadatan penduduk yang tidak merata di seluruh wilayah Propinsi Sumatera Barat.

Penduduk adalah sumber daya yang sangat berguna dalam melakukan setiap kegiatan perencanaan pembangunan. Jumlah penduduk pada umumnya selalu mengalami perkembangan setiap tahunnya di Sumatera Barat. Pertumbuhan jumlah penduduk di Sumatera Barat mengalami peningkatan yang masih terkendali sejak tahun 2011 sampai 2017. Dilihat dari jumlah penduduk pada masing-masing kabupaten/kota di Sumatera Barat selama tahun 2011 sampai tahun 2017, dapat terlihat bahwa terjadi keragaman jumlah penduduk yang menghuni wilayah Sumatera Barat pada tabel 4.3 di bawah ini.

⁵Angka Kemiskinan di Sumbar Meningkat Jadi 379 Ribu Orang, <https://hariansinggalang.co.id/angka-kemiskinan-di-sumbar-meningkat-jadi-379-ribu-orang/>, diakses tanggal 25 Mei 2019.

Tabel 4.3

Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Sumatera Barat 2011-2017

Kab/Kota	Tahun							Rata-rata
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Kep.Mentawai	78215	79976	81840	83603	85416	87328	89242	83660
Pesisir Selatan	434884	438891	442681	446479	450487	454656	458652	446675.7
Kab.Solok	352814	355628	358383	361095	363946	366948	369804	361231.1
Sijunjung	206584	210675	214560	218588	222791	227082	231348	218804
Tanah Datar	340906	341911	342864	343875	344942	346142	347184	343974.9
Padang Pariaman	395420	398223	400890	403530	406332	409295	412090	403682.9
Agam	460818	465018	468970	472995	477221	481610	485815	473206.7
Lima Puluh Kota	353915	357772	361645	365389	369217	373312	377276	365503.7
Pasaman	257511	260674	263838	266888	270152	273510	276783	267050.9
Solok Selatan	147884	150885	153943	156901	160015	163245	166463	157048
Dharmasraya	198273	204510	210686	216928	223513	230327	237239	217353.7
Pasaman Barat	375314	384206	392907	401624	410827	420301	429795	402139.1
Padang	850306	863401	876670	889561	903312	917394	931268	890273.1
Kota Solok	60904	62198	63541	64819	66141	67530	68916	64864.14
Sawahlunto	57681	58419	58972	59608	60236	60904	61551	59624.43
Padang Panjang	47982	48719	49536	50208	50989	51794	52586	50259.14
Bukittinggi	113903	116075	118260	120491	122718	125051	127369	120552.4
Payakumbuh	119372	121502	123654	125690	127932	130191	132430	125824.4
Pariaman	80426	81501	82636	83610	84760	85905	87025	83694.71

Sumber : BPS Sumatera Barat (ribu jiwa)

Berdasarkan gambar diatas terlihat jelas jumlah penduduk yang tertinggi terdapat di Kota Padang rata-rata sebesar 890.273,1 jiwa. Hal ini dikarenakan kota Padang sebagai pusat industri yang banyak memberikan daya tarik kota seperti lapangan pekerjaan yang menjadi daerah pilihan penduduk dalam mencari pekerjaan. Kota Padang juga menyediakan fasilitas informasi, pendidikan, hiburan dan teknologi serta berbagai kegiatan lainnya yang dapat menambah tingkat pendapatan penduduk. Sedangkan jumlah penduduk terendah berada pada Kota Padang Panjang dengan persentase jumlah penduduknya rata-rata sebesar 50.259,1 jiwa, hal ini

disebabkan Kota Padang Panjang adalah daerah yang paling kecil luasnya sebesar 23,00 km².

4. Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran merupakan suatu permasalahan yang pasti terdapat di suatu daerah, salah satu komponen pengangguran adalah tingkat pengangguran terbuka. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah angka yang menunjukkan banyaknya pengangguran terhadap 100 penduduk yang masuk kategori angkatan kerja.⁶ Tingkat pengangguran yang dialami di setiap kabupaten/ kota di Sumatera Barat berbeda-beda. Perbedaan tersebut dapat dilihat pada tabel 4.4 di bawah ini.

Tabel 4.4
Tingkat Pengangguran Terbuka Kab/Kota Sumatera Barat 2011-2017

Kab/Kota	Tahun							Rata-rata
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Kep.Mentawai	2.97	4.86	0.4	1.66	1.25	0.25	1.96	1.91
Pesisir Selatan	10.07	8.9	11.03	9.58	11.69	12.69	5.95	10.01
Kab.Solok	5.93	4.55	5.75	3.55	3.97	2.39	6.05	4.60
Sijunjung	3.56	4.26	3.81	3.58	4.26	3.26	3.32	3.72
Tanah Datar	3.31	3.42	4.96	3.3	4.46	3.46	3.72	3.80
Padang Pariaman	9.43	7.32	7.36	7.84	5.8	4.8	6.65	7.03
Agam	4.96	3.69	5.43	5.56	6.05	5.05	4.23	4.99
Lima Puluh Kota	4.66	3.03	3.94	2.41	3.78	2,78	2.6	3.40
Pasaman	2.5	3.35	1.55	3.27	5.06	4.06	6.81	3.8
Solok Selatan	8.39	7.18	3.67	4.93	6.3	5.3	5.54	5.90
Dharmasraya	4.06	6.2	5.23	2.94	3.51	2.51	3.69	4.02
Pasaman Barat	5.16	7.1	6.49	8.17	3.79	2.79	3.99	5.35
Padang	16.9	12.35	14.1	12.28	14	13	9.44	13.15
Kota Solok	11.57	5.76	5.66	6.49	4.72	3.72	5.88	6.25
Sawahlunto	5.65	6.23	6.16	6.38	7.18	6.18	6.19	6.28
Padang Panjang	12.56	7.95	7.03	8.29	6.33	5.33	5.43	7.56
Bukittinggi	8.73	7.42	4.72	3.93	6.04	5,04	6.94	6.29
Payakumbuh	9.76	7.67	7.16	6.36	7.07	6.07	3.45	6.79
Pariaman	14.43	13.28	6.07	6.07	6.61	5.61	5.97	8.29

Sumber : BPS Sumatera Barat (persen)

⁶ BPS, 2013

Berdasarkan tabel di atas terlihat berfluktuatifnya tingkat pengangguran terbuka kabupaten/kota di Sumatera Barat dari tahun 2011 sampai tahun 2017. Kota yang mempunyai tingkat pengangguran terbuka yang paling tinggi di Provinsi Sumatera Barat adalah Kota Padang dengan rata-rata 13,15 persen per tahun, disusul dengan Kabupaten Pesisir Selatan dengan rata-rata 10,01 persen per tahun. Sedangkan 17 kabupaten/kota lainnya hanya memiliki persentase tingkat pengangguran terbuka rata-rata 7-3 persen tiap tahunnya.

Berdasarkan BPS Sumatera Barat tingkat pengangguran terbuka (TPT) didominasi oleh lulusan Diploma I/II/III sebesar 9,52 persen, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebesar 9,50 persen dan SMA sebesar 7,97 persen, dikarenakan ada penawaran tenaga kerja yang tidak terserab terutama pada tingkat pendidikan Diploma I/II/III dan SMK.⁷ Selain itu, jumlah TPT di perkotaan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pedesaan, dimana jumlah pengangguran di perkotaan sebesar 6,69 persen sedangkan wilayah pedesaan hanya sekitar 4,56 persen. Untuk wilayah perkotaan TPT mengalami peningkatan sebesar 0,06 poin dan pedesaan mengalami penurunan sebesar 0,15 poin, selain itu peningkatan jumlah pengangguran di perkotaan juga disebabkan oleh banyaknya masyarakat yang melakukan urbanisasi.⁸

5. Ketimpangan Distribusi Pendapatan (Gini Rasio)

Gini rasio adalah ukuran tinggi atau rendahnya ketimpangan distribusi pendapatan penduduk secara kuantitatif. Nilai gini rasio berkisar antara 0 dan 1, jika

⁷ BPS, Statistik Sumbar, 2018.

⁸ M. Fadil MZ, Tingkat Pengangguran Terbuka di Sumbar Didominasi Oleh Diploma, <https://covesia.com/archipelago/baca/53231/tingkat-pengangguran-terbuka-di-sumbar-didominasi-oleh-diploma>, diakses tanggal 26 Mei 2019.

$G < 0,3$ berarti memiliki ketimpangan yang rendah, $0,3 < G < 0,5$ berarti memiliki ketimpangan yang sedang dan jika $G > 0,5$ berarti memiliki ketimpangan yang tinggi. Tabel 4.5 di bawah ini memperlihatkan perkembangan gini rasio kabupaten /kota di Sumatera Barat selama tahun 2011 sampai tahun 2017.

Tabel 4.5
Gini Rasio Kabupaten/Kota Sumatera Barat Tahun 2011-2017

Kab/Kota	Tahun							Rata-rata
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Kep.Mentawai	0.33	0.34	0.33	0.31	0.28	0.31	0.32	0.31
Pesisir Selatan	0.26	0.28	0.26	0.29	0.28	0.27	0.3	0.27
Kab.Solok	0.29	0.36	0.28	0.25	0.29	0.31	0.29	0.29
Sijunjung	0.3	0.3	0.29	0.32	0.29	0.33	0.33	0.30
Tanah Datar	0.35	0.31	0.3	0.26	0.33	0.3	0.26	0.30
Padang Pariaman	0.31	0.31	0.28	0.29	0.3	0.26	0.28	0.29
Agam	0.28	0.31	0.27	0.27	0.31	0.29	0.28	0.28
Lima Puluh Kota	0.26	0.31	0.23	0.24	0.33	0.27	0.26	0.27
Pasaman	0.29	0.29	0.29	0.26	0.3	0.3	0.26	0.28
Solok Selatan	0.29	0.31	0.32	0.29	0.38	0.31	0.3	0.31
Dharmasraya	0.37	0.43	0.34	0.32	0.36	0.3	0.25	0.33
Pasaman Barat	0.27	0.28	0.26	0.26	0.29	0.31	0.29	0.28
Padang	0.3	0.33	0.37	0.33	0.35	0.35	0.34	0.33
Kota Solok	0.35	0.32	0.32	0.3	0.34	0.34	0.3	0.32
Sawahlunto	0.34	0.39	0.3	0.35	0.33	0.32	0.3	0.33
Padang Panjang	0.4	0.45	0.29	0.37	0.37	0.38	0.3	0.36
Bukittinggi	0.33	0.32	0.37	0.34	0.34	0.33	0.31	0.33
Payakumbuh	0.32	0.36	0.4	0.31	0.37	0.34	0.3	0.34
Pariaman	0.35	0.38	0.4	0.3	0.33	0.34	0.3	0.34

Sumber : BPS Sumatera Barat

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/ kota di Provinsi Sumatera Barat selama periode tahun 2011 sampai tahun 2017 dikategorikan rendah dan sedang. Delapan kabupaten /kota yang tergolong rendah ketimpangan distribusi pendapatannya yaitu: Kabupaten Lima Puluh Kota (0,27), Kabupaten Pesisir Selatan (0,27), Kabupaten Padang Pariaman (0,29), Kabupaten Pasaman (0,28), Kabupaten Pasaman Barat (0,28), Kabupaten Solok

(0,29) dan Kabupaten Agam (0,28). Selanjutnya kabupaten/kota yang digolongkan mempunyai ketimpangan distribusi pendapatan menengah ada sebelas diantaranya: Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Sijunjung (0,30), Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Kabupaten Solok Selatan (0,31), Kota Solok dan Kota Sawahlunto (0,32), Kota Bukittinggi, Kota Padang dan Kabupaten Dharmasraya (0,33), Kota Pariaman dan Kota Payakumbuh (0,34) serta Kota Padang Panjang (0,36).

C. Analisis Data

Untuk menganalisis data penelitian, terdapat beberapa langkah yang telah dilakukan oleh peneliti yaitu pemilihan model untuk regresi data panel, pengujian asumsi klasik serta pengujian hipotesis penelitian.

1. Pemilihan Model Regresi Data Panel

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel, yaitu data yang bersifat tahunan dan banyak menggunakan objek, yang dimulai dari tahun 2011-2017 dan 19 kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat. Dalam melakukan analisis model regresi data panel ini digunakan alat bantu *Software Eviews 9*. Dalam melakukan regresi data panel ini terdapat 3 model yaitu *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM) dan *Random Effect Model* (REM). Dalam menentukan model mana yang paling tepat untuk regresi data panel, maka dilakukan terlebih dahulu uji chow (memilih antara CEM dan FEM) dan uji haustman (memilih antara REM dan FEM). Hasil pengujian dalam pemilihan model yang tepat yaitu sebagai berikut:

a. Uji Chow

Uji chow dilakukan untuk memilih model yang paling tepat untuk digunakan antara model *common effect effect* dan *model fexed effect* menggunakan hipotesis berupa:

H_0 : Common Effect Model / Pooled OLS

H_a : Fixeed Effect Model

Dalam melakukan pengujian ini yaitu dengan melihat Prob. F-hitung. Apabila nilai Prob. F-hitung kurang dari $\alpha = 0,05$ maka menolak H_0 dan meriman H_a , sehingga model yang tepat digunakan dalam uji ini adalah *fixed effect*. Namun apabila nilai Prob. F-hitung lebih besar dari $\alpha = 0,05$ maka menerima H_0 dan menolak H_a , sehingga model yang tepat digunakan dalam penelitian ini adalah *common effect*.

Tabel 4.6
Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	2.758323	(18,110)	0.0006
Cross-section Chi-square	49.542814	18	0.0001

Nilai probabilitas Cross-section F dengan menggunakan perhitungan evIEWS 9 adalah sebesar 0.0006 yang berarti nilai prob. F-hitung lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. Maka dengan hasil regresi tersebut menunjukkan bahwa model yang tepat digunakan dalam uji chow ini adalah model *fixed effect*.

b. Uji Hausman

Dengan menggunakan Uji Hausman yaitu untuk memilih manakah model yang paling tepat digunakan antara *fixed effect model* dengan *random effect model* dengan menggunakan hipotesis berupa:

H_0 = Fixed Effect Model

H_a = Random Effect Model

Untuk memilih manakah model yang paling tepat digunakan dapat dilihat dari nilai Prob. Cross-section random. Apabila nilai Prob lebih besar dari $\alpha=0,05$ maka menolak H_0 dan menerima H_a , sehingga model yang tepat digunakan dalam penelitian ini adalah Random Effect Model (REM). Namun apabila nilai Prob lebih kecil dari $\alpha=0,05$ maka menerima H_0 dan menolak H_a , sehingga model yang tepat digunakan dalam penelitian ini adalah *fixed effect model* (FEM).

Tabel 4.7

Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	10.449193	4	0.0335

Sumber : Eviews 9, data diolah

Nilai probabilitas cross-section random dengan menggunakan perhitungan evIEWS 9 adalah sebesar 0.0335 kurang dari $\alpha=0,05$ sehingga menerima H_0 dan menolak H_a . Maka dengan menggunakan uji hausman, model yang paling tepat digunakan adalah model estimasi *fixed effect model* (FEM).

Dari kedua uji chow dan uji hausman yang telah dilakukan didapatkan model yang terbaik untuk penelitian ini adalah *fixed effect model (FEM)*. Sehingga hasil dari estimasi *fixed effect model* dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.8
Hasil Regresi Fixed Effect Model

Dependent Variable: LOGGR
Method: Panel Least Squares
Date: 11/02/19 Time: 20:51
Sample: 2011 2017
Periods included: 7
Cross-sections included: 19
Total panel (balanced) observations: 133

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-5.510561	3.540680	-1.556357	0.1225
LOGPDRBP	0.017955	0.020261	0.886182	0.3775
LOGTK	-0.002597	0.020336	-0.127700	0.8986
LOGJP	0.524303	0.294539	1.780082	0.0778
LOGTPT	-0.002556	0.032459	-0.078751	0.9374

Sumber: Eviews 9, data diolah

Berdasarkan tabel 4.8 di atas dapat disusun persamaan regresi ketimpangan distribusi pendapatan sebagai berikut:

$$\text{LogY} = -5,510561 + \text{Log}0,017955X_{1it} - \text{Log}0,002597X_{2it} + \text{Log}0,524303X_{3it} - \text{Log}0,002556X_{4it} + \epsilon$$

Dari persamaan regresi di atas, maka dapat dijelaskan persamaan tersebut sebagai berikut:

1) Variabel Independen

Nilai -5,510561 dapat diartikan bahwa apabila semua variabel independen (PDRB perkapita, tingkat kemiskinan, jumlah penduduk dan tingkat pengangguran terbuka) dianggap konstan atau tidak mengalami perubahan maka gini rasio (ketimpangan distribusi pendapatan) sebesar -5,510561%.

2) Variabel PDRB Perkapita

Koefisien regresi variabel PDRB Perkapita yang bernilai positif sebesar 0,017955 menjelaskan bahwa apabila terjadi peningkatan variabel PDRB perkapita sebesar 1% maka gini rasio akan meningkat sebesar 0,017955%.

3) Variabel Tingkat Kemiskinan

Koefisien regresi variabel tingkat kemiskinan yang bernilai negatif sebesar 0,002597 menjelaskan bahwa apabila terjadi peningkatan variabel tingkat kemiskinan sebesar 1% maka gini rasio akan menurun sebesar 0,002597 %.

4) Variabel Jumlah Penduduk

Koefisien regresi variabel jumlah penduduk yang bernilai positif sebesar 0,524303 menjelaskan bahwa apabila terjadi peningkatan variabel jumlah penduduk sebesar 1% maka gini rasio akan mengalami peningkatan sebesar 0,524303 %.

5) Variabel Tingkat Pengangguran Terbuka

Koefisien regresi variabel tingkat pengangguran terbuka yang bernilai negatif sebesar 0,002556 menjelaskan bahwa apabila terjadi peningkatan variabel tingkat pengangguran terbuka sebesar 1% maka gini rasio akan mengalami penurunan sebesar 0,002556 %.

2. Hasil Pengujian Asumsi Klasik

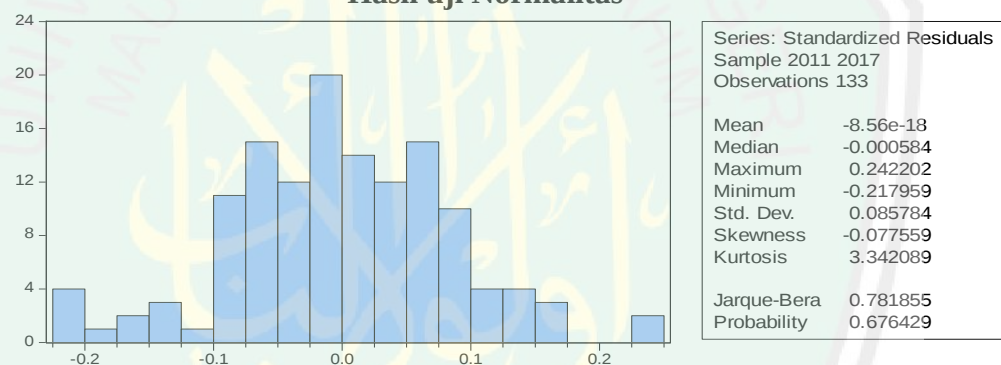
Setelah mendapatkan model regresi data panel yang tepat dalam penelitian ini (REM/ Random Effect Model), langkah selanjutnya dilakukan pengujian asumsi klasik pada model tersebut. Pengujian asumsi klasik yang telah

dilakukan yaitu: uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas serta uji autokorelasi.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi data panel (FEM), variabel terikat dan variabel bebas keduanya berdistribusi normal atau tidak. Pengambilan keputusan dengan Jargue-Bera test atau J-B test yaitu apabila nilai *probability* > 5%, maka variabel-variabel tersebut berdistribusi normal.

Gambar 4.1
Hasil uji Normalitas



Berdasarkan uji normalitas di atas, probabilitas sebesar 0.676429 menunjukkan bahwa $prob > \alpha = 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan variabel terikat dan variabel bebas pada penelitian ini telah terdistribusi secara normal.

b. Uji Multikolonieritas

Uji multikolinieritas bertujuan menguji apakah model regresi data panel (FEM) terdapat korelasi antar variabel bebas atau tidak. Uji ini dapat diketahui dari nilai *variance inflation factor* (VIF). Jika nilai VIF lebih dari 10, maka terdapat masalah multikolinieritas. Namun jika

nilai VIF kurang dari 10, maka multikolinieritas tidak terdapat dalam model.

Tabel 4.9
Hasil Uji Multikolinieritas Dengan Nilai VIF

Variance Inflation Factors

Date: 11/02/19 Time: 22:07

Sample: 1 133

Included observations: 133

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	0.138615	1673.809	NA
LOGPDRBP	0.000305	1077.311	1.101244
LOGTK	0.000297	333.9875	4.034730
LOGJP	0.000517	934.0337	4.075773
LOGTPT	0.000367	13.43640	1.037865

Sumber : Eviews 9, data diolah

Berdasarkan tabel di atas 4.9 nilai Centered VIF dari variabel bebasnya bervariasi. Semua variabel bebas memiliki nilai Centered VIF kurang dari 10. Hal ini menunjukkan tidak adanya gejala multikolinearitas. Sehingga model regresi data panel (FEM) pada penelitian ini tidak terdapat multikolinearitas. Untuk memperkuat hasil dari uji multikolinearitas, metode matrik korelasi variabel- variabel bebas juga digunakan dengan hasil sebagai berikut :

Tabel 4.10
Hasil uji Uji Multikolinieritas Dengan Matriks korelasi

	LOGPDRBP	LOGTK	LOGJP	LOGTPT
LOGPDRBP	1.000000	-0.268366	-0.287643	-0.097901
LOGTK	-0.268366	1.000000	0.863210	-0.024646
LOGJP	-0.287643	0.863210	1.000000	0.062891
LOGTPT	-0.097901	-0.024646	0.062891	1.000000

Berdasarkan tabel 4.10 terlihat bahwa nilai koreasi antar keseluruhan matrik variabel bebas bernilai $< 0,90$, sehingga dapat disimpulkan bahwa model FEM terbebas dari multikolinearitas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah residual dari model yang terbentuk memiliki varians yang konstan atau tidak. Untuk menentukan heteroskedastisitas dapat menggunakan uji statistik yaitu uji white. Jika nilai *chi squares* hitung $<$ *chi squares* tabel atau probabilitas *chi squares* $>$ $\alpha=0,05$, maka tidak ada masalah heteroskedastisitas. Namun jika nilai *chi squares* hitung lebih $>$ *chi squares* tabel atau probabilitas *chi squares* $<$ $\alpha=0,05$, maka terjadi masalah heteroskedastisitas.

Tabel 4.11
Uji Heteroskedastisitas Metode White

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic	0.381528	Prob. F(14,118)	0.9778
Obs*R-squared	5.759661	Prob. Chi-Square(14)	0.9722
Scaled explained SS	4.967543	Prob. Chi-Square(14)	0.9863

Sumber : Eviews 9, data diolah

Berdasarkan output di atas diketahui bahwa nilai probabilitas *chi squares* sebesar 0,9863. Nilai probabilitas *chi squares* lebih besar dari $\alpha=0,05$, artinya tidak terjadi heteroskedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Autokorelasi yaitu adanya korelasi yang terjadi antar observasi dalam satu variabel. Untuk mendeteksi masalah autokorelasi digunakan metode *langrange multiplier* (LM). Apabila nilai *chi squares*

hitung $< \chi^2$ tabel atau probabilitas $\chi^2 > \alpha=0,05$, maka tidak ada masalah heteroskedastisitas. Namun jika nilai χ^2 hitung lebih $> \chi^2$ tabel atau probabilitas $\chi^2 < \alpha=0,05$, maka terjadi masalah autokorelasi.

Tabel 4.12
Uji Autokorelasi Metode LM

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	2.155461	Prob. F(2,126)	0.1201
Obs*R-squared	4.399881	Prob. Chi-Square(2)	0.1108

Sumber: Eviews 9, data diolah

Berdasarkan tabel 4.11, diperoleh hasil berupa nilai probabilitas χ^2 sebesar 0,1460. Nilai tersebut lebih besar dari taraf signifikansi ($0,1460 > 0,05$), artinya tidak ada autokorelasi pada model regresi data panel ini (FEM).

3. Hasil Pengujian Hipotesis

Setelah model regresi data panel (FEM) pada penelitian ini telah lolos dari beberapa tahap pengujian asumsi klasik, maka langkah selanjutnya dilakukan pengujian hipotesis penelitian yang terdiri dari uji simultan, uji parsial dan koefisien determinasi. Hasil pengujian hipotesis penelitian ini sebagai berikut:

a. Uji Simultan (Uji F-Statistic)

Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen (PDRB perkapita, tingkat kemiskinan, jumlah penduduk dan tingkat pengangguran terbuka) dalam model random effect mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (ketimpangan distribusi pendapatan/gini rasio). Jika variabel bebas memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel terikat maka model persamaan regresi

masuk dalam kriteria cocok atau *fit*. Dimana hipotesis untuk pengujian simultan sebagai berikut:

H_0 = PDRB perkapita, tingkat kemiskinan, jumlah penduduk dan tingkat pengangguran terbuka secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan (gini rasio).

H_a = PDRB perkapita, tingkat kemiskinan, jumlah penduduk dan tingkat pengangguran terbuka berpengaruh signifikan secara simultan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan (gini rasio).

Kriteria pengambilan keputusan dari hipotesis ini adalah: H_0 diterima dan H_a ditolak, jika nilai $\text{sig} > \alpha$ dengan kata lain tidak signifikan pengaruh antara variabel independent terhadap variabel dependen. H_0 ditolak dan H_a diterima, jika nilai $\text{sig} < \alpha$ dengan kata lain signifikan pengaruh antara variabel independent terhadap variabel dependen.

Tabel 4.13
Hasil Uji Simultan

Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.506814	Mean dependent var	1.169027
Adjusted R-squared	0.408176	S.D. dependent var	0.122153
S.E. of regression	0.093972	Akaike info criterion	-1.735641
Sum squared resid	0.971384	Schwarz criterion	-1.235806
Log likelihood	138.4201	Hannan-Quinn criter.	-1.532527
F-statistic	5.138154	Durbin-Watson stat	2.226128
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Eviews 9, data diolah

Dari tabel 4.12 dapat diketahui bahwa nilai (F-statistic) adalah sebesar 0.000000. Dimana nilai F-statistic ini kurang dari $\alpha = 5\%$ ($0.000000 < 0.05$) sehingga hasil dari uji F ini adalah, maka menolak H_0 dan menerima H_a atau dengan kata lain, variabel PDRB perkapita,

tingkat kemiskinan, jumlah penduduk dan tingkat pengangguran terbuka secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel ketimpangan distribusi pendapatan (gini rasio).

b. Uji Parsial (Uji t-Statistik)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan apakah variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara parsial terhadap variabel dependen. Hipotesis pada pengujian parsial ini sebagai berikut:

H_0 = PDRB perkapita, tingkat kemiskinan, jumlah penduduk dan tingkat pengangguran terbuka secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan (gini rasio).

H_a = PDRB perkapita, tingkat kemiskinan, jumlah penduduk dan tingkat pengangguran terbuka berpengaruh signifikan secara parsial terhadap ketimpangan distribusi pendapatan (gini rasio).

Pengambilan keputusan pada pengujian parsial ini yaitu : H_0 diterima dan H_a ditolak, apabila nilai *Sig* lebih besar dari taraf nyata (5% atau 0,05) atau variabel bebas tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel terikat. H_0 ditolak dan H_a diterima, jika nilai *Sig*. lebih kecil dari taraf nyata nyata (5% atau 0,05) atau variabel bebas berpengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel terikat. Berikut adalah hasil output uji t :

Tabel 4.14
Hasil Uji Parsial

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-5.510561	3.540680	-1.556357	0.1225
LOGPDRBP	0.017955	0.020261	0.886182	0.3775
LOGTK	-0.002597	0.020336	-0.127700	0.8986
LOGJP	0.524303	0.294539	1.780082	0.0778
LOGTPT	-0.002556	0.032459	-0.078751	0.9374

Sumber : Eviews 9, data diolah

Pada tabel 4.13 diatas terlihat nilai probabilitas untuk variabel X1 yaitu PDRB perkapita sebesar 0,3775, maka menerima H_0 dan menolak H_a kerana angka probabilitas hitung lebih besar dari pada taraf signifikansi 5% yang berarti variabel PDRB perkapita berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap variabel ketimpangan distribusi pendapatan (gini rasio). Variabel X2 yaitu tingkat kemiskinan diperoleh probabilitas sebesar 0,8986, maka menerima H_0 dan menolak H_a karena angka probabilitas yang didapatkan lebih besar dari taraf signifikansi 5% yang berarti tingkat kemiskinan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap gini rasio. Variabel X3 yaitu jumlah penduduk diperoleh nilai probabilitas sebesar 0,0778 yang berarti menerima H_0 dan menolak H_a , disebabkan nilai probabilitas hitung kecil dari 0,05 dan dapat disimpulkan jumlah penduduk berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap gini rasio. Variabel X4 yaitu tingkat pengangguran terbuka nilai probabilitas sebesar 0,9374 yang berarti menerima H_0 dan menolak H_a dikarenakan nilai probabilitas hitung lebih besar dari taraf nyata (0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat

pengangguran terbuka berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap gini rasio.

c. Koefisien determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai (R^2) yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependennya. Dari tabel 4.12 terlihat nilai koefisien determinasi (R^2) dari penelitian ini adalah sebesar $0,506814 \times 100\%$ atau setara dengan 50,68%. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan variabel bebas yang terdiri dari PDRB perkapita, tingkat kemiskinan, jumlah penduduk dan tingkat pengangguran terbuka mampu menjelaskan ketimpangan distribusi pendapatan (gini rasio) di kabupaten/ kota di Sumatera Barat sebesar 50,68%. Sedangkan sisanya 48,32% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian ini.

BAB V

PEMBAHASAN

A. Analisis Tipologi Klassen

Analisis tipologi Klassen (*Klassen Typology*) adalah alat analisis yang biasa dipakai untuk mengetahui pengelompokan suatu wilayah berdasarkan dua indikator utama pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan perkapita daerah. Melalui analisis ini diperoleh empat karakteristik pola dan struktur pertumbuhan ekonomi yang berbeda, yaitu: daerah cepat-maju dan cepat-tumbuh (*high growth and high income*), daerah maju tapi tertekan (*high income but low growth*), daerah berkembang cepat (*high growth but low income*), dan daerah relatif tertinggal (*low growth and low income*).¹

Dengan menggunakan data laju PDRB perkapita dan PDRB perkapita dapat menjelaskan struktur ekonomi suatu wilayah berdasarkan daerah refensinya. Untuk mengetahui struktur ekonomi di Provinsi Sumatera Barat dapat digunakan data laju PDRB perkapita dan PDRB perkapita masing-masing kabupaten/kota yang dibandingkan dengan data laju PDRB perkapita dan PDRB perkapita Provinsi Sumatera Barat. Keadaan laju PDRB perkapita dan PDRB perkapita pada tiap-tiap kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel 5.1 dan tabel 5.2 di bawah ini.

¹Sjafrizal, *Ekonomi Regional*, 180.

Tabel 5.1

**Laju PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Kostan 2010 Kabupaten/Kota Di
Provinsi Sumatera Barat 2011-2017**

Kab/Kota	Tahun						Rata-rata
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Kep. Mentawai	3%	3,3%	3,3%	3%	3%	3%	3,1%
Pesisir Selatan	4,8%	4,9%	4,9%	4,8%	4,4%	4,6%	4,7%
Kab.Solok	5%	4,8%	4,9%	4,6%	4,5%	4,65	4,8%
Sijunjung	4%	4,2%	4%	3,7%	3,5%	3,5%	3,8%
Tanah Datar	5,2%	5,5	5,4%	5%	4,7%	4,8%	5,1%
Padang Pariaman	5,1%	5,4%	5,3%	5,45	4,8%	4,9%	5,2%
Agam	5,2%	5,2%	5%	4,6%	4,5%	4,6%	4,8%
Lima Puluh Kota	5%	5%	4,8%	4,5%	4,3%	4,3%	4,7%
Pasaman	4,7%	4,5\$	4,6%	4,1%	3,9%	3,9%	4,3%
Solok Selatan	3,9%	4%	3,9%	3,4%	3,2%	3,3%	3,6%
Dharmasraya	2,9%	3,3%	3,2%	2,8%	2,5%	2,65	2,9%
Pasaman Barat	3,8%	4%	3,7%	3,4%	3,2%	3,2%	3,5%
Padang	4,5%	5%	4,9%	4,9%	4,7%	4,85	4,8%
Kota Solok	4,5%	4,1%	3,9%	3,8%	3,8%	3,7%	4%
Sawahlunto	4,1%	5,1%	4,9%	4,9%	4,8%	4,6%	4,7%
Padang Panjang	4,3%	4,5%	4,6%	4,4%	4,1%	4,3%	4,4%
Bukittinggi	4,5%	4,3%	4,2%	4,2%	4,3%	4,3%	4,3%
Payakumbuh	4,7%	4,7%	4,7%	4,4%	4,4%	4,4%	4,5%
Pariaman	4,75	4,6%	4,7%	4,4%	4,3%	4,4%	4,5%
Sumatera Barat	4,8%	9,85	4,5%	4%	4,1%	4%	5,2%

Sumber: BPS Sumatera Barat, data diolah

Tabel 5.2

PDRB Perkapita Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat 2011-2017

Kab/Kota	Tahun							Rata-rata
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Kep. Mentawai	25654.27	26436.92	27324.95	28237.57	29106.81	29985.22	30914.55	28237.18
Pesisir Selatan	14336.75	15032.08	15783.3	16557.41	17362.7	18140.35	18979.09	16598.81
Kab.Solok	18269.34	19289.7	20218.43	21228.48	22221.84	23242.36	24317.53	21255.38
Sijunjung	21232.36	22100.78	23032.89	23969.39	24879.05	25758.04	26667.38	23948.56
Tanah Datar	18734.11	19726.65	20822.98	21963.65	23063.8	24168.67	25343.33	21974.74
Padang Pariaman	22138.59	23288.03	24567.45	25882.25	27296.62	28626.28	30049.87	25978.44
Agam	20517.31	21587.87	22723.29	23864.56	24971.43	26119.29	27334.93	23874.1
Lima Puluh K	20429.67	21452.3	22543.95	23648.27	24717.75	25796.9	26920.25	23644.16

Pasaman	15785.28	16530.19	17281.92	18088.06	18840.12	19585.14	20364.58	18067.9
Solok Selatan	17599.26	18291.4	19026.58	19770.09	20449.71	21110.57	21812.04	19722.81
Dharmasraya	24412.93	25134.2	25986.05	26837.17	27607.66	28303.18	29064.52	26763.67
Pasaman Barat	19661.46	20422.53	21249.05	22044.3	22805.82	23536.23	24301.23	22002.95
Padang	32255.9	33722.09	35423.25	37166.59	39004.15	40841.67	42821.65	37319.33
Kota Solok	29678.48	31025.28	32324.01	33591.52	34895.21	36254.76	37625.6	33627.84
Sawahlunto	30994.85	32294.73	33945.84	35626.84	37377.37	39171.56	41006.29	35773.93
Padang Panjang	34030.41	35515.43	37128.21	38858.43	40602.89	42275.52	44124.93	38933.69
Bukittinggi	33529	35055.07	36567.09	38114.7	39736.53	41448.71	43244.68	38242.25
Payakumbuh	23158.89	24260.05	25400.76	26606.46	27780.18	29023.63	30329.03	26651.29
Pariaman	28572.34	29924.14	31302.37	32789.61	34238.82	35737.87	37342.52	32843.95
Sumatera Barat	21584.91	22638.75	24857.64	25982.83	27044.14	28164.93	29310.69	25654.84

Sumber: BPS Sumatera Barat, data diolah

Tabel 5.3

**Pengelompokan Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Barat Menurut
Tipologi Klassen 2011-2017**

Daerah Berkembang Cepat ($r_i > r$ dan $y_i < y$) (Kuadran II)	Daerah Maju dan Cepat Tumbuh ($r_i > r$ dan $y_i > y$) (Kuadran I)
Pesisir Selatan, Kab. Solok, Agam, Lima Puluh Kota, Pasaman Barat.	Payakumbuh, Pariaman, Bukittinggi, Padang Panjang, Padang, Sawahlunto, Kota Solok, Dharmasraya, Padang Pariaman
Daerah Relatif Tertinggal ($r_i < r$ dan $y_i < y$) (Kuadran III)	Daerah Maju Tapi Tertekan ($r_i < r$ dan $y_i > y$) (Kuadran IV)
Tanah Datar, Pasaman, Solok Selatan	Kepulauan Mentawai

Sumber : Tabel 5.1 dan 5.2, data diolah

Berdasarkan tabel 5.3 di atas pengelompokan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat menurut tipologi klassen dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Daerah Cepat Maju dan Cepat Tumbuh

Daerah cepat-maju dan cepat-tumbuh, daerah yang memiliki tingkat laju pertumbuhan PDRB perkapita dan PDRB perkapita yang lebih tinggi dibanding rata-rata Provinsi Sumatera Barat. Terdapat 10 (sepuluh) daerah yang termasuk kategori daerah cepat maju dan cepat tumbuh yaitu Kota Payakumbuh, Kota Pariaman, Kota

Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kota Padang, Kota Solok, Kota Sawahlunto, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Padang Pariaman. Kesepuluh kabupaten/kota pada umumnya adalah daerah yang maju dari segi pembangunan atau kecepatan pertumbuhan.

2. Daerah Maju Tapi Tertekan

Daerah maju tapi tertekan, daerah yang memiliki PDRB perkapita lebih tinggi, tetapi tingkat laju pertumbuhan PDRB perkapita lebih rendah dibanding rata-rata Provinsi Sumatera Barat. Kabupaten Kepulauan Mentawai termasuk kabupaten maju tapi tertekan. Kabupaten ini adalah daerah yang relatif maju tetapi dalam beberapa tahun mengalami pertumbuhan yang relatif kecil, akibat tertekannya kegiatan utama kabupaten yang bersangkutan.

3. Daerah Berkembang Cepat

Daerah berkembang cepat yaitu daerah yang memiliki tingkat laju pertumbuhan PDRB perkapita tinggi, tetapi tingkat PDRB perkapita lebih rendah dibanding rata-rata Provinsi Sumatera Barat. Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, Kabupaten Agam, Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kabupaten Pasaman Barat adalah kabupaten yang mempunyai potensi yang besar tetapi belum diolah secara baik, sehingga meskipun pertumbuhannya cepat tetapi pendapatannya masih di bawah pendapatan rata-rata Propinsi Sumatera Barat. Hal ini mengindikasikan bahwa pendapatan kabupaten tersebut masih relatif rendah dibandingkan kabupaten/kota lain, sehingga untuk kedepannya harus terus dikembangkan agar memperoleh pendapatan per kapita yang tidak relatif rendah lagi.

4. Daerah Relatif Tertinggal

Daerah relatif tertinggal adalah daerah yang memiliki tingkat laju pertumbuhan PDRB perkapita dan PDRB perkapita yang lebih rendah dibanding rata-rata Provinsi Sumatera Barat. Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Solok Selatan adalah kabupaten didominasi rata-rata oleh sektor pertanian.

Disamping itu analisis Tipologi Klassen dapat digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan sektoral daerah. Analisis ini mendasarkan pengelompokkan suatu sektor dengan melihat pertumbuhan dan kontribusi sektor tertentu terhadap total PDRB (Pendapatan Domestik Regional Bruto) suatu daerah. Dengan menggunakan analisis Tipologi Klassen, suatu sektor dapat dikelompokkan ke dalam 4 kategori, yaitu: sektor prima, sektor potensial, sektor berkembang, dan sektor terbelakang.² Penentuan kategori suatu sektor ke dalam empat kategori di atas didasarkan pada laju pertumbuhan kontribusi sektoral dan rerata besar kontribusi sektoralnya terhadap PDRB, dapat ditunjukkan pada matrik berikut :

Tabel 5.4
Tipologi Klassen Berdasarkan Sektoral

Rerata kontribusi sektor terhadap PDRB Rerata laju pertumbuhan Sektoral	Y sektor > Y PDRB	Y sektor < Y PDRB
r sektor > r PDRB	Sektor Prima	Sektor Berkembang
r sektor < r PDRB	Sektor Potensial	Sektor Terbelakang

² Tri Widodo, *Perencanaan Pembangunan. Aplikasi Komputer (Era Otonomi Daerah)*. (Yogyakarta, UUP STIM YKPN, 2006), 94.

Keterangan: Y_{Sektor} = Nilai kontribusi sektor

Y_{PDRB} = Rata-rata PDRB

r_{Sektor} = Laju pertumbuhan sektor

r_{Sektor} = Laju pertumbuhan PDRB

Tabel 5.5
PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012-2017

Lapangan Usaha	Y SEKTOR	r Sektor
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	42076139.9	12,1%
Pertambangan dan Penggalian	78 91861.99	2,8%
Industri Pengolahan	17951196.4	5,2%
Pengadaan Listrik dan Gas	146747.695	15%
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	155825.882	9,2%
Konstruksi	15662704.2	9,8%
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	25399356.7	10,1%
Transportasi dan Pergudangan	20122309	10,7%
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2062293.97	7%
Jasa Keuangan dan Asuransi	5387477.51	6,5%
Real Estate	3394218.17	7,2%
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	10247556.5	9,1%
Jasa Pendidikan	6487546.22	17,2%
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2420610,21	5,7%
	159405844,3	11,92k%
	Y PDRB	r PDRB

Tabel 5.6
Tipologi Klassen Menurut Sektor Di Provinsi Sumatera Barat

Prima	Berkembang
1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 2. Jasa Pendidikan	1. Pengadaan listrik dan gas
(Potensial)	Relatif Tertinggal
1. Perdagangan Besar Dan Eceran 2. Transportasi Dan Pergudangan 3. Pertambahan Dan Penggalan 4. Jasa Keuangan Dan Asuransi 5. Real Estate 6. Jasa Kesehatan Dan Kegiatan Sosial 7. Industri Pengolahan 8. Penyediaan Akomodasi Dan Makan Minum	1. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah Dan Daur Ulang 2. Konstruksi 3. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan Dan Jaminan Sosial

1. Sektor Prima

Pertanian, kehutanan dan perikanan dan sektor jasa pendidikan di provinsi Sumatera Barat termasuk de dalam klasifikasi sektor prima. Hal ini berarti dua sektor ini mempunyai konstribusi sektoral yang lebih besar daripada konstribusi PDRB dan laju pertumbuhan sektoral yang lebih cepat daripada laju pertumbuhan PDRB Provinsi Sumatera Barat. Sebagai sektor- sektor prima ini mempunyai keunggulan lebih dan peranan yang penting dalam perekonomian Sumatera Barat.

Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan didukung oleh kondisi alam baik serta kondisi geografis Sumatera Barat, dimana 4 kabupaten /kota (Kab. Tanah Datar, Kab.Lima Puluh Kota, Kota Padang Panjang dan Kab Agam) terletak di daerah dataran tinggi dan 3 kabupaten /kota (Kota Pariaman, Kota Padang dan Kab. Pesisir Selatan) tertelak di daerah pesisir pantai. Sektor Jasa Pendidikan terletak di 3

kota (Kota Padang, Kota Bukittinggi dan Kota Padang Panjang) , dimana kota-kota ini memiliki pusat-pusat pendidikan baik yang formal maupun nonformal.

2. Sektor Potensial

Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Sektor Transportasi dan Pergudangan, Sektor Pertambangan dan Penggalian, Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi, Sektor Real Estate, Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, Sektor Industri Pengolahan serta Sektor Penyedia Akomodasi Makan Dan Minum, termasuk de dalam klasifikasi sektor potensial. Hal ini berarti sektor- sektor tersebut mempunyai kontribusi sektoral yang lebih besar pada PDRB, namun memiliki laju pertumbuhan yang lebih kecil daripada laju pertumbuhan PDRB Provinsi Sumatera Barat.

3. Sektor Berkembang

Sektor Pengadaan Listrik dan Gas termasuk dalam klasifikasi sektor berkembang. Kebutuhan akan sektor ini semakin lama semakin meningkat dari waktu ke waktu yang diakibatkan oleh permintaan masyarakat, pengembangan sektor ini terus ditingkatkan oleh pemerintah karena masih banyak wilayah di Sumatera Barat yang mengalami defisit dalam listrik dan gas.³

4. Sektor Relatif Tertinggal

Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, Sektor Konstruksi dan Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial, termasuk dalam klasifikasi sektor yang terbelakang. Hal ini berarti sektor tersebut merupakan sektor yang tertinggal dibandingkan sektor lainnya dan sektor ini lambah pertumbuhannya.

³ BPS, *Seri Analisis Pembangunan Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015*, 20.

B. Analisis Variabel Penelitian

Dari hasil penelitian pada bab IV didapat bahwa hubungan variabel PDRB perkapita, tingkat kemiskinan, jumlah penduduk dan tingkat pengangguran terbuka secara simultan berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan (gini ratio) sebesar 49,78% sedangkan 50,22 % ketimpangan distribusi pendapatan di Sumatera Barat dijelaskan oleh variabel-variabel diluar model penelitian seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), perbedaan sumber daya alam, infasi, ketidakmerataan pembangunan, investasi dan rendahnya mobilitas sosial.⁴ Namun secara persial hubungan antar variabel independen dengan variabel dependen mempunyai berpengaruh yang tidak signifikan. Hubungan parsial antara variabel tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengaruh PDRB Perkapita Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Dari estimasi model fixed effect, diketahui bahwasannya PDRB perkapita berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan (gini ratio), yang berarti apabila terjadi peningkatan PDRB perkapita pada setiap kabupaten/ kota di Sumatera Barat, maka ketimpangan distribusi pendapatan meningkat disebabkan hubungan antara kedua variabel positif. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh Hartini (2017) yang menemukan pengaruh PDRB Perkapita yang positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.⁵ Disamping itu, Rahma (2018) juga menyatakan bahwa PDRB Perkapita

⁴Adelman dan Moris dalam Lincolin Arsyad, *Ekonomi*, 288.

⁵Nita Tri Hartini, *Pengaruh PDRB Per Kapita, Investasi Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Ketimpangan Pendapatan Antar Daerah Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011-2015*, (Yogyakarta: UNY, 2017).

berpengaruh.⁶ Selain itu temuan penelitian sesuai dengan teori Kuznet menyatakan ada suatu hubungan antara pertumbuhan ekonomi (PDRB perkapita) dengan ketimpangan pendapatan, yang kemudian dikenal dengan hipotesis kurva U terbalik (*Inverted U-curve Hypothesis*).

PDRB atau PDRB perkapita merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi Sumatera Barat dalam suatu periode tertentu (2011-2017), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB perkapita menggambarkan kemampuan suatu wilayah dalam menghasilkan nilai tambah pada output yang dibagi dengan jumlah penduduk dari semua sektor ekonomi atau lapangan usaha. Salah satu sektor yang menjadi sektor unggulan di Sumatera Barat adalah sektor pertanian.⁷ Sumatera Barat merupakan provinsi yang struktur perekonomiannya banyak ditopang oleh sektor pertanian. Iklim dan kondisi wilayah Sumatera Barat sangat mendukung kegiatan pertanian, sehingga sektor ini tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan pangan dan industri di daerah tersebut tapi juga mampu mendukung kebutuhan daerah lain. Sehingga bukan hal yang mengherankan jika Sumatera Barat mampu menjadi salah satu produsen utama komoditi pertanian di Pulau Sumatera terutama sayur-sayuran dan buah-buahan. Pembangunan sektor pertanian akan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik yang pada akhirnya menciptakan kesejahteraan yang lebih baik bagi masyarakat Sumatera Barat.

⁶ Fergianwan Avriandaru, *Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Indeks Pembangunan Manusia, Pendidikan, Populasi Penduduk, Dan Pengangguran Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Provinsi Jawa Tengah Periode 2010-2015*, (Yogyakarta: UIN SUKA, 2018).

⁷ Yasmarni, *Analisis Bonus Demografi Sebagai Kesempatan Dalam Mengoptimalkan Pembangunan Pertanian Di Sumatera Barat*, *Agrisepe*, Vol 16 No.1 Maret 2016, 68.

Ketimpangan distribusi pendapatan di Sumatera Barat menunjukkan pemerataan di setiap kabupaten dan kota, hal ini dapat dilihat dari tabel 4.5 (pada bab IV) yang menyatakan bahwa gini rasio pada kabupaten dan kota di tahun 2011 sampai tahun 2017 rata-rata berkisar antara 0,28-0,34. Pemertaan distribusi pendapatan ini juga bisa diamati dari tabel 5.1 yang menggambarkan cukup meratanya pertumbuhan PDRB perkapita di kabupaten/kota di Sumatera Barat dengan rentang antara 5,3% sampai 6,4 %. Kondisi ini juga memberikan arti bahwa pembangunan tidaknya terjadi di kota-kota besar saja tetapi juga berlangsung merata di kabupaten/kota lainnya. Seperti di Kabupaten Pasaman yang kini sedang memprioritaskan pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, rumah sakit dan lain-lain untuk menunjang distribusi pendapatan daerah tersebut.⁸

Setiap kota/kabupaten di Sumatera Barat mempunyai potensi sumberdaya alam dengan sektor unggulan penyumbang PDRB yang berbeda-beda untuk mewujudkan pemerataan distribusi pendapatan dan pembangunan ekonomi di daerah tersebut. Seperti di daerah maju tapi tertekan dan daerah tertinggal yaitu Kabupaten Pasaman (sebesar 50,66 persen PDRB Kabupaten Pasaman disumbangkan oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan), Kabupaten Kepulauan Mentawai (sebesar 48,62 persen PDRB Kepulauan Mentawai disumbangkan oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan), dan Kabupaten Pesisir Selatan sebesar 40,45 persen PDRB Pesisir Selatan disumbangkan oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan).⁹ Sehingga ada keterkaitan antara PDRB perkapita yang dihasilkan dengan tingkat pendapatan

⁸2019, Pasaman Barat prioritaskan pembangunan infrastruktur, <https://sumbar.antaranews.com/>, diakses tanggal 28 September 2019.

⁹ BPS Sumatera Barat, *Perkembangan Ekonomi...*, 13.

yang diterima oleh masyarakat. Artinya, apa yang dihasilkan dari pembangunan perekonomian kabupaten/kota di Sumatera Barat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara umum, yang menyebabkan pemerataan distribusi pendapatan sekaligus menurunkan ketimpangan pendapatan.

2. Pengaruh Tingkat Kemiskinan Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Berdasarkan hasil analisis tingkat kemiskinan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat tahun 2011-201, pengaruh negatif temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Musafir (2012) dan Bantika (2015) yang jelas bahwa meningkatnya tingkat kemiskinan menjadikan ketimpangan distribusi pendapatan menurun.

Selain itu hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Sudarlan (2015) yang dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa tingkat kemiskinan tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.¹⁰ Penelitian lain yang dilakukan oleh Aryunah (2015) mengemukakan bahwa kemiskinan tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kesenjangan distribusi pendapatan di Kota Malang dikarenakan semakin pesat pembangunan ekonomi di Kota Malang.¹¹ Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Andiny dan Mandasari (2017) juga menemukan tidak signifikannya pengaruh tingkat kemiskinan dengan ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Aceh, hal ini disebabkan tinginya

¹⁰ Sudarlan, "Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan dan Kemiskinan di Indonesia". *Jurnal EKSIS*, Vol.11, 2015.

¹¹ Ratih Inge Aryunah, Analisis Kausalitas Kesenjangan Pendapatan, Kemiskinan Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Malang, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 2015.

tingkat kemiskinan dan pesentase penduduk miskin yang masih menganggur di provinsi tersebut.¹²

Ketimpangan distribusi pendapatan di kota/kabupaten Sumatera Barat berkurang setiap tahunnya di karenakan berdasarkan tempat tinggal gini rasio wilayah perkotaan selalu lebih tinggi dibandingkan wilayah kabupaten yang mempunyai banyak area pedesaan.¹³ Hal ini disebabkan kebutuhan hidup di kota lebih mahal dibandingkan di desa, penduduk desa sebagian besar penghasilan bekerja dari sektor pertanian. Sedangkan pendapatan yang diterima penduduk kota berasal dari sektor industri, sektor perdagangan, sektor jasa, sektor keuangan dan sektor transportasi. Kondisi ini yang akan membedakan pendapatan yang diperoleh penduduk di kota berbeda-beda dan menimbulkan ketidakmerataan distribusi pendapatan.

Tingkat kemiskinan yang terjadi di kota/kabupaten di Sumatera Barat disebabkan oleh pengeluaran masyarakat untuk makanan sebesar 75,91 persen dan pengeluaran untuk bukan makanan 24,09 persen pada tahun 2018. Dimana penyumbang kemiskinan terbesar di perkotaan adalah beras dengan andil 21,25 persen, rokok 15,57 persen, cabai merah 3,60 persen, telur ayam ras 3,31 persen, tongkol 3,06 persen, daging ayam ras 2,69 persen, roti 2,27 persen, gula pasir 1,86 persen dan tahu 1,34 persen. Sementara di kabupaten penyumbang garis kemiskinan yaitu beras dengan andil 27,51 persen, rokok 14,62 persen, cabai merah 3,60 persen, telur ayam ras 2,908 persen, tongkol 2,94 persen, roti 2,77 persen, daging ayam ras 2,25 persen, roti 2,77 persen, bawang merah 2,26 persen, gula pasir 2,38 persen dan

¹² Puti Andiny dan Pipit Mandasari, "Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan terhadap Ketimpangan Di Propinsi Aceh", *Jurnal Ekonomi Akuntansi* , Vol. 1, No.2 , 2017.

¹³ Berita resmi statistik "Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Sumatera Barat September 2018", No. 06/01/13/Th. XXII, 15 JANUARI 2019, diakses tgl 29 juli 2019.

tahu 1,25 persen.¹⁴ Selain itu dalam hal pemertaan distribusi pendapatan yang terjadi di kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat, rumah tangga miskin ternyata lebih merata dibandingkan distribusi pendapatan pada rumah tangga yang bukan berstatus miskin. Kondisi ini berkaitan dengan sumber pendapatan yang diterima oleh masing-masing rumah tangga. Besarnya pendapatan yang diterima rumah tangga pada kelompok rumah tangga miskin lebih homogen, karena sumber pendapatannya juga relatif merata, baik yang berasal dari pertanian maupun yang berasal dari mata pencaharian alternatif.¹⁵

Disamping itu, bantuan sosial yang diterima masyarakat miskin menjadi penyebab tingkat kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan mengalami penurunan.¹⁶ Bantuan sosial yang diberikan pemerintah pusat maupun pemerintah biasanya salurkan dalam bentuk Rastra dari Bulog, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH). Di kota/kabupaten Sumatera Barat bantuan sosial kepada masyarakat miskin guna melepaskan mereka dari belenggu kemiskinan serta memberikan peningkatan kesejahteraan hidup disalurkan dalam bentuk bantuan Usaha Ekonomi Produktif Kelompok Usaha Bersama (UEP. KUBE), jenis yang telah di kelola adalah: peternakan sapi, pencucian sepeda motor dan karpet, pertanian serta jahit dan bordir.¹⁷ Progam UEP. KUBE ini berjalan baik di kota/kabupaten di Sumatera Barat, hal ini terbukti bahwa pada tahun 2016

¹⁴Rita Diana, *Pengeluaran Untuk Konsumsi Penduduk Provinsi Sumatera Barat 2017-2018*, Padang : BPS Provinsi Sumatera Barat, 2019, 62.

¹⁵ Syamsul Amar, *Kajian Ekonomi Tentang Kemiskinan Di Perdesaan Propinsi Sumatera Barat*, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 7, No. 2, 2002, 108.

¹⁶ Abrian Duta Firmansyah, *Dampak Pemberian Bantuan Sosial Terhadap Pengentasan Kmiskinan dan Pengurangan Ketimpagan di Indonesia*, <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel>, diakses, tgl 5 Agustus 2019.

¹⁷ Zukhri, *Peningkatan Sosial Ekonomi Keluarga Fakir Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif Kelompok Usaha Bersama (UEP. KUBE) Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Keluarga*, <https://Sumbarprov.Go.Id>, Diakses, Tanggal 5 Agustus 2019.

Sumatera Barat menjadi terbaik nasional dalam penanganan fakir miskin. Pencapaian prestasi ini berkat bekerjasama pemerintah daerah dan dinas sosial Sumatera Barat dalam mendampingi, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan program agar berjalan optimal, dimana masyarakat miskin benar-benar merasakan manfaat dari program ini guna membantu meningkatkan penghasilan mereka. Disamping itu, Sumatera Barat lebih banyak memiliki daerah kabupaten yang mana penduduk miskin menempati daerah tersebut, ketimpangan distribusi pendapatan penduduk miskin tidak terlalu timpang karena pendapatan penduduk miskin cenderung homogen.

Dalam islam masalah ketimpangan distribusi pendapatan dapat diatasi dengan metode pendistribusian dana zakat yang dilakukan langsung oleh lembaga amil zakat. Fungsi lembaga zakat sangatlah penting karena lembaga ini bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat secara efektif. Salah satu lembaga zakat di Kota Padang yang bertugas untuk mengelola dana zakat yaitu BAZNAS Kota Padang. BAZNAS Kota Padang merupakan salah satu cabang dari BAZNAS Pusat untuk wilayah yang berada di Sumatera Barat. Pada tahun 2018 tercatat jumlah pendapatan yang diterima oleh BAZNAS Kota Padang sebesar Rp 22.116.168.208, dengan jumlah total mustahik 29.026 orang yang disebar melalui berbagai program berupa padang religius, sejahtera, sehat, cerdas, dan makmur.¹⁸ Melalui pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang telah dilakukan membawa dampak positif terhadap rumah tangga mustahik melalui peningkatan pendapatan rumah tangga mustahik dari rata-rata awalnya sebelum menerima bantuan zakat sebesar Rp 2.034.200, setelah mendapatkan bantuan zakat terjadi kenaikan sebesar

¹⁸ <https://pid.baznas.go.id/sumatera-barat/>

Rp 706.800 sehingga pendapatan rata-rata mustahik menjadi Rp 2.741.000.¹⁹ Jadi tingkat kemiskinan tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan disebabkan masyarakat miskin Sumatera Barat mendapatkan bantuan sosial dalam bentuk bantuan usaha yang dikelola dengan baik, sehingga kesejahteraan masyarakat miskin meningkat.

3. Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Hasil penelitian ini menyatakan jumlah penduduk berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di kabupaten/kota di Sumatera Barat pada tahun 2011-2017, hubungan positif pada temuan ini menunjukkan tinggi jumlah penduduk menyebabkan tingginya ketimpangan distribusi pendapatan di Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. Temuan penelitian ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Musafir (2012)²⁰ dan Bantika (2015)²¹ yang menjelaskan bahwa pertambahan jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.

Namun hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2015) yang mengemukakan bahwa tidak signifikannya pengaruh jumlah penduduk dengan ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia.²² Dan penelitian Anggina dan Artaningtyas (2017) juga menjelaskan bahwa pertumbuhan jumlah penduduk memberikan pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan

¹⁹ Geri Fernandes, *Analisis Dampak Pendistribusian Dana Zakat Sebagai Usaha Untuk Mengurangi Tingkat Kemiskinan Menggunakan Model CIBEST*, thesis Unand, 2019.

²⁰ Ma'mun Musfidar, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Sulawesi Selatan Tahun 2001-2010*, (Makassar: UNHAS, 2012).

²¹ Vredrich Bantika, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Sulawesi Utara*, *Jurnal Cocos*, Vol.6 No.17, (2015).

²² Izdiana Puspa Dewi, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Indonesia Periode 2009-2013", *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 2015.

distribusi pendapatan, tidak signifikkannya pengaruh dari pertumbuhan penduduk terhadap ketimpangan distribusi pendapatan dikarenakan tidak terjadi inflasi, dan secara proporsional diikuti dengan penambahan produksi barang-barang dan investasi antar wilayah tersebut, dengan demikian pertumbuhan penduduk tidak menyebabkan kesenjangan distribusi pendapatan.²³ Selain itu, penelitian Hartadi (2018) yang mengemukakan bahwa jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Jawa Tengah, karena besarnya jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah masih diimbangi dengan besarnya jumlah penduduk yang bekerja.²⁴

Salah satu indikator ekonomi makro untuk menilai tingkat pemerataan atau ketimpangan pendapatan penduduk adalah dengan menggunakan Indeks Gini atau Gini Rasio dan kriteria Bank Dunia. Pada kriteria Bank Dunia penduduk digolongkan menjadi 3 kelas yaitu 40 persen penduduk berpendapatan rendah, 40 persen penduduk berpendapatan sedang dan 20 persen penduduk berpendapatan tinggi. Penghitungan Gini Rasio dan kriteria Bank Dunia pada penelitian ini menggunakan pendekatan data pengeluaran, hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa data pengeluaran lebih teliti dari pada data pendapatan selain kesulitan teknis dalam pengumpulan data pendapatan rumah tangga secara langsung. Pada tahun 2018 pengeluaran penduduk dan gini rasio Sumatera Barat yaitu: 40 persen penduduk yang berpengeluaran rendah menerima 21,06 persen dari seluruh pendapatan, pada kelompok penduduk 40 persen berpengeluaran sedang menerima

²³Del Anggina dan Wahyu Dwi Artaningtyas, Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pertumbuhan Penduduk, Pertumbuhan Investasi, Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Daerah Istimewa Yogyakarta, *Buletin Ekonomi* , Vol.15, No. 1, (April 2017).

²⁴Ryan Hartadi, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Jawa Tengah*, (Yogyakarta: UIN SUKA, 2018).

37,78 persen dari seluruh pendapatan dan pada kelompok penduduk 20 persen berpengeluaran tinggi menerima 41, 17 persen dari seluruh pendapatan. Menurut hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) gini rasio di perkotaan dan pedesaan di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2018 tercatat 0,338 dan 0,280, angka tersebut menjelaskan bahwa ketimpangan distribusi pendapatan di daerah pedesaan Sumatera Barat lebih merata di dibandingkan pada daerah perkotaan.²⁵

Sesuai dengan data dari BPS Provinsi Sumatera Barat, jumlah penduduk Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2018 tercatat sebanyak 5,38 juta jiwa, dengan kepadatan penduduk rata-rata 127 orang per km² (kilometer persegi). Perbandingan penduduk laki-laki dan perempuan pada Sumatera Barat relatif seimbang. Penduduk dengan jenis kelamin laki-laki adalah 2,68 juta jiwa, sementara itu penduduk perempuan adalah 2,70 juta jiwa.²⁶ Perbandingan yang relatif seimbang ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan sedikit lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki. Struktur umur penduduk Sumatera Barat terbagi menjadi tiga kategori yaitu: kelompok umur penduduk muda yang mana persentase penduduk usia mudanya (di bawah 15 tahun) adalah 29,65 persen, kelompok umur penduduk tua (65 tahun ke atas) hanya 5,81 persen sedangkan kelompok penduduk usia produktif (berusia 15-64 tahun) 64,54 persen.

Jumlah penduduk kelompok usia produktif yang bekerja tahun 2018 mencapai 2,41 juta orang yang terdiri dari pekerja laki-laki mencapai 1,43 juta orang dan perempuan 980,86 ribu orang. Kelompok usia produktif ini lebih banyak bekerja di sektor pertanian, kehutanan dan perikanan selanjutnya diikuti oleh sektor

²⁵ Rita Diana, *Pengeluaran Untuk Konsumsi...*, 22-23.

²⁶ BPS Sumatera Barat, 2018, <https://sumbar.bps.go.id/>

perdagangan besar ataupun eceran (reparasi mobil dan sepeda motor).²⁷ Dalam kaitannya dengan bidang pekerjaan ini, Islam mendorong umatnya untuk memproduksi dan menekuni aktivitas ekonomi dalam segala bentuk seperti: pertanian, pengembalaan, berburu, industri, perdagangan dan lain-lain. Islam tidak semata-mata hanya memerintahkan untuk bekerja tetapi harus bekerja dengan lebih baik (insan), penuh ketekunan dan profesional. Insan dalam bekerja bukanlah suatu perkara yang sepele tetapi merupakan suatu kewajiban agama yang harus dipenuhi oleh tiap-tiap muslim. *“sesungguhnya Allah mencintai jika seseorang melakukan pekerjaan yang dilakukan secara itqan (professional)”* (HR. Baihaqi).²⁸

Menurut analisis tipologi Klassen, penduduk yang bekerja pada sektor pertanian, kehutanan serta perikanan ini adalah penduduk yang tinggal di daerah maju tapi tertekan (Kabupaten Kepulauan Mentawai) serta daerah berkembang cepat (Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, Kabupaten Agam, Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kabupaten Pasaman Barat) dan penduduk yang bekerja di sektor perdagangan rata-rata tinggal di daerah maju dan cepat tumbuh/daerah perkotaan. Sektor yang banyak menyerap tenaga kerja di daerah maju tapi tertekan dan daerah cepat berkembang ini merupakan sektor yang menjadi penyumbang terbesar PDRB Sumatera Barat.²⁹ Selain bekerja di sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, penduduk Sumatera Barat juga banyak bekerja di sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan industri rumahan lainnya guna menggerakkan perekonomian mereka. Disebabkan watak masyarakat Sumatera Barat sejak dulu suka berdagang (berwirausaha), UMKM dan industri rumahan dipilih penduduk sebagai salah satu

²⁷BPS Sumbar, Katalog: Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka Tahun 2019, <https://sumbar.bps.go.id/publication/download>, diakses tanggal 16 Agustus 2019, 134.

²⁸ Sanerya Hendrawa, *Spiritual Management...*, h, 79.

²⁹ BPS Sumbar, Katalog: Provins., 120.

cara memperoleh pendapatan untuk memenuhi kebutuhan. Pada tahun 2018 UMKM terdiri dari Mikro 423.280, pelaku usaha kecil 74.410, pelaku usaha menengah dan besar 3.720 yang tersebar disetiap kota/kabupaten di Sumatera Barat. Hal ini yang menjadi penyebab jumlah penduduk tidak signifikan mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan di Sumatera Barat karena banyaknya jumlah penduduk diikuti dengan banyaknya penduduk usia produktif yang bekerja.

4. Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Pada temuan penelitian ini tingkat pengangguran terbuka berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Sumatera Barat, hal ini berarti apabila terjadi peningkatan tingkat pengangguran terbuka maka ketimpangan distribusi pendapatan mengalami penurunan. Hasil penelitian ini kurang sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rinjani (2018) dan Syilviaran (2017) yang menyatakan tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Namun hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Haryoto (2017) yang mengemukakan tingkat pengangguran terbuka berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Jawa Tengah kerana tingkat pengangguran terbuka menurun dan berada dibawah tingkat pengangguran terbuka nasional.³⁰

Jumlah pengangguran di suatu wilayah juga dipengaruhi oleh jumlah lapangan kerja yang tersedia. Terbatasnya jumlah lapangan kerja yang tersedia akan

³⁰ Edi Haryoto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2014*, (Yogyakarta: UIN SUKA, 2017).

menyebabkan para tenaga kerja akan kesulitan mencari pekerjaan dan berpotensi untuk menganggur, selain itu mereka juga kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pada akhirnya tingkat pengangguran terbuka di daerah tersebut akan meningkat. Dengan tingginya tingkat pengangguran terbuka di wilayah tersebut maka akan menyebabkan semakin tidak merata atau ketimpangan pendapatan di masyarakat semakin tinggi. Tingkat pengangguran terbuka yang cukup tinggi pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat mengindikasikan masih adanya faktor produksi (tenaga kerja) yang masih belum diserap secara optimal dalam menunjang pembangunan di setiap wilayah. Hal ini diakibatkan berbagai faktor diantaranya : rendahnya kualitas pendidikan dan kesehatan, rendahnya kemampuan daya beli (*purchasing power*), meningkatnya jumlah penganggur, meningkatnya arus migrasi (desa-kota) dan ketimpangan pertumbuhan ekonomi (antar wilayah).³¹

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Barat, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Agustus 2017 tercatat sebesar 5,5 persen atau naik 0,49 persen sedangkan pada Agustus 2018 berkurang sekitar 0,03 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun secara parsial persentase mengalami penurunan, namun secara jumlah, pengangguran justru meningkat hampir tiga ribu orang dari 138,7 ribu orang menjadi 141,168 ribu orang. Hal ini terjadi karena dalam periode yang sama juga terjadi peningkatan jumlah angkatan kerja yang cukup tinggi sebagai pembagi dalam perhitungan persentase TPT. Secara spasial, TPT di wilayah perkotaan lebih tinggi dibandingkan di perdesaan. Pada Agustus 2017, TPT perkotaan terpantau sebesar 6,63 persen sedangkan di pedesaan sebesar 4,71 persen.

³¹ Kementrian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI, *Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2016*, Jakarta : Pusat Perencanaan Tenaga Kerja, 2011, 2.

Dari 19 kab/kota di Sumatera Barat.³² Ditinjau dari latar belakang pendidikannya, pengangguran di Sumatera Barat masih didominasi lulusan diploma. TPT untuk kategori diploma tercatat sebesar 10,26 persen, dan berikutnya diikuti oleh pengangguran pada kategori SMK sebesar 8,55 persen. Terbatasnya lapangan pekerjaan atau industri yang membutuhkan kualifikasi pendidikan tinggi atau spesialisasi khusus terindikasi menjadi penyebab rendahnya penyerapan tenaga kerja dengan pendidikan menengah ke atas. Sementara itu, TPT pendidikan menengah ke bawah terpantau rendah bahkan TPT untuk tingkat SD ke bawah hanya mencapai 3,4 persen.³³ Hal ini terjadi karena lulusan pendidikan rendah cenderung menerima pekerjaan jenis apa saja.

Selain itu upah merupakan salah satu komponen penting dalam masalah pengangguran, dimana upah menjadi salah satu penentu pendapatan masyarakat suatu daerah. Apabila tingkat pengangguran semakin tinggi, maka nilai komponen upah akan semakin kecil. Dengan demikian, nilai pendapatan masyarakat pun akan menjadi kecil yang mengakibatkan munculnya ketimpangan distribusi pendapatan antar masyarakat. Upah Minimum Provinsi (UMP) Provinsi Sumatera Barat naik sebesar 8,03 persen di tahun 2019 dibandingkan tahun sebelumnya. UMP tahun 2019 di Sumbar sebesar Rp 2.289.228 per bulan mengalami kenaikan sebesar Rp 170 ribu dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp 2.119.067 per bulan.³⁴ Peningkatan UMP ini bertujuan untuk mengurangi pengangguran dan mendorong kelompok usia muda (lulusan SMK dan Diploma) untuk terlibat dalam pasar tenaga kerja sehingga

³² Bank Indonesia, *Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sumatera Barat*, (Padang : BI, 2018), 113.

³³ Bank Indonesia, *Kajian Ekonomi dan...*, 114.

³⁴ Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2019, https://www.sumbarprov.go.id/images/2018/11/file/UMP_2019.pdf, diakses tanggal 4 Agustus 2019.

dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja serta menyetarakan ketimpangan pendapatan diantara masyarakat. Kenaikan UMP Sumatera Barat yang mendorong pengurangan jumlah pengangguran ini sesuai dengan prinsip Islam yang telah memperingatkan agar umatnya jangan sampai ada yang menganggur dan terpeleset kejurang kemiskinan, karena ditakutkan dengan kemiskinan tersebut seseorang akan berbuat apa saja termasuk yang merugikan orang lain demi terpenuhinya kebutuhan pribadinya, ada sebuah hadist yang mengatakan “kemiskinan akan mendekatkan kepada kekufuran. Jadi dapat disimpulkan hal yang menjadi penyebab tingkat pengangguran terbuka tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Sumatera Barat adalah upah minimum provinsi yang mengalami kenaikan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil yang diperoleh dengan adanya dilakukan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh variabel independen yaitu PDRB perkapita, tingkat kemiskinan, jumlah penduduk dan tingkat pengangguran terbuka terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Sumatera Barat tahun 2011-2017. Adapun hasil yang analisis yang diperoleh maka dapat disimpulkan yaitu sebagai berikut:

1. PDRB perkapita berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan (gini ratio), hal ini mengindikasikan jika PDRB perkapita naik maka ketimpangan distribusi pendapatan juga ikut naik.
2. Tingkat kemiskinan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat tahun 2011-2017, pengaruh negatif ini mengindikasikan jika tingkat kemiskinan tinggi maka ketimpangan distribusi pendapatan menjadi turun .
3. Jumlah penduduk berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di kabupaten/kota di Sumatera Barat pada tahun 2011-2017, hal ini mengindikasikan bahwa apabila jumlah penduduk mengalami kenaikan maka ketimpangan distribusi pendapatan juga mengalami peningkatan.
4. Tingkat pengangguran terbuka berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Sumatera Barat, hal ini

mengindikasikan bahwa kenaikan tingkat pengangguran terbuka akan menurunkan ketimpangan distribusi pendapatan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka saran yang penelitian rekomendasikan sebagai berikut:

1. Pemerataan distribusi pendapatan dengan tujuan pencapaian kesejahteraan pada seluruh golongan masyarakat menjadi tujuan utama dalam proses pembangunan ekonomi, jadi pemerintah daerah maupun pusat harus bersinergi dalam melaksanakan tahap-tahap untuk mencapai pembangunan yang merata. Sehingga pembangunan yang telah dirancang dapat berjalan sesuai dengan tujuan serta pencapaian yang diinginkan
2. Diharapkan pemerintah mampu membuat kebijakan yang dilakukan secara konsisten untuk meningkatkan kinerja berbagai sektor khususnya sektor riil dan industri seperti pertanian, kehutanan, serta industri manufacture. Dengan terselenggara baiknya sektor-sektor tersebut, maka lapangan pekerjaan baru akan terbuka lebih banyak sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran di Provinsi Sumatera Barat.
3. Bagi penelitian selanjutnya yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut tentang faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan di Sumatera Barat perlu modifikasi variabel-variabel independen baik menambah variabel atau menambah jumlah observasi tahun penelitian serta menggunakan alat analisis yang berbeda. Sehingga akan lebih objektif dan bervariasi dalam melakukan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- A,Daryanto dan Hafrizrianda Y, *Model-Model Junatitatif Untuk Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah: Konsep dan Aplilaksi*, Bogor, IPB Press, 2010.
- Adipuryanti, Ni Luh Putu Yuni dkk, “Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk Yang Bekerja Dan Investasi Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Melalui Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Bal”, *Piramida*, Vol.9 No,1, 2010.
- Amar, Syamsul, Kajian Ekonomi Tentang Kemiskinan Di Perdesaan Propinsi Sumatera Barat, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 7, No. 2, 2002.
- Anggina, Del dan Wahyu Dwi Artaningtyas, Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pertumbuhan Penduduk, Pertumbuhan Investasi, Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Daerah Istimewa Yogyakarta, *Buletin Ekonomi* , Vol.15, No. 1, (April 2017).
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Arsyad, Lincolin, *Ekonomi Pembangunan*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2010.
- Avriandaru, Fergiawan, *Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Indeks Pembangunan Manusia, Pendidikan, Populasi Penduduk, Dan Pengangguran Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Provinsi Jawa Tengah Periode 2010-2015*, (Yogyakarta: UIN SUKA, 2018).
- Aziz, Abdul, *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008.
- Badan Pusat Statistik, *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi-Provinsi Di Indonesia Menurut Lapangan Usaha*, Jakarta :BPS, 2018.
- Bantika, Vredrich, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Sulawesi Utara, *Jurnal Cocos*, Vol.6 No.17, 2015.
- Basuki Agus Tri dan Nano Prawoto, *Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi & Bisnis: Dilengkapi Aplikasi SPSS & EViews*, Depok : PT Rajagrafindo, 2016.
- Bank Indonesia , *Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sumatera Barat*, (Padang : BI, 2018).

- Berita resmi statistik “*Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Sumatera Barat September 2018*”, No. 06/01/13/Th. XXII, 15 JANUARI 2019, diakses tgl 29 juli 2019.
- Berita Resmi Statistik, *Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Sumatera Barat Maret 2018*, 2. <https://sumbar.bps.go.id/pressrelease/2018/07/16/670/gini-ratio-penduduk-sumatera-barat-maret-2018-tercatat-sebesar-0-321.html>, diakses Tanggal 8 Februari 2019.
- BPS Sumbar, Katalog: Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka Tahun 2019, <https://sumbar.bps.go.id/publication/download>, diakses tanggal 16 Agustus 2019.
- Boediono, *Ekonomi Makro: Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No. 2*, Yogyakarta: BPFE, 1997.
- Bonet, J.A, Fiscal Decentralization and Regional Income Disparities: Evidence from the Colombian Experience, *The Annals of Regional Science*, 40, 3, 2006.
- Dewi, Izdiana Puspa, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Indonesia Periode 2009-2013”, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 2015.
- Diana, Rita, *Pengeluaran Untuk Konsumsi Penduduk Provinsi Sumatera Barat 2017-2018*, Padang : BPS Provinsi Sumatera Barat, 2019.
- Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, “Kajian Kependudukan”, <http://www.anggaran.depkeu.go.id/content/Publikasi/Kajian%20dan%20artikel/Kajian%20Kependudukan.pdf>, diakses tanggal 18 Februari 2019.
- Ekananda, Mahyus, *Ekonometrika Dasar: Untuk Penelitian Bidang Ekonomi, Sosial Dan Bisnis*, Jakarta: Mitrawacana Media, 2015.
- Firmansyah, Abrian, Duta Dampak Pemberian Bantuan Sosial Terhadap Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan di Indonesia, <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel>, diakses, tgl 5 Agustus 2019.
- Fulgsang, Simon, *Determinants of Income Inequality : Sub-Saharan Perspective*, Thesis. Aarhus University, 2013.
- Gazali, M.Iqbal, *Analisis Faktor Determinan Ketimpangan Distribusi Pendapatan Antarkabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2017*, Yogyakarta : UGM, 2019.

- Gurajanti, Domodar N, *Ekonometrika Dasar*, Jakarta: Erlangga, 1998.
- Hartadi, Ryan, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Jawa Tengah*, (Yogyakarta: UIN SUKA, 2018).
- Hartini, Nita Tri, *Pengaruh PDRB Per Kapita, Investasi Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Ketimpangan Pendapatan Antar Daerah Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011-2015*, Yogyakarta: UNY, 2017.
- Hendrawa, Sanerya, *Spiritual Management*, Bandung: Mizan, 2009.
- Huda, Nurul, dkk., *Ekonomi Pembangunan Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Idri, *Hadis Ekonomi, Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Kasiran, Moh, *Metodologi Penelitian: Refleksi Pengembangan Dan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian*, Malang: UIN Maliki Press, 2010.
- Kementrian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI, *Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2016*, Jakarta : Pusat Perencanaan Tenaga Kerja, 2011, 2.
- Kuncoro, Mudrajad, *Ekonomika Pembangunan, Teori, Masalah dan Kebijakan*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2006.
- Maidar, Rosti dkk, "Analisis Tingkat Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten Di Provinsi Aceh Periode 2002-2015" *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik Indonesia*, 4, Mei, 2017.
- Maipita, I, *Mengukur Kemiskinan dan Distribusi Pendapatan*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014.
- Mankiw, N. Gregory, *Makroekonomi Edisi Keenam*, Jakarta: Erlangga, 2006.
- Mulyadi, *Ekonomi Sumberdaya Manusia Dalam Perspektif Pembangunan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Musfidar, Ma'mun, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Sulawesi Selatan Tahun 2001-2010*, Makassar: UNHAS, 2012.
- N, Hasibuan, *Pemerataan Pembangunan Ekonomi*, Pelembang: Universitas Sriwijaya, 2003.

- Nachrowi, Nachrowi Djalal dan Hardius Usman, *Pendekatan Populer dan Praktis Ekonometrika untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan*, Jakarta: Badan Penerbit Universitas Indonesia, 2006.
- Nasution, Mustafa Edwin, dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2006.
- NSS, Prapati Lulus, *Keterkaitan Anatara Pertumbuhan Ekonomi Dan Distribusi Pendapatan (Studi Kasus 35 Kabupaten/ Kota Jawa Tengah 2000-2004, Thesis*, Semarang: UNDIP, 2006.
- Prawiro, H Ruslan, *Kependudukan, Teori, Fakta dan Masalah*, Bandung: Alumni, 1983.
- Priyono, *Metode penelitian Kuantitatif*, Surabaya: Zifatama Publishing, 2016.
- Putong , Iskandar dan Nuring Dyah Andjaswati, *Pengantar Ekonomi Makro*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010.
- Rahma, Ellza Alfya , *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan Antar Provinsi Di Pulau Jawa Tahun 2010-2016*, Yogya Karta : UII , 2018.
- Rahardja, Pratama dan Mandala Manurung, *Teori Ekonomi Makro: Suatu Pengantar*, Jakarta: FE UI, 2008.
- Ratih, Inge Aryunah, *Analisis Kausalitas Kesenjangan Pendapatan, Kemiskinan Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Malang*, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 2015.
- Andiny, Puti dan Pipit Mandasari, “Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan terhadap Ketimpangan Di Propinsi Aceh”, *Jurnal Ekonomi Akuntansi* , Vol. 1, No.2, 2017.
- Rosa, Yani Del dan Ingra Sovita, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Pulau Jawa*, *Jurnal Menara Ekonomi*, Vol.II No. 4, 2016.
- Sjafari, Agus, *Kemiskinan dan Pemberdayaan Kelompok*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Sjafrizal, *Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi*, Padang: Baduose Media, 2008
- Samsir, Andi, & Abdul Rahman, *Menelusur Ketimpangan Distribusi Pendapatan Kabupaten dan Kota*, *Jurnal EcceS*, Vol. 5 No. 1, 2018.

- Sudarlan, “Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan dan Kemiskinan di Indonesia”. *Jurnal EKSIS*, Vol.11, 2015.
- Sukirno, Sadono, *Ekonomi Pembangunan :Proses, Masalah, Dan Dasr Kebijakan*, Jakarta: Rajawali, 2011.
- Suparlan, Parsudi, *Kemiskinan di Perkotaan: Bacaan Untuk Antropologi Perkotaan*, Jakarta :Yayasan Obor Indonesia, 1995.
- Tambunan, Tulus, *Perekonomian Indonesia: Teori dan Temuan Empiris*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001.
- Tanzeh, Ahmad, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta, Teras, 2009.
- Teguh, Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Todaro, Michael P. dan Stephen C. Smith, *Pembangunan Ekonomi*, Jakarta: Erlangga, 2006.
- Widarjono, Agus, *Analisis Statistiska Multivariat Terapan*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2010.
- Widarjono, Agus, *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya*, Yogyakarta: Ekonisia, 2007.
- Wie, Thee Kian, *Pembangunan Ekonomi dan Pemerataan*, Jakarta:LP3ES, 1981.
- Yusmarni, Analisis Bonus Demografi Sebagai Kesempatan Dalam Mengoptimalkan Pembangunan Pertanian Di Sumatera Barat, *Agrisept*, Vol 16 No.1 Maret 2016.
- Yusuf, Arif Anshory, *Keadilan Untuk Pertumbuhan*, Bandung, Unpad Press, 2018.
- Yuliadi, Imamudin, *Ekonomi Islam*, Yogyakarta: LPPI, 2001.
- Zukhri, *Peningkatan Sosial Ekonomi Keluarga Fakir Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif Kelompok Usaha Bersama (UEP. KUBE) Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Keluarga*, <https://sumbarprov.go.id>, diakses, tanggal 5 agustus 2019.
- 2019, Pasaman Barat prioritaskan pembangunan infrastruktur, <https://sumbar.antaranews.com/>, diakses tanggal 28 September 2019.

LAMPIRAN

Lampiran 1

Data Mentah Penelitian

Id	Wilayah	Tahun	GR(y)	PDRB Pkpt (x1)	TK (x2)	JP(x3)	TPT(x4)
1	Kep.Mentawai	2011	0.33	25654270	14600	78215	2.97
1	Kep.Mentawai	2012	0.34	26436920	1300	79976	4.86
1	Kep.Mentawai	2013	0.33	27324950	13300	81840	0.4
1	Kep.Mentawai	2014	0.31	28237570	12580	83603	1.66
1	Kep.Mentawai	2015	0.28	29985200	13160	85416	1.25
1	Kep.Mentawai	2016	0.31	29985200	13090	87328	0.25
1	Kep.Mentawai	2017	0.32	309145500	12950	89242	1.96
2	Pesisir Selatan	2011	0.26	14336750	42400	434884	10.07
2	Pesisir Selatan	2012	0.28	15032080	38200	438891	8.9
2	Pesisir Selatan	2013	0.26	15783300	38300	442681	11.03
2	Pesisir Selatan	2014	0.29	16557410	35020	446479	9.58
2	Pesisir Selatan	2015	0.28	18140350	38130	450487	11.69
2	Pesisir Selatan	2016	0.27	18140350	35860	454656	12.69
2	Pesisir Selatan	2017	0.3	18979090	35530	458652	5.95
3	Solok	2011	0.29	18269340	39500	352814	5.93
3	Solok	2012	0.36	19289700	35700	355628	4.55
3	Solok	2013	0.28	20218430	36900	358383	5.75
3	Solok	2014	0.25	21228480	34480	361095	3.55
3	Solok	2015	0.29	23242360	36420	363946	3.97
3	Solok	2016	0.31	23242360	34060	366948	2.39
3	Solok	2017	0.29	24317530	33330	369804	6.05
4	Sijunjung	2011	0.3	21232360	20300	206584	3.56
4	Sijunjung	2012	0.3	22100780	18600	210675	4.26
4	Sijunjung	2013	0.29	23032890	18400	214560	3.81
4	Sijunjung	2014	0.32	23969390	17000	218588	3.58
4	Sijunjung	2015	0.29	25758040	17120	222791	4.26
4	Sijunjung	2016	0.33	25758040	17120	227082	3.26
4	Sijunjung	2017	0.33	26667380	16830	231348	3.32
5	Tanah Datar	2011	0.35	18734110	22600	340906	3.31
5	Tanah Datar	2012	0.31	19726650	20400	341911	3.42
5	Tanah Datar	2013	0.3	20822980	19800	342864	4.96
5	Tanah Datar	2014	0.26	21963650	18220	343875	3.3
5	Tanah Datar	2015	0.33	24168670	18220	344942	4.46
5	Tanah Datar	2016	0.3	24168670	19630	346142	3.46
5	Tanah Datar	2017	0.26	25343330	19270	347184	3.72
6	Padang Pariaman	2011	0.31	22138590	44600	395420	9.43

6	Padang Pariaman	2012	0.31	23288030	40400	398223	7.32
6	Padang Pariaman	2013	0.28	24567450	36800	400890	7.36
6	Padang Pariaman	2014	0.29	25882250	339200	403530	7.84
6	Padang Pariaman	2015	0.3	28626280	363400	406332	5.8
6	Padang Pariaman	2016	0.26	28626280	36340	409295	4.8
6	Padang Pariaman	2017	0.28	30049870	34700	412090	6.65
7	Agam	2011	0.28	20517310	43300	460818	4.96
7	Agam	2012	0.31	21587870	39300	465018	3.69
7	Agam	2013	0.27	22723290	36100	468970	5.43
7	Agam	2014	0.27	23864560	33280	472995	5.56
7	Agam	2015	0.31	26119290	36060	477221	6.05
7	Agam	2016	0.29	26119290	36570	481610	5.05
7	Agam	2017	0.28	27334930	36570	485815	4.23
8	Lima Puluh Kota	2011	0.26	20429670	35200	353915	4.66
8	Lima Puluh Kota	2012	0.31	2145230	31900	357772	3.03
8	Lima Puluh Kota	2013	0.23	22543950	30000	361645	3.94
8	Lima Puluh Kota	2014	0.24	23648270	27420	365389	2.41
8	Lima Puluh Kota	2015	0.33	25796900	28760	369217	3.78
8	Lima Puluh Kota	2016	0.27	25796900	28570	373312	2,78
8	Lima Puluh Kota	2017	0.26	269202500	26930	377276	2.6
9	Pasaman	2011	0.29	15785280	26800	257511	2.5
9	Pasaman	2012	0.29	16530190	24300	260674	3.35
9	Pasaman	2013	0.29	17281920	22200	263838	1.55
9	Pasaman	2014	0.26	18088060	20330	266888	3.27
9	Pasaman	2015	0.3	19585140	21880	270152	5.06
9	Pasaman	2016	0.3	19585140	20830	273510	4.06
9	Pasaman	2017	0.26	20364580	20380	276783	6.81
10	Solok Selatan	2011	0.29	17599260	15500	147884	8.39
10	Solok Selatan	2012	0.31	1829140	14200	150885	7.18
10	Solok Selatan	2013	0.32	19026580	12600	153943	3.67
10	Solok Selatan	2014	0.29	19770090	11560	156901	4.93
10	Solok Selatan	2015	0.38	21110570	11950	160015	6.3
10	Solok Selatan	2016	0.31	21110570	11910	163245	5.3
10	Solok Selatan	2017	0.3	21812040	11890	166463	5.54
11	Dharmasraya	2011	0.37	24412930	19600	198273	4.06
11	Dharmasraya	2012	0.43	25134200	18200	204510	6.2
11	Dharmasraya	2013	0.34	25986050	16400	210686	5.23
11	Dharmasraya	2014	0.32	26837170	15220	216928	2.94
11	Dharmasraya	2015	0.36	28303180	15390	223513	3.51
11	Dharmasraya	2016	0.3	28303180	16240	230327	2.51
11	Dharmasraya	2017	0.25	29064520	15630	237239	3.69
12	Pasaman Barat	2011	0.27	19661460	33800	375314	5.16

12	Pasaman Barat	2012	0.28	20422530	31100	384206	7.1
12	Pasaman Barat	2013	0.26	21249050	31100	392907	6.49
12	Pasaman Barat	2014	0.26	22044300	28590	401624	8.17
12	Pasaman Barat	2015	0.29	23536230	32340	410827	3.79
12	Pasaman Barat	2016	0.31	23536230	30760	420301	2.79
12	Pasaman Barat	2017	0.29	24301230	30840	429795	3.99
13	Padang	2011	0.3	32255900	50900	850306	16.9
13	Padang	2012	0.33	33722090	45900	863401	12.35
13	Padang	2013	0.37	35423250	44200	876670	14.1
13	Padang	2014	0.33	37166590	40700	889561	12.28
13	Padang	2015	0.35	40841670	44430	903312	14
13	Padang	2016	0.35	40841670	42560	917394	13
13	Padang	2017	0.34	42821650	43750	931268	9.44
14	Kota Solok	2011	0.35	29678480	4000	60904	11.57
14	Kota Solok	2012	0.32	31025280	3700	62198	5.76
14	Kota Solok	2013	0.32	32324010	2900	63541	5.66
14	Kota Solok	2014	0.3	33591520	2710	64819	6.49
14	Kota Solok	2015	0.34	36254760	2720	66141	4.72
14	Kota Solok	2016	0.34	36254760	2590	67530	3.72
14	Kota Solok	2017	0.3	37625600	2500	68916	5.88
15	Sawahlunto	2011	0.34	30994850	1400	57681	5.65
15	Sawahlunto	2012	0.39	32294730	1300	58419	6.23
15	Sawahlunto	2013	0.3	33945840	1400	58972	6.16
15	Sawahlunto	2014	0.35	35626840	1340	59608	6.38
15	Sawahlunto	2015	0.33	39171560	13400	60236	7.18
15	Sawahlunto	2016	0.32	39171560	1340	60904	6.18
15	Sawahlunto	2017	0.3	41006290	1230	61551	6.19
16	Padang Panjang	2011	0.4	34030410	3500	47982	12.56
16	Padang Panjang	2012	0.45	35515430	3200	48719	7.95
16	Padang Panjang	2013	0.29	37128210	3300	49536	7.03
16	Padang Panjang	2014	0.37	38858430	32300	50208	8.29
16	Padang Panjang	2015	0.37	42275520	3440	50989	6.33
16	Padang Panjang	2016	0.38	42275520	3470	51794	5.33
16	Padang Panjang	2017	0.3	44124930	3220	52586	5.43
17	Bukittinggi	2011	0.33	33529000	7300	113903	8.73
17	Bukittinggi	2012	0.32	35055070	6700	116075	7.42
17	Bukittinggi	2013	0.37	36567090	6400	118260	4.72
17	Bukittinggi	2014	0.34	38114700	6000	120491	3.93
17	Bukittinggi	2015	0.34	41448710	6540	122718	6.04
17	Bukittinggi	2016	0.33	41448710	6810	125051	5,04
17	Bukittinggi	2017	0.31	43244680	6750	127369	6.94
18	Payakumbuh	2011	0.32	23158890	12000	119372	9.76

18	Payakumbuh	2012	0.36	24260050	11000	121502	7.67
18	Payakumbuh	2013	0.4	25400760	9700	123654	7.16
18	Payakumbuh	2014	0.31	26606460	8850	125690	6.36
18	Payakumbuh	2015	0.37	29023630	8510	127932	7.07
18	Payakumbuh	2016	0.34	29023630	8350	130191	6.07
18	Payakumbuh	2017	0.3	30329030	7720	132430	3.45
19	Pariaman	2011	0.35	28572340	4500	80426	14.43
19	Pariaman	2012	0.38	29924140	4100	81501	13.28
19	Pariaman	2013	0.4	31302370	4400	82636	6.07
19	Pariaman	2014	0.3	32789610	4300	83610	6.07
19	Pariaman	2015	0.33	35737870	4580	84760	6.61
19	Pariaman	2016	0.34	35737870	4470	85905	5.61
19	Pariaman	2017	0.3	37342520	4490	87025	5.97

Lampiran 2

Data Setelah Ditransformasikan Dalam Bentuk Logaritma

	LOGGR	LOGPDRBP	LOGTK	LOGJP	LOGTPT
1 - 11	1.108663	17.06022	9.588777	11.26722	1.088562
1 - 12	1.07881	17.09027	7.17012	11.28948	1.581038
1 - 13	1.108663	17.12331	9.495519	11.31252	0.916291
1 - 14	1.171183	17.15616	9.439864	11.33383	0.506818
1 - 15	1.272966	19.48907	9.484937	11.35529	0.223144
1 - 16	1.171183	17.21621	9.479604	11.37743	1.386294
1 - 17	1.139434	19.54932	9.468851	11.39911	0.672944
2 - 11	1.347074	16.47834	10.6549	12.98283	2.309561
2 - 12	1.272966	16.5257	10.55059	12.99201	2.186051
2 - 13	1.347074	16.57446	10.55321	13.0006	2.400619
2 - 14	1.237874	16.62234	10.46367	13.00915	2.259678
2 - 15	1.272966	16.66983	10.54876	13.01808	2.458734
2 - 16	1.309333	16.71365	10.48738	13.0273	2.540814
2 - 17	1.203973	16.75885	10.47813	13.03605	1.783391
3 - 11	1.237874	16.72073	10.58406	12.7737	1.780024
3 - 12	1.021651	16.77508	10.48291	12.78164	1.515127
3 - 13	1.272966	16.82211	10.51597	12.78936	1.7492
3 - 14	1.386294	16.87085	10.44813	12.7969	1.266948
3 - 15	1.237874	16.91659	10.50287	12.80476	1.378766
3 - 16	1.171183	16.96149	10.43588	12.81298	0.871293
3 - 17	1.237874	17.00671	10.41421	12.82073	1.800058
4 - 11	1.203973	16.87104	9.918376	12.23846	1.269761
4 - 12	1.203973	16.91112	9.830917	12.25807	1.449269
4 - 13	1.237874	16.95243	9.820106	12.27634	1.337629

4 - 14	1.139434	16.99229	9.740969	12.29494	1.275363
4 - 15	1.237874	17.02954	9.748003	12.31399	1.449269
4 - 16	1.108663	17.06426	9.748003	12.33307	1.181727
4 - 17	1.108663	17.09895	9.730918	12.35168	1.199965
5 - 11	1.049822	16.74586	10.02571	12.73936	1.196948
5 - 12	1.171183	16.79748	9.92329	12.74231	1.229641
5 - 13	1.203973	16.85157	9.893437	12.74509	1.601406
5 - 14	1.347074	16.9049	9.810275	12.74803	1.193922
5 - 15	1.108663	16.95377	9.810275	12.75113	1.495149
5 - 16	1.203973	17.00057	9.884814	12.7546	1.241269
5 - 17	1.347074	17.04803	9.866305	12.75761	1.313724
6 - 11	1.171183	16.91283	10.70549	12.8877	2.243896
6 - 12	1.171183	16.96345	10.60659	12.89477	1.99061
6 - 13	1.272966	17.01693	10.51325	12.90144	1.99606
6 - 14	1.237874	17.06907	12.73435	12.90801	2.059239
6 - 15	1.203973	17.12227	12.80326	12.91493	1.757858
6 - 16	1.347074	17.16984	10.50067	12.92219	1.568616
6 - 17	1.272966	17.21837	10.45449	12.929	1.894617
7 - 11	1.272966	16.83678	10.67591	13.04076	1.601406
7 - 12	1.171183	16.88764	10.57898	13.04983	1.305626
7 - 13	1.309333	16.9389	10.49405	13.05829	1.691939
7 - 14	1.309333	16.98791	10.41271	13.06684	1.715598
7 - 15	1.171183	17.03324	10.49294	13.07573	1.800058
7 - 16	1.237874	17.07818	10.50698	13.08489	1.619388
7 - 17	1.272966	17.12368	10.50698	13.09358	1.442202
8 - 11	1.347074	16.8325	10.4688	12.77681	1.539015
8 - 12	1.171183	14.57876	10.37036	12.78765	1.108563
8 - 13	1.469676	16.93098	10.30895	12.79842	1.371181
8 - 14	1.427116	16.9788	10.21903	12.80872	0.879627
8 - 15	1.108663	17.02303	10.26674	12.81914	1.329724
8 - 16	1.309333	17.06576	10.26011	12.83017	1.004302
8 - 17	1.347074	19.41097	10.201	12.84073	0.955511
9 - 11	1.237874	16.57459	10.19616	12.45882	0.916291
9 - 12	1.237874	16.6207	10.09823	12.47103	1.20896
9 - 13	1.237874	16.66517	10.00785	12.48309	0.438255
9 - 14	1.347074	16.71076	9.919853	12.49458	1.18479
9 - 15	1.203973	16.7515	9.993328	12.50674	1.621366
9 - 16	1.203973	16.79028	9.94415	12.51909	1.401183
9 - 17	1.347074	16.82931	9.922309	12.53099	1.918392
10 - 11	1.237874	16.68337	9.648595	11.90418	2.127041
10 - 12	1.171183	14.41936	9.560997	11.92427	1.971299
10 - 13	1.139434	16.76135	9.441452	11.94434	1.300192
10 - 14	1.237874	16.79968	9.355306	11.96337	1.595339

10 - 15	0.967584	16.83348	9.388487	11.98302	1.84055
10 - 16	1.171183	16.86528	9.385134	12.00301	1.667707
10 - 17	1.203973	16.89797	9.383453	12.02253	1.711995
11 - 11	0.994252	17.01062	9.883285	12.1974	1.401183
11 - 12	0.84397	17.03974	9.809177	12.22837	1.824549
11 - 13	1.07881	17.07307	9.705037	12.25812	1.654411
11 - 14	1.139434	17.1053	9.630366	12.28732	1.07841
11 - 15	1.021651	17.1336	9.641473	12.31722	1.255616
11 - 16	1.203973	17.15848	9.695233	12.34726	0.920283
11 - 17	1.386294	17.18503	9.656947	12.37682	1.305626
12 - 11	1.309333	16.79417	10.42822	12.83552	1.640937
12 - 12	1.272966	16.83215	10.34496	12.85893	1.960095
12 - 13	1.347074	16.87182	10.34496	12.88133	1.870263
12 - 14	1.347074	16.90856	10.26081	12.90327	2.100469
12 - 15	1.237874	17.1336	10.38406	12.92593	1.332366
12 - 16	1.171183	16.97405	10.33397	12.94873	1.026042
12 - 17	1.237874	17.00604	10.33657	12.97106	1.383791
13 - 11	1.203973	17.28921	10.83762	13.65335	2.827314
13 - 12	1.108663	17.33366	10.73422	13.66863	2.513656
13 - 13	0.994252	17.38288	10.69648	13.68389	2.646175
13 - 14	1.108663	17.43092	10.61398	13.69848	2.507972
13 - 15	1.049822	17.47918	10.70167	13.71382	2.639057
13 - 16	1.049822	17.52521	10.65867	13.72929	2.564949
13 - 17	1.07881	17.57255	10.68625	13.7443	2.244956
14 - 11	1.049822	17.20593	8.29405	11.01705	2.448416
14 - 12	1.139434	17.25031	8.216088	11.03808	1.750937
14 - 13	1.139434	17.29132	7.972466	11.05944	1.733424
14 - 14	1.203973	17.32978	7.904704	11.07935	1.870263
14 - 15	1.07881	17.36786	7.908387	11.09954	1.551809
14 - 16	1.07881	17.40608	7.859413	11.12033	1.313724
14 - 17	1.203973	17.4432	7.824046	11.14064	1.771557
15 - 11	1.07881	17.24933	7.244228	10.96268	1.731656
15 - 12	0.941609	17.29041	7.17012	10.9754	1.829376
15 - 13	1.203973	17.34028	7.244228	10.98482	1.818077
15 - 14	1.049822	17.38861	7.200425	10.99555	1.853168
15 - 15	1.108663	17.43658	9.50301	11.00603	1.971299
15 - 16	1.139434	17.48346	7.200425	11.01705	1.821318
15 - 17	1.203973	17.52924	7.114769	11.02762	1.822935
16 - 11	0.916291	17.34277	8.160518	10.77858	2.530517
16 - 12	0.798508	17.38548	8.070906	10.79382	2.073172
16 - 13	1.237874	17.42989	8.101678	10.81045	1.950187
16 - 14	0.994252	17.47544	10.38282	10.82393	2.11505
16 - 15	0.994252	17.51935	8.143227	10.83937	1.8453

16 - 16	0.967584	17.55972	8.15191	10.85503	1.673351
16 - 17	1.203973	17.60254	8.077137	10.87021	1.691939
17 - 11	1.108663	17.32792	8.89563	11.6431	2.166765
17 - 12	1.139434	17.37243	8.809863	11.66199	2.004179
17 - 13	0.994252	17.41466	8.764053	11.68064	1.551809
17 - 14	1.07881	17.45611	8.699515	11.69933	1.368639
17 - 15	1.07881	17.49778	8.785692	11.71764	1.798404
17 - 16	1.108663	17.53997	8.826147	11.73648	1.617406
17 - 17	1.171183	17.58238	8.817298	11.75484	1.93586
18 - 11	1.139434	16.95789	9.392662	11.69	2.278292
18 - 12	1.021651	17.00434	9.305651	11.70769	2.037317
18 - 13	0.916291	17.05029	9.179881	11.72524	1.96851
18 - 14	1.171183	17.09666	9.088173	11.74157	1.850028
18 - 15	0.994252	17.13983	9.048997	11.75925	1.95586
18 - 16	1.07881	17.18362	9.030017	11.77676	1.803359
18 - 17	1.203973	17.22762	8.95157	11.79381	1.238374
19 - 11	1.049822	17.16795	8.411833	11.29509	2.669309
19 - 12	0.967584	17.21418	8.318742	11.30837	2.586259
19 - 13	0.916291	17.2592	8.38936	11.3222	1.803359
19 - 14	1.203973	17.30562	8.36637	11.33392	1.803359
19 - 15	1.108663	17.34887	8.429454	11.34758	1.888584
19 - 16	1.07881	17.39172	8.405144	11.361	1.724551
19 - 17	1.203973	17.43564	8.409608	11.37395	1.786747

Lampiran 3

Model Efek Umum (Common Effect Model/CEM)

Dependent Variable: LOGGR
Method: Panel Least Squares
Date: 11/02/19 Time: 20:49
Sample: 2011 2017
Periods included: 7
Cross-sections included: 19
Total panel (balanced) observations: 133

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.689124	0.372311	1.850939	0.0665
LOGPDRBP	-0.012186	0.017459	-0.697997	0.4864
LOGTK	0.007622	0.017219	0.442640	0.6588
LOGJP	0.059791	0.022728	2.630702	0.0096
LOGTPT	-0.068679	0.019146	-3.587086	0.0005
R-squared	0.284208	Mean dependent var		1.169027
Adjusted R-squared	0.261839	S.D. dependent var		0.122153
S.E. of regression	0.104949	Akaike info criterion		-1.633815
Sum squared resid	1.409829	Schwarz criterion		-1.525156
Log likelihood	113.6487	Hannan-Quinn criter.		-1.589660
F-statistic	12.70572	Durbin-Watson stat		1.681507
Prob(F-statistic)	0.000000			

Model Efek Tetap (Fixed Effect Model/FEM)

Dependent Variable: LOGGR

Method: Panel Least Squares

Date: 11/02/19 Time: 20:51

Sample: 2011 2017

Periods included: 7

Cross-sections included: 19

Total panel (balanced) observations: 133

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-5.510561	3.540680	-1.556357	0.1225
LOGPDRBP	0.017955	0.020261	0.886182	0.3775
LOGTK	-0.002597	0.020336	-0.127700	0.8986
LOGJP	0.524303	0.294539	1.780082	0.0778
LOGTPT	-0.002556	0.032459	-0.078751	0.9374

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.506814	Mean dependent var	1.169027
Adjusted R-squared	0.408176	S.D. dependent var	0.122153
S.E. of regression	0.093972	Akaike info criterion	-1.735641
Sum squared resid	0.971384	Schwarz criterion	-1.235806
Log likelihood	138.4201	Hannan-Quinn criter.	-1.532527
F-statistic	5.138154	Durbin-Watson stat	2.226128
Prob(F-statistic)	0.000000		

Model Efek Random (Random Effect Model /REM)

Sample: 2011 2017

Periods included: 7

Cross-sections included: 19

Total panel (balanced) observations: 133

Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.305688	0.392564	0.778697	0.4376
LOGPDRBP	0.005199	0.017256	0.301287	0.7637
LOGTK	0.002727	0.017609	0.154846	0.8772
LOGJP	0.068974	0.025360	2.719782	0.0074
LOGTPT	-0.056116	0.021843	-2.569030	0.0113

Effects Specification

	S.D.	Rho
Cross-section random	0.041607	0.1639
Idiosyncratic random	0.093972	0.8361

Weighted Statistics

R-squared	0.168759	Mean dependent var	0.759008
Adjusted R-squared	0.142783	S.D. dependent var	0.104023
S.E. of regression	0.096310	Sum squared resid	1.187289
F-statistic	6.496658	Durbin-Watson stat	1.913088
Prob(F-statistic)	0.000086		

